



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



BUKU STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BANGGAI

2024





SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI **H. AMIRUDIN,MM.,AIFO**

Seiring cepatnya laju perkembangan teknologi, Informasi saat sekarang ini, dapat mewujudkan visi “Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”.

Kerja keras para ASN dalam implementasi Banggai Satu Data dan Partisipasi Organisasi Daerah (OPD) yang terus menerus mengejar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Maka melalui Data Statistik Sektoral Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dapat mewujudkan layanan informasi data di kalangan Pemerintah Khususnya layanan informasi data dikalangan masyarakat pada umumnya demi kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

Di Era Demokrasi seperti ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi di segala Bidang menurut kita selaku Penyelenggara Pemerintah Daerah, untuk lebih terbuka dan transparansi dalam menyajikan data dan Informasi kepada masyarakat dan terus mensukseskan Banggai Satu Data



SAMBUTAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI **H. FURQUANUDDIN .M**

Di era demokrasi seperti sekarang ini ditengah pesatnya perkembangan teknologi yang merambah disegala ini dalam masyarakat, menuntut kita selaku penyelenggara pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data dan informasi kepada masyarakat.

Dapat mewujudkan kecepatan informasi data melalui Banggai Satu Data untuk mengejar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), demi kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dan tercapainya urusan Banggai Satu Data, maka melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyukseskan Statistik Sektorl Banggai Satu Data Kabupaten Banggai.



SAMBUTAN

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI
LESMANA P. KULAB, S.Kom**

Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai telah menetapkan kegiatan strategis di bidang Teknologi Informasi. Yang menjadi fokus utamanya adalah mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik berkinerja tinggi, transparan dan akuntabel serta mewujudkan Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai, dengan menciptakan dan mengembangkan inovasi layanan administrasi pemerintahan dan Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Mewujudkan Banggai Satu Data yang lebih maju.

Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memberikan informasi kepada publik, di segala sektor mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banggai siap melangkah bersama dengan semangat baru yang diwarnai dengan inovasi, integritas, optimisme dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banggai.

Tim Penyusun :

- ➡ **Penanggung Jawab :**
Lesmana P. Kulab, S.Kom
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- ➡ **Ketua :**
Nurma Yanthi, SE.MM
Kepala Bidang Statistik
- ➡ **Wakil Ketua :**
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- ➡ **Sekretaris :**
Arif Nasri, S.Sos
- ➡ **Anggota :**
Kepala Bidang E-Government
Kepala Bidang Teknologi dan Informasi
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Kepala Bidang Persandian
- ➡ **Koordinator Penyunting/Editor :**
Yudie Bermuli, SH
Asmah, S.I.P
Sitti Norma Dg. Manessa
Fitri Nafidah, S.Stat
Herza Nadhea Putri S., S.Stat
Hari Wiharto Pujiomo, S.Kom
- ➡ **Desain Grafis dan Lay-out :**
Muhamad Iqbal Halid, SE
Sandy Kusdianto Tulardi

Alamat :

Jl. Urip Sumoharjo, No. 15

Telp. : -

Email : statistikdkisp@gmail.com

Website : <https://data.bangkaikab.go.id>



ARTI LAMBANG

Perisai Lima, mengartikan bahwa Daerah Kabupaten Banggai adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bintang Bersudut Lima, berwarna Kuning Emas mengartikan sinar cahaya keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Burung Maleo yang berwarna Coklat dan Hitam dalam keadaan terbang adalah jenis margasatwa yang spesifik terdapat di Daerah Kabupaten Banggai dan mempunyai hubungan dengan adat istiadat di Daerah Kabupaten Banggai dan melambangkan tenaga membangun dari rakyat di Daerah Kabupaten Banggai.

Gunung ialah Gunung Tompotika di Daerah Kabupaten Banggai yang melambangkan kesabaran jiwa dan ketinggian cita-cita rakyat di Daerah Kabupaten Banggai.

Garis Batas yang berwarna kuning emas, adalah daratan yang melambangkan kesuburan tanah daerah Kabupaten Banggai.

Laut berwarna biru, mengartikan sebagian Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari Pulau-pulau yang kaya dengan hasil laut.

Sebatang Pohon Kelapa Berdaun 9 (Sembilan) dan berbuah 60 (enam puluh) mengartikan hasil utama Kabupaten Banggai dan melahirkan angka 1, 9 dan 60 yang berarti 1960.

Kulit Mutiara, adalah satu hasil laut yang spesifik terdapat di Daerah Kabupaten Banggai yang menghasilkan biji mutiara dan kulitnya dibuat perhiasan.

Padi 8 (delapan) butir warna kuning emas, mengartikan kemakmuran yang hendak dicapai dan melahirkan angka 8.

Kapas 7 (tujuh) buah juga mengartikan kemakmuran yang hendak dicapai dan melahirkan angka 7. Bingkai Perisai dan Pita Berwarna Putih bertuliskan "KABUPATEN BANGGAI" dengan huruf berwarna hitam mengartikan kesucian dan ketabahan hati rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

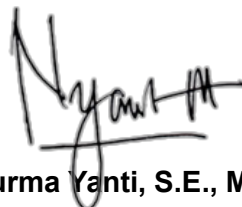
Warna Merah pada Perisai mengingat sejarah Kerajaan Banggai dahulu yang menggunakan bendera berwarna merah juga melambangkan keberanian dan kepahlawanan rakyat daerah Kabupaten Banggai.

KATA PENGANTAR

Buku Data Statistik Sektorial Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan salah satu media diseminasi Data Statistik Sektorial Kabupaten Banggai yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai. Data dan Informasi yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil Kompilasi Data Statistik Sektorial yang disertai dengan metadatanya atau informasi dari data yang ditampilkan. Buku ini berisi data sekunder dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai yang bersifat series/tahunan berdasarkan target kinerja RPJMD Tahun 2023. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Kabupaten Banggai berdasarkan Data Statistik Sektorial yang disajikan. Publikasi Buku Data Statistik Sektorial Daerah Kabupaten Banggai akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur, ulasan maupun mutunya. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Data Statistik Sektorial Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan Data Statistik, baik oleh Institusi Pemerintah

Banggai, 20 Desember 2024

Kepala Bidang Statistik



Nurma Yanti, S.E., MM

DAFTAR ISI

6

SAMBUTAN BUPATI BANGGAI

SAMBUTAN WAKIL BUPATI BANGGAI

SAMBUTAN KEPALA DINAS DKISP BANGGAI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Keadaan Geografis

1.2 Keadaan Iklim

BAB II PEMERINTAHAN

2.1 Sekretariat

2.2 Sekretariat DPRD

2.3 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.4 Kesatuan Bangsa dan Politik

2.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

2.6 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.7 Inspektorat Daerah

2.8 Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.9 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.10 Riset dan Inovasi Daerah

BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA

- 3.1 Pendidikan dan Kebudayaan
- 3.2 Pemuda dan Olahraga
- 3.3 Kesehatan
- 3.4 Sosial
- 3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.6 Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB IV INFRASTRUKTUR

- 4.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4.2 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 4.3 Lingkungan Hidup
- 4.4 Perhubungan

BAB V EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 5.1 Pangan
- 5.2 Pertanian
- 5.3 Pariwisata
- 5.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 5.5 Perikanan
- 5.6 Peternakan
- 5.7 Pendapatan Daerah
- 5.8 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5.9 Perdagangan dan Perindustrian

BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

6.1 Penanggulangan Bencana Daerah

6.2 Pemadam Kebakaran

6.3 Satuan Polisi Pamong Praja

KESIMPULAN

BAB I

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ber-ibukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara 122⁰23' dan 124⁰20' Bujur Timur, serta 0⁰30' dan 2⁰20' Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan ± 9.672,70 Km² atau sekitar 14,22 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah dan luas laut ± 20.309,68 Km² dengan garis pantai sepanjang 613,25 km.

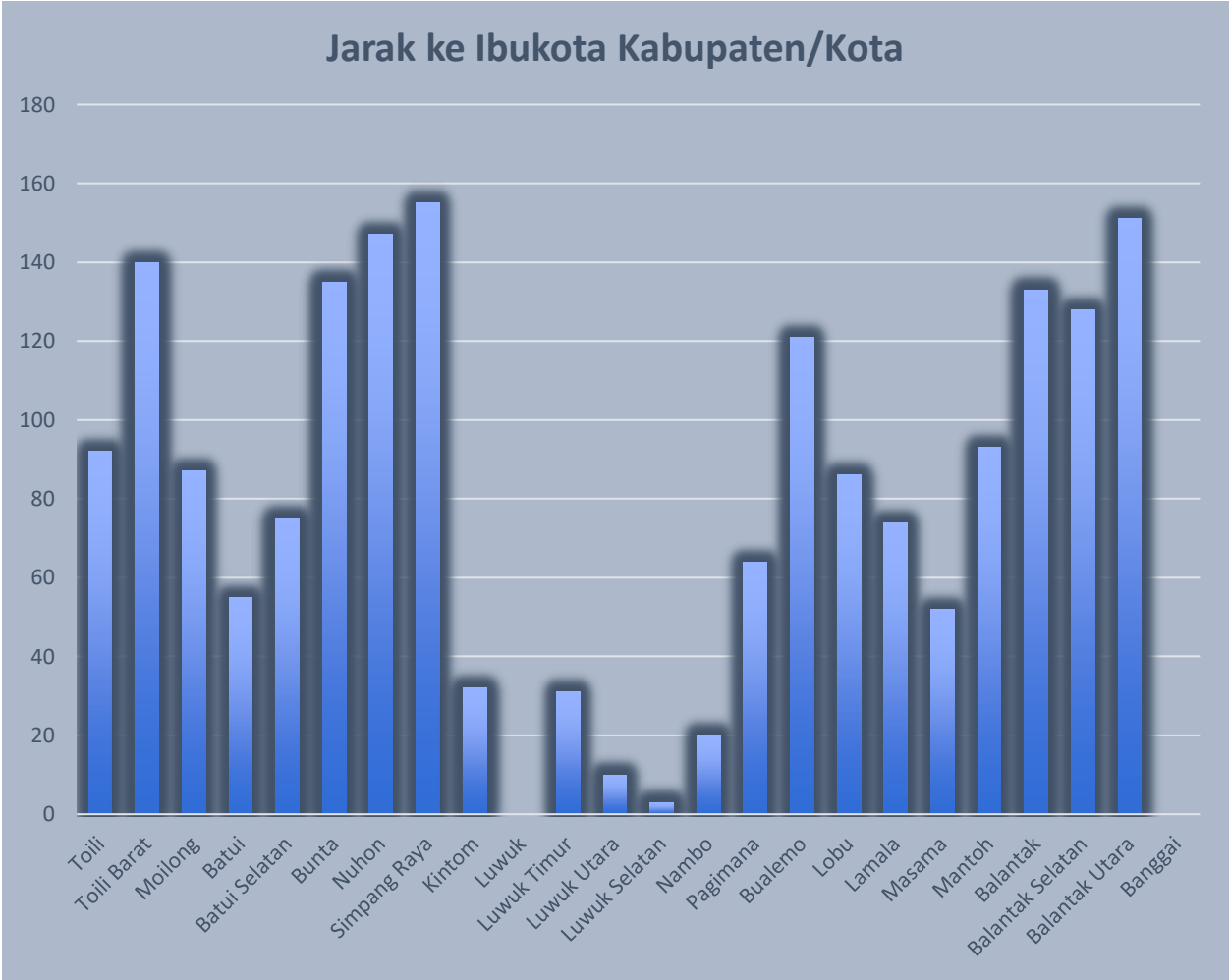
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Banggai memiliki batas-batas:

- Bagian Utara : Berbatasan dengan wilayah Tomini
- Bagian timur : Berbatasan dengan Wilayah Provinsi Maluku Utara
- Bagian selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Bagian barat : Bibatasi oleh Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali.

Secara geografis, Kabupaten Banggai memilik 23 kecamatan, 291 desa serta 46 kelurahan.



Jarak dari Kecamatan Kabupaten/Kota ke Ibukota Kabupaten Banggai (km), 2023



1.1 KEADAAN GEOGRAFI

Keadaan geografis adalah kondisi suatu wilayah yang dilihat dari aspek geografis, seperti letak, relief, iklim, cuaca, flora dan fauna. Letak geografis adalah posisi suatu daerah di bumi berdasarkan letak dan bentuknya, serta dibandingkan dengan posisi daerah lain.

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

Kecamatan	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (km2)
Toili	Cendana Pura	762.63
Toili Barat	Sindang Sari	993.67
Moilong	Toili	220.32
Batui	Batui	1062.36
Batui Selatan	Sinorong	327.97
Bunta	Bunta	579
Nuhon	Tomeang	1107
Simpang Raya	Rantau Jaya	243.69
Kintom	Kintom	428.78
Luwuk	Luwuk	72.82
Luwuk Timur	Hunduhon	216.3
Luwuk Utara	Biak	246.08
Luwuk Selatan	Simpong	119.8
Nambo	Lontio	169.7
Pagimana	Pagimana	957.34
Bualemo	Bualemo	862
Lobu	Lobu	138.44
Lamala	Bonebobakal	220.66
Masama	Tangeban	231.64
Mantoh	Sobol	226
Balantak	Balantak	196.46
Balantak Selatan	Tongke	146.5
Balantak Utara	Teku	143.6
Banggai	Luwuk	9672.7

Persentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2023

Kecamatan	Ibu Kota Wilayah	Persentase Terhadap Luas Wilayah
1	2	3
Toili	Cendana Pura	7.88
Toili Barat	Sindang Sari	10.27
Moilong	Toili	2.28
Batui	Batui	10.98
Batui Selatan	Sinorong	3.39
Bunta	Bunta	5.99
Nuhon	Tomeang	11.45
Simpang Raya	Rantau Jaya	2.52
Kintom	Kintom	4.43
Luwuk	Luwuk	0.75
Luwuk Timur	Hunduhon	2.24
Luwuk Utara	Biak	2.54
Luwuk Selatan	Simpang	1.24
Nambo	Lontio	1.75
Pagimana	Pagimana	9.9
Bualemo	Bualemo	8.91
Lobu	Lobu	1.43
Lamala	Bonebobakal	2.28
Masama	Tangeban	2.39
Mantoh	Sobol	2.34
Balantak	Balantak	2.03
Balantak Selatan	Tongke	1.51
Balantak Utara	Teku	1.48
Banggai	Luwuk	100

Tinggi Wilayah Kabupaten Banggai menurut Kecamatan dan Jarak ke Ibukota kabupaten banggai menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota
1	2	3
Toili	10	92
Toili Barat	19	140
Moilong	4	87
Batui	10	55
Batui Selatan	21	75
Bunta	11	135
Nuhon	15	147
Simpang Raya	61	155
Kintom	22	32
Luwuk	14	0
Luwuk Timur	14	31
Luwuk Utara	20	10
Luwuk Selatan	17	3
Nambo	25	20
Pagimana	22	64
Bualemo	5	121
Lobu	11	86
Lamala	2	74
Masama	5	52
Mantoh	3	93
Balantak	3	133
Balantak Selatan	14	128
Balantak Utara	1	151
Banggai	Luwuk	0

1.2 KEADAAN IKLIM

Iklm merupakan suatu kondisi cuaca pada daerah atau wilayah dalam kurun waktu yang lama dan iklim juga dapat diartikan sebagai cuaca yang dirata-ratakan pada periode tertentu atau dalam jangka waktu yang lama.

Kabupaten Banggai memiliki rata-rata hari hujan 14-18 hari perbulan. Suhu udara maksimum rata-rata 29,6°C – 33,1°C, Sedangkan suhu udara minimum 21,7°C – 24,8°C.

Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara menurut bulan di kabupaten banggai Tahun 2023

Bulan	Suhu Temperatur			Kelembabaan		
	Min	Rata-rata average	Max	Min	Rata-rata average	Max
Januari	23,80	28,20	33,30	58,00	79,40	97,00
Februari	24,30	28,40	33,40	53,00	77,90	95,00
Maret	24,00	28,20	32,90	61,00	79,40	95,00
April	23,60	28,10	33,40	62,00	80,20	97,00
Mei	20,30	27,70	32,60	60,00	80,10	98,00
Juni	23,80	27,40	31,70	61,00	79,70	98,00
Juli	22,70	27,00	31,50	56,00	78,80	98,00
Agustus	22,60	26,60	31,90	56,00	75,40	98,00
September	22,10	27,00	31,80	53,00	72,70	95,00
Oktober	22,70	28,40	32,10	50,00	72,10	96,00
November	25,00	29,10	33,60	60,00	76,50	96,00
Desember	23,50	29,10	34,60	55,00	78,50	95,00

Jumlah Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Tekanan Udara (mbar)		
	Min	Rata-rata average	Max	Min	Rata-rata average	Max
Januari	0,00	4,10	14,00	1001,10	1005,90	1012,10
Februari	0,00	4,10	17,00	1001,90	1005,90	1010,00
Maret	0,00	4,20	15,00	1003,10	1007,50	1011,80
April	0,00	4,60	16,00	1002,50	1006,70	1011,60
Mei	0,00	5,70	15,00	1001,60	1008,50	1012,80
Juni	0,00	6,00	17,00	1004,60	1008,40	1011,90
Juli	00,0	7,20	18,00	1005,20	1009,20	1012,30
Agustus	0,00	8,40	19,00	1006,60	1010,40	1014,50
September	0,00	8,80	17,00	1006,20	1009,60	1013,30
Oktober	0,00	7,60	19,00	1005,20	1009,50	1012,60
November	0,00	4,40	13,00	1002,90	1007,40	1011,00
Desember	0,00	4,30	12,00	1002,60	1007,20	1011,70

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan Pertahun (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
Januari	0,00	4,10	14,00
Februari	0,00	4,10	17,00
Maret	0,00	4,20	15,00
April	0,00	4,60	16,00
Mei	0,00	5,70	15,00
Juni	0,00	6,00	17,00
Juli	00,0	7,20	18,00
Agustus	0,00	8,40	19,00
September	0,00	8,80	17,00
Oktober	0,00	7,60	19,00
November	0,00	4,40	13,00
Desember	0,00	4,30	12,00

BAB II

PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kabupaten Banggai berada di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten Banggai memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pemerintahan Kabupaten Banggai:

1. Struktur Pemerintahan Kabupaten Banggai

- Bupati: Kepala daerah yang memimpin Kabupaten Banggai dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati dipilih melalui pemilihan umum (Pilkada) dan memegang jabatan selama lima tahun.
- Wakil Bupati: Mendampingi bupati dan membantu tugas-tugas pemerintahan. Wakil Bupati juga dipilih melalui Pilkada.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai: Legislatif di tingkat kabupaten yang memiliki tugas untuk membuat peraturan daerah, mengawasi kinerja eksekutif, serta mewakili suara rakyat.

2. Kabupaten Banggai: Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Banggai terletak di bagian utara Sulawesi Tengah dan memiliki wilayah yang mencakup daratan dan lautan. Ibu kota Kabupaten Banggai adalah Luwuk. Kabupaten Banggai memiliki sejumlah kecamatan yang terbagi atas beberapa desa dan kelurahan.

3. Kecamatan di Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai terdiri dari beberapa kecamatan, di antaranya:

- Kecamatan Luwuk
- Kecamatan Luwuk Timur
- Kecamatan Batui

- Kecamatan Toili
- Kecamatan Kintom
- Dan lainnya

4. Pemerintahan Desa

Di tingkat yang lebih bawah, pemerintahan di desa atau kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) yang juga dipilih oleh warga setempat. Kepala desa memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi desa serta memberikan pelayanan publik.

5. Fokus Pembangunan

Pemerintahan Kabupaten Banggai memiliki fokus dalam beberapa sektor pembangunan, antara lain:

- Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan akses jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya.
- Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.
- Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata sebagai sektor unggulan di daerah tersebut.

6. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai

Visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai biasanya mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan publik. Setiap periode kepemimpinan bupati biasanya memiliki prioritas dan program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kebijakan atau program spesifik dari pemerintahan Kabupaten Banggai, Anda bisa merujuk ke situs web

resmi pemerintah kabupaten atau menghubungi instansi terkait di daerah tersebut.

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
	-Bagian Pemerintahan
	-Bagian Kesejahteraan Rakyat
	-Bagian Hukum
	-Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	-Bagian Administrasi Pembangunan
	-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	-Bagian Umum
	-Bagian Organisasi
	-Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Dinas Sosial
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
22	Dinas Koperasi dan UKM
23	Dinsa Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Ketahanan Pangan
25	Dinas Peternakan dan Hewan
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Badan Pendapatan Daerah
32	Badan Kesbang dan Politik
33	Badan Rumah Sakit Daerah
34	Satuan Polisi Pamong Praja
35	Satuan Pemadam Kebakaran

2.2 Sekretariat DPRD

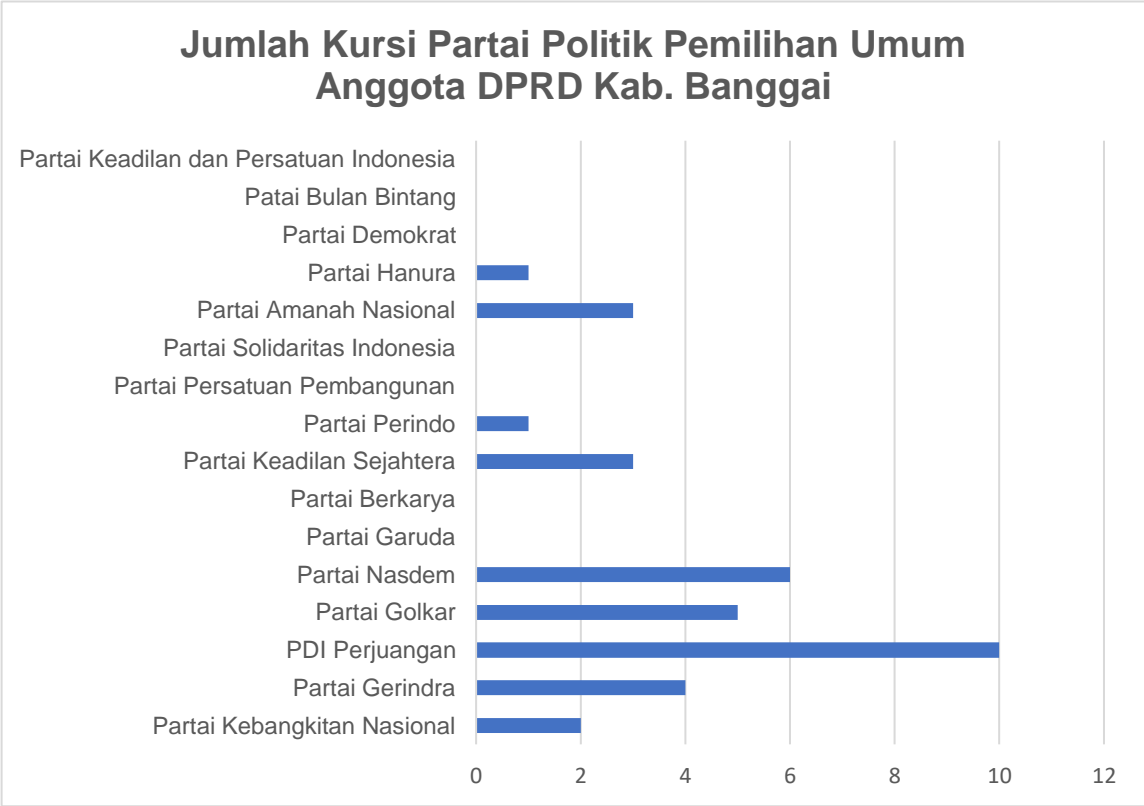
Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.2.1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Berdasarkan Fraksi di DPRD Kabupaten Banggai

No	Partai Politik	Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD
1	Partai Kebangkitan Nasional	2
2	Partai Gerindra	4
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	5
5	Partai Nasdem	6
6	Partai Garuda	0
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Perindo	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanah Nasional	3
13	Partai Hanura	1
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Bulan Bintang	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	Total	35

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Grafik 2.2.1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banggai Banggai



Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

2.3 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Fungsi utama instansi ini adalah memastikan pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung visi misi pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Banggai

1. Manajemen Kepegawaian:
 - Pengangkatan, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN.
 - Pengelolaan data dan dokumen kepegawaian.
 - Pelaksanaan penilaian kinerja ASN.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - Penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi ASN.
 - Pembinaan karier ASN untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai.
 - Fasilitasi pengembangan kepemimpinan ASN.
3. Kesejahteraan dan Disiplin ASN:
 - Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait hak-hak ASN, seperti gaji, tunjangan, dan pensiun.
 - Penerapan aturan disiplin untuk menjaga etika dan integritas ASN.
4. Perencanaan dan Pengawasan:
 - Penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai daerah.
 - Evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi di bidang kepegawaian.

5. Digitalisasi Administrasi Kepegawaian:

- Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
- Implementasi e-Government untuk mempermudah layanan kepegawaian berbasis digital.

Program dan Inisiatif Unggulan BKPSDM Kabupaten Banggai

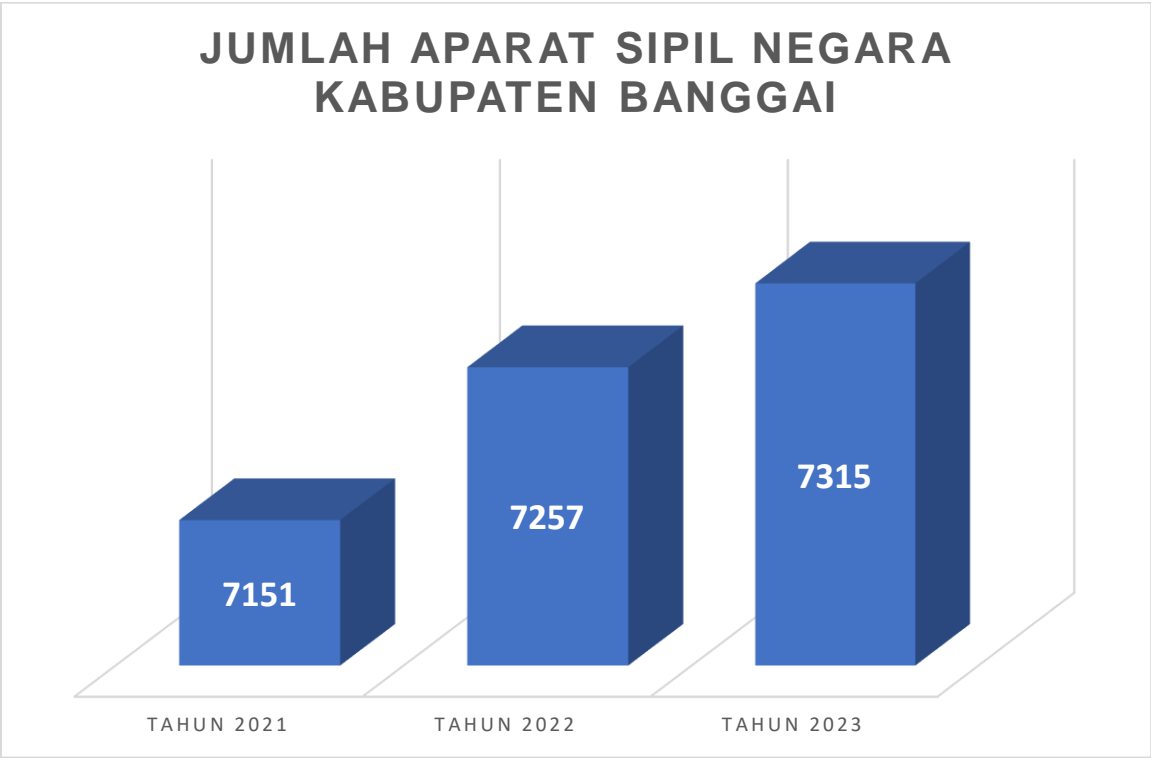
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Program pengembangan SDM melalui pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial bagi ASN di semua level.
- Layanan Kepegawaian Digital: Inovasi layanan berbasis teknologi, seperti e-kinerja, e-absensi, dan platform layanan lainnya untuk efisiensi manajemen ASN.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Memberikan pelatihan khusus untuk ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan publik.
- Penerapan Sistem Merit: Mendukung penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Tabel 2.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banggai

NO	Jumlah Aparat Sipil Negara	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Aparatur Sipil Negara	7151	7257	7315

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banggai



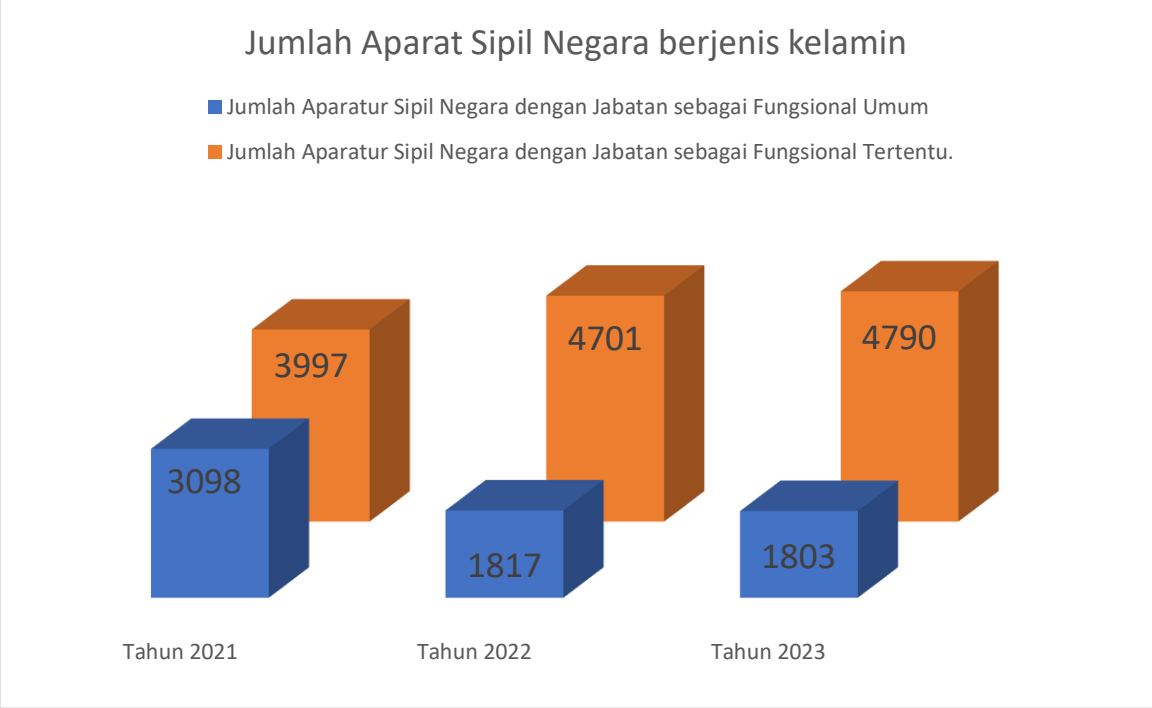
Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah ASN berjenis Kelamin Laki-laki	3227	3110	3096
2	Jumlah ASN berjenis Kelamin Perempuan	3924	4147	4219

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

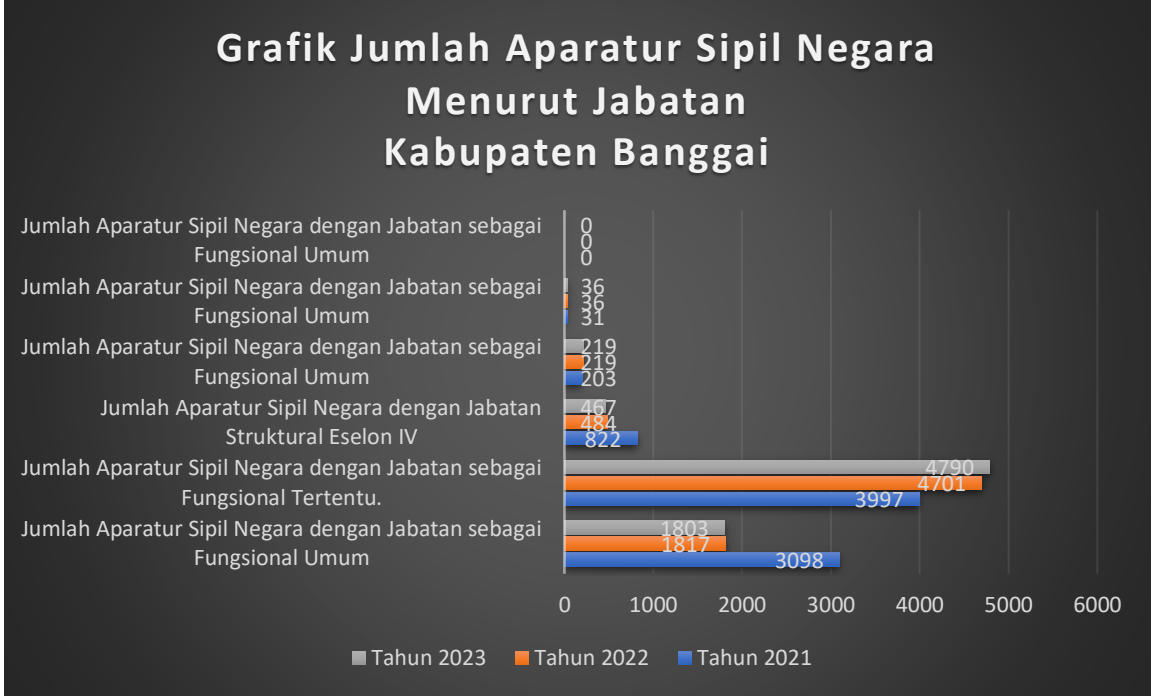


Tabel 2.3.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Kabupaten Banggai

No	Jumlah Aparatus Sipil Negara Menurut Jabatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum	3098	1817	1803
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu.	3997	4701	4790
3	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural Eselon IV	822	484	467
4	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum	203	219	219
5	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum	31	36	36
Jumlah		8151	7257	7315

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Kabupaten Banggai



Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banggai

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat	15	9	9	Orang
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat	38	26	29	Orang

3	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat	1437	1247	1223	Orang
4	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir D.III	1058	984	1020	Orang
5	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata - 1/D.IV	4332	4719	4732	Orang
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata -2	277	267	296	Orang
7	Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata -3	5	5	6	Orang

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan Kabupaten Banggai

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda	5	5	5	Orang
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I	3	3	2	Orang
3	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru	16	12	13	Orang
4	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I	16	12	6	Orang
5	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda	4332	4719	4732	Orang
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda Tingkat I	292	218	162	Orang
7	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur	344	243	273	Orang
8	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Tingkat I	578	578	505	Orang

9	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda	833	709	735	Orang
10	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda Tingkat I	1022	1041	956	Orang
11	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata	1064	1054	1095	Orang
12	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Tingkat I	1090	1232	1280	Orang
13	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina	974	882	867	Orang
14	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I	702	717	725	Orang
15	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda	52	54	61	Orang
16	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda	2	4	4	Orang
17	Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan VII (PPPK)	-	34	34	Orang
18	Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan IX (PPPK)	-	425	106	Orang
19	Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan X (PPPK)	-	-	17	Orang

Sumber : BKPSDM, 2023

2.4 Kesatuan Bangsa dan Politik

Syarifudin Muid, SH selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Banggai dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran Kesbangpol dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan Ormas dan Media di wilayah tersebut.

Menurut beberapa Oknum telah menyalagunakan Lembaga mereka dengan dalih melakukan intimidasi, sehingga Langkah penertiban harus segera dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Langkah-langkah kami ambil adalah menertibkan baik LSM maupun Media yang ada. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengantisipasi penyalagunaan wewenang oleh oknum-oknum tersebut.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Menurutnya kegiatan seperti ini merupakan rutinitas yang harus terus dilakukan oleh Kesbangpol kabupaten Banggai.

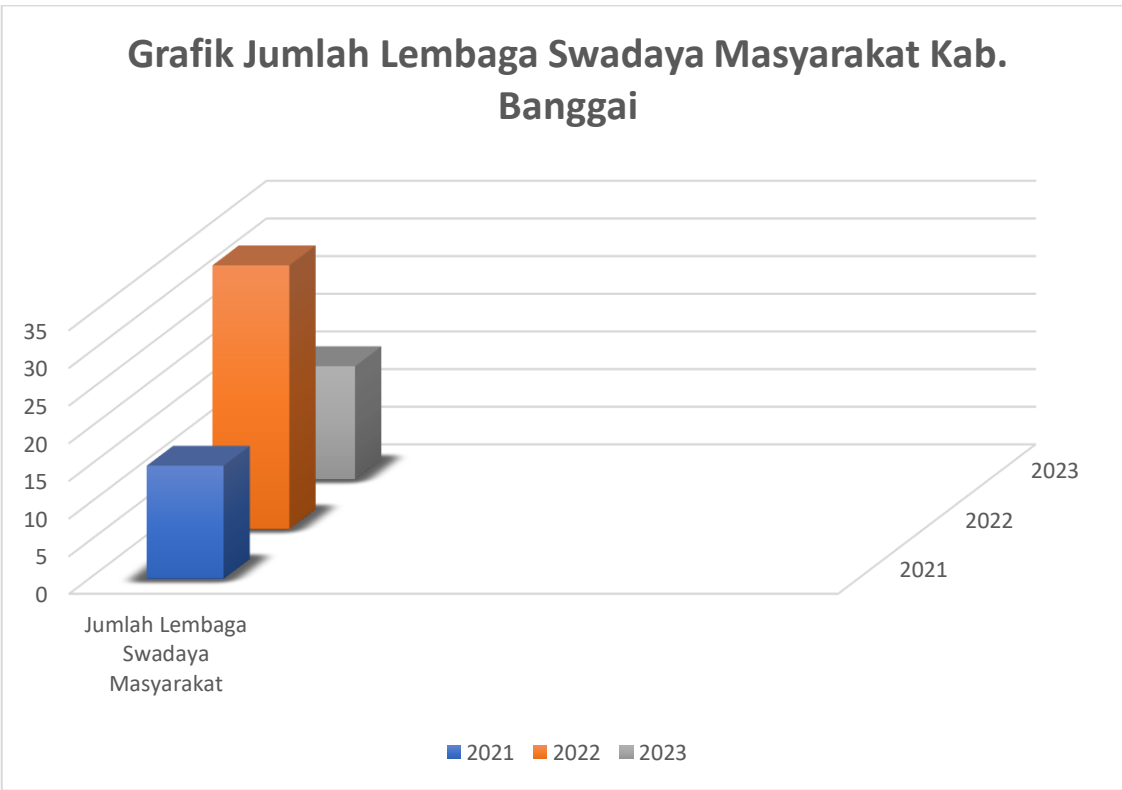
Kesbangpol diharapkan dapat terus menjadi fasilitator dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan daerah dengan LSM dan Media. Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan LSM dan media di kabupaten banggai kami ingin memastikan bahwa semua pihak menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada

Tabel 2.4.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Banggai

NO	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kab. Banggai	15	35	15	LSM

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.4.2 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Banggai



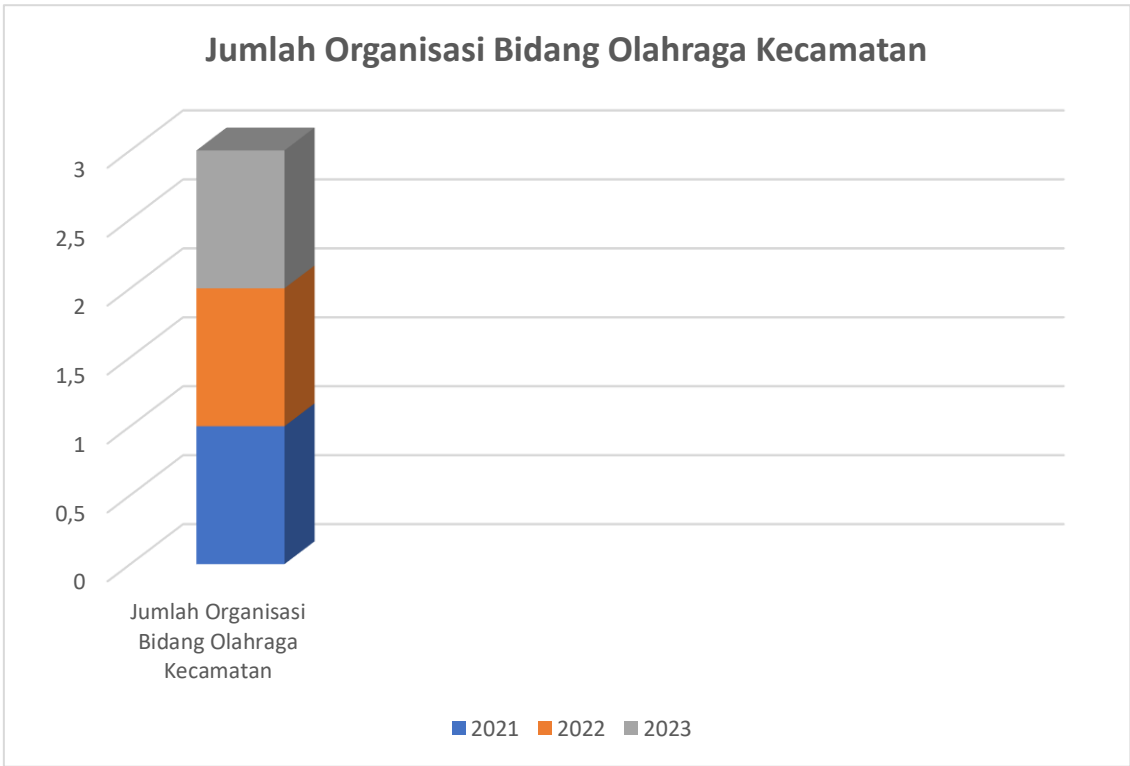
Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.4.3 Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan di Kabupaten Banggai.

NO	Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan Kab. Banggai	1	1	1	Kelompok

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.4.4 Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BKPSDM, 2023

2.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai dalam awal sejarahnya dimulaidengan berdirinya Kantor Catatan Sipil pada tahun 1983 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 1983 yang kemudian setelah bergulirnya waktu serta tuntutan beban kerja, maka pada tahun 1998 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor

150 tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, Kantor Catatan Sipil berubah bentuk menjadi sebuah dinas yang dinamakan Dinas

Pendaftaran Penduduk.

Ditahun 2001 sampai dengan 2005 karena berlakunya otonomi daerah maka Dinas Pendaftaran Penduduk berubah namanya kembali menjadi Dinas Kependudukan dan ditahun 2005 sampai dengan 2007 atas berubahnya atas berubahnya peraturan tentang organisasi dan perangkat daerah maka Dinas Kependudukan berubah menjadi sebuah badan yang dinamakan Badan

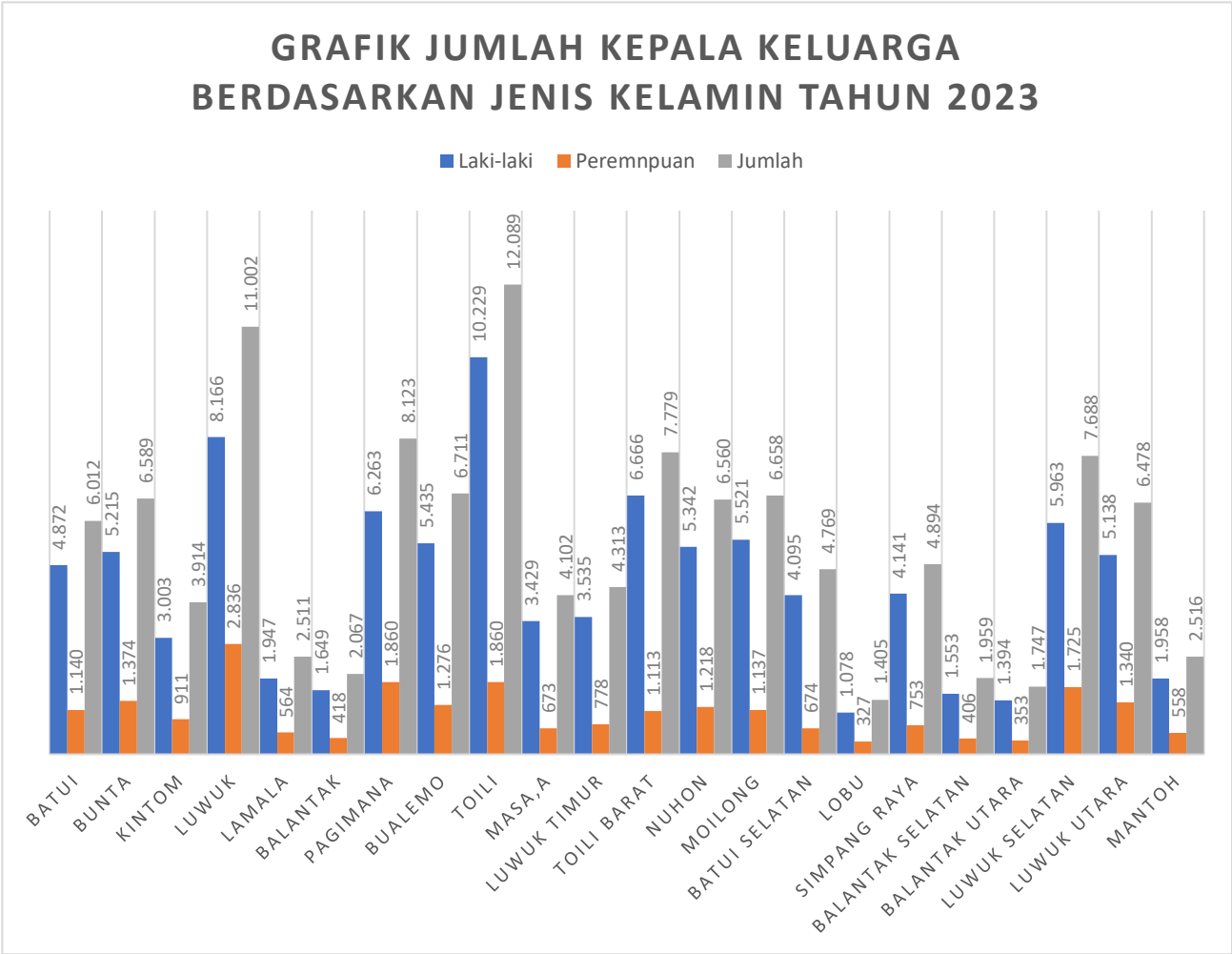
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana namun karena terdapat pemisahan antara administrasi kependudukan dan administrasi keluarga berencana dan urusan wanita yang menjadi sebuah organisasi pemerintah mandiri sehingga pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dirubah bentuknya menjadi sebuah Dinas yang dinamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Tabel 2.5.1 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	Kode Wilayah	Kecamatan	Kepala Keluarga		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	720101	Batui	4.872	1.140	6.012
2	720102	Bunta	5.215	1.374	6.589
3	720103	Kintom	3.003	911	3.914
4	720104	Luwuk	8.166	2.836	11.002
5	720105	Lamala	1.947	564	2.511
6	720106	Balantak	1.649	418	2.067
7	720107	Pagimana	6.263	1.860	8.123
8	720108	Bualemo	5.435	1.276	6.711
9	720109	Toili	10.229	1.860	12.089
10	720110	Masa,a	3.429	673	4.102
11	720111	Luwuk Timur	3.535	778	4.313
12	720112	Toili Barat	6.666	1.113	7.779
13	720113	Nuhon	5.342	1.218	6.560
14	720114	Moilong	5.521	1.137	6.658
15	720115	Batui Selatan	4.095	674	4.769
16	720116	Lobu	1.078	327	1.405
17	720117	Simpang Raya	4.141	753	4.894
18	720118	Balantak Selatan	1.553	406	1.959
19	720119	Balantak Utara	1.394	353	1.747
20	720120	Luwuk Selatan	5.963	1.725	7.688
21	720121	Luwuk Utara	5.138	1.340	6.478
22	720122	Mantoh	1.958	558	2.516
23	720123	Nambo	2.294	774	3.068
		Total	98.886	24.068	122.954

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.2 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



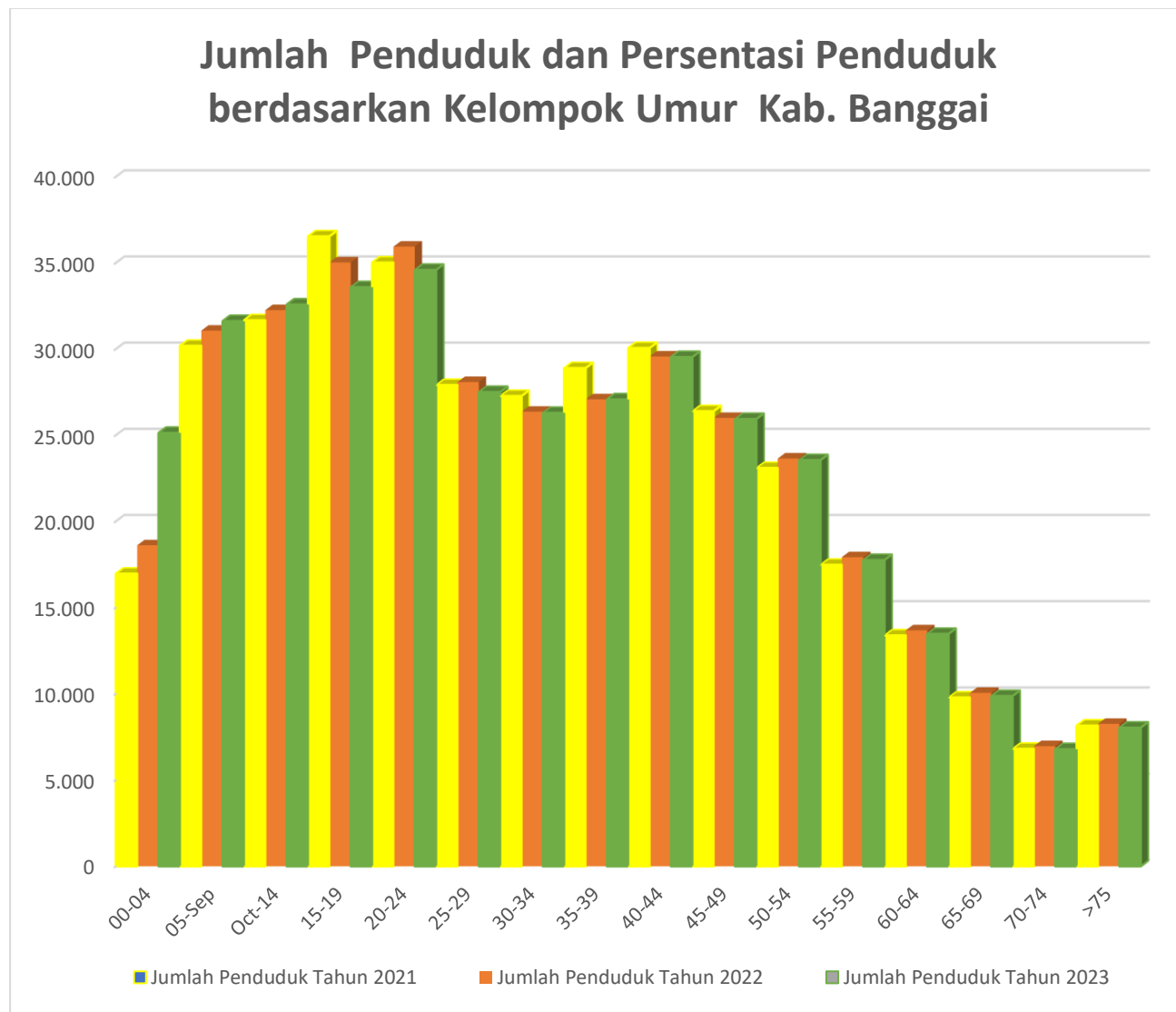
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.3 Jumlah Penduduk dan Persentasi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kab. Banggai

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2023
1	00-04	16.963	18.610	25.131
2	05-09	30.184	31.067	31.622
3	10-14	31.668	32.259	32.583
4	15-19	36.540	35.027	33.589
5	20-24	35.019	35.943	34.592
6	25-29	27.908	28.083	27.505
7	30-34	27.272	26.362	26.294
8	35-39	28.892	27.079	27.072
9	40-44	30.057	29.565	29.533
10	45-49	26.391	26.001	25.938
11	50-54	23.093	23.643	23.549
12	55-59	17.480	17.918	17.756
13	60-64	13.384	13.681	13.471
14	65-69	9.787	10.054	9.871
15	70-74	6.810	6.967	6.793
16	>75	8.155	8.259	8.037
	Jumlah	369.603	370.518	373.336

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.4 Jumlah Penduduk dan Persentasi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kab. Banggai



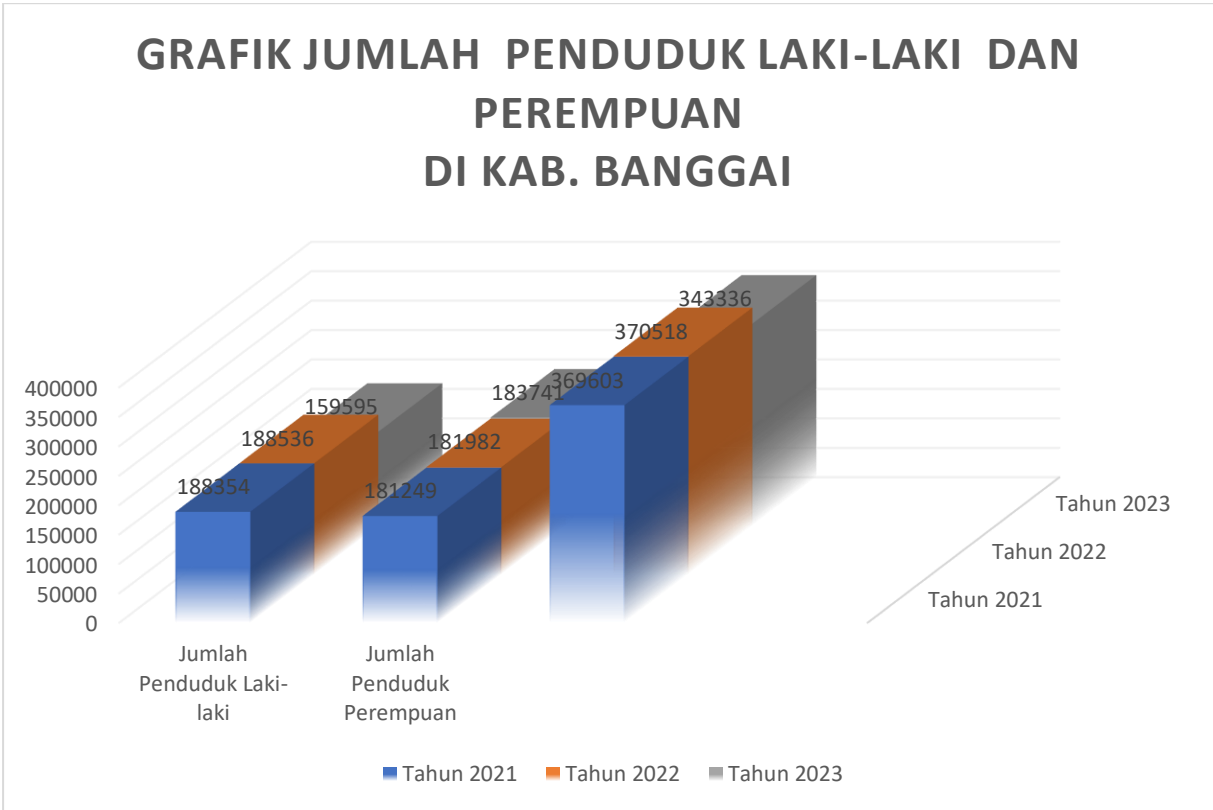
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.5 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kab. Banggai

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2021	Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2022	Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2023
1	Jumlah Penduduk Laki-laki	188354	188536	189595
2	Jumlah Penduduk Perempuan	181249	181982	183741
	Jumlah	369603	370518	373336

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.6 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kab. Banggai



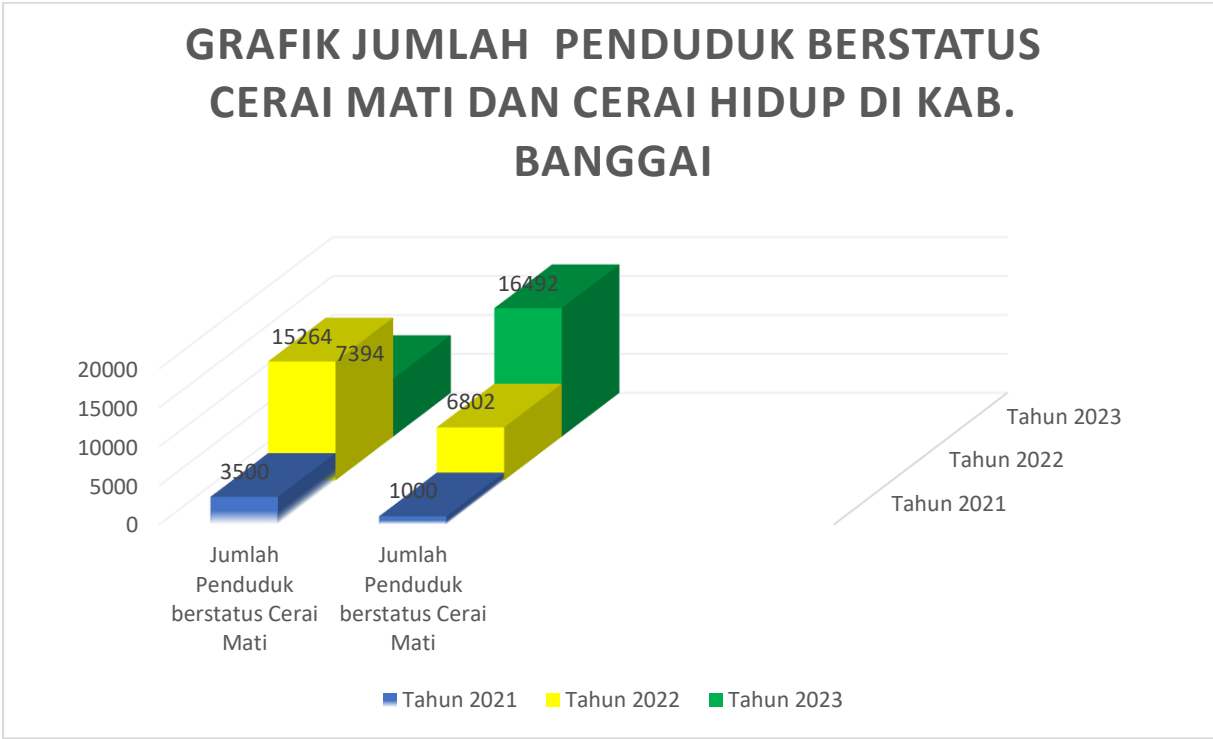
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.7 Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati dan Cerai Hidup di Kab. Banggai

No	Jumlah Penduduk Berstatus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati	3500	15264	7394
2	Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati	1000	6802	16492
	Jumlah			

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.8 Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati dan Cerai Hidup di Kab. Banggai



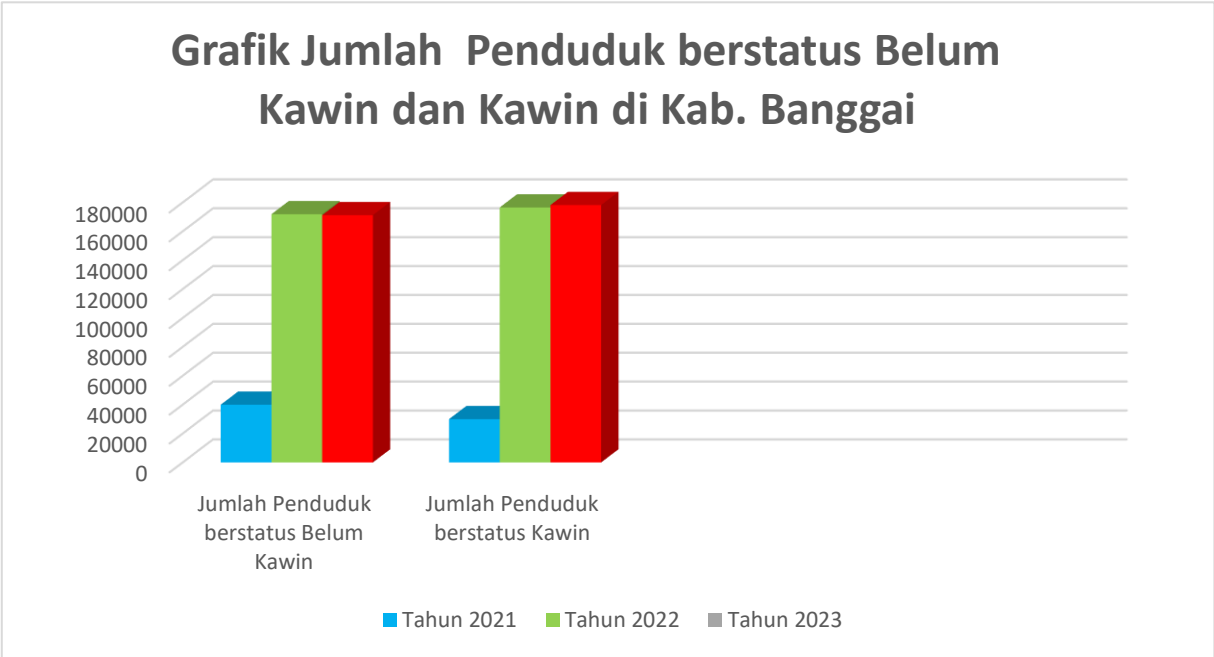
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.9 Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin dan Kawin di Kab. Banggai

No	Jumlah Penduduk Berstatus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin	40000	171890	171223
2	Jumlah Penduduk berstatus Kawin	30000	176562	178224
	Jumlah	70000	348452	349447

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.10 Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin dan Kawin di Kab. Banggai



Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.6 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai adalah salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aspek terkait komunikasi publik, teknologi informasi, statistik, serta persandian. Dinas ini berfungsi untuk mendukung efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan tepat guna.

Tugas dan Fungsi Dinas Kominfostandi Kabupaten Banggai

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banggai memiliki beberapa tugas dan fungsi utama yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi publik, statistik, informasi, serta keamanan data dan informasi.

Berikut adalah tugas dan fungsi utama dari dinas ini:

1. Bidang Komunikasi Publik

Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Banggai dapat diterima dengan jelas dan tepat oleh masyarakat. Beberapa tugas dalam bidang komunikasi publik antara lain:

- **Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik:** Dinas Kominfostandi bertugas untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan kegiatan pemerintahan disebarluaskan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak informasi yang layak sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

- **Penyebarluasan Informasi:** Melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa (televisi, radio, surat kabar), media sosial, dan situs web resmi pemerintah daerah, Dinas Kominfostandi menyebarkan informasi penting kepada publik.
- **Pengelolaan Media Sosial Pemerintah:** Dinas ini mengelola akun-akun media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai, yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan informasi terkini.
- **Penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi Sosial:** Meningkatkan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan komunikasi sosial, seperti seminar, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan pelatihan komunikasi publik.

2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Beberapa tugas di bidang ini antara lain:

- **Pengembangan Infrastruktur TIK:** Dinas Kominfostandi berperan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK di Kabupaten Banggai, termasuk jaringan internet, pusat data, dan sistem informasi pemerintahan.
- **Sistem Informasi Pemerintahan:** Dinas ini bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pemerintahan.

- E-Government: Implementasi teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, dan lain-lain.
- Pelatihan Teknologi Informasi: Dinas ini juga melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan aparatur pemerintah Kabupaten Banggai dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik.

3. Bidang Statistik

Bidang statistik bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Beberapa tugas di bidang statistik antara lain:

- Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik: Dinas ini mengumpulkan data dari berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai.
- Survei dan Penelitian: Melakukan survei atau penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Banggai.
- Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah: Menyusun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di Kabupaten Banggai, yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan pemerintah.

- Sosialisasi Penggunaan Data Statistik: Mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya data statistik dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

4. Bidang Persandian

Bidang persandian bertugas untuk mengelola dan menjaga keamanan informasi yang bersifat rahasia dan penting bagi pemerintahan Kabupaten Banggai. Beberapa tugas dalam bidang ini antara lain:

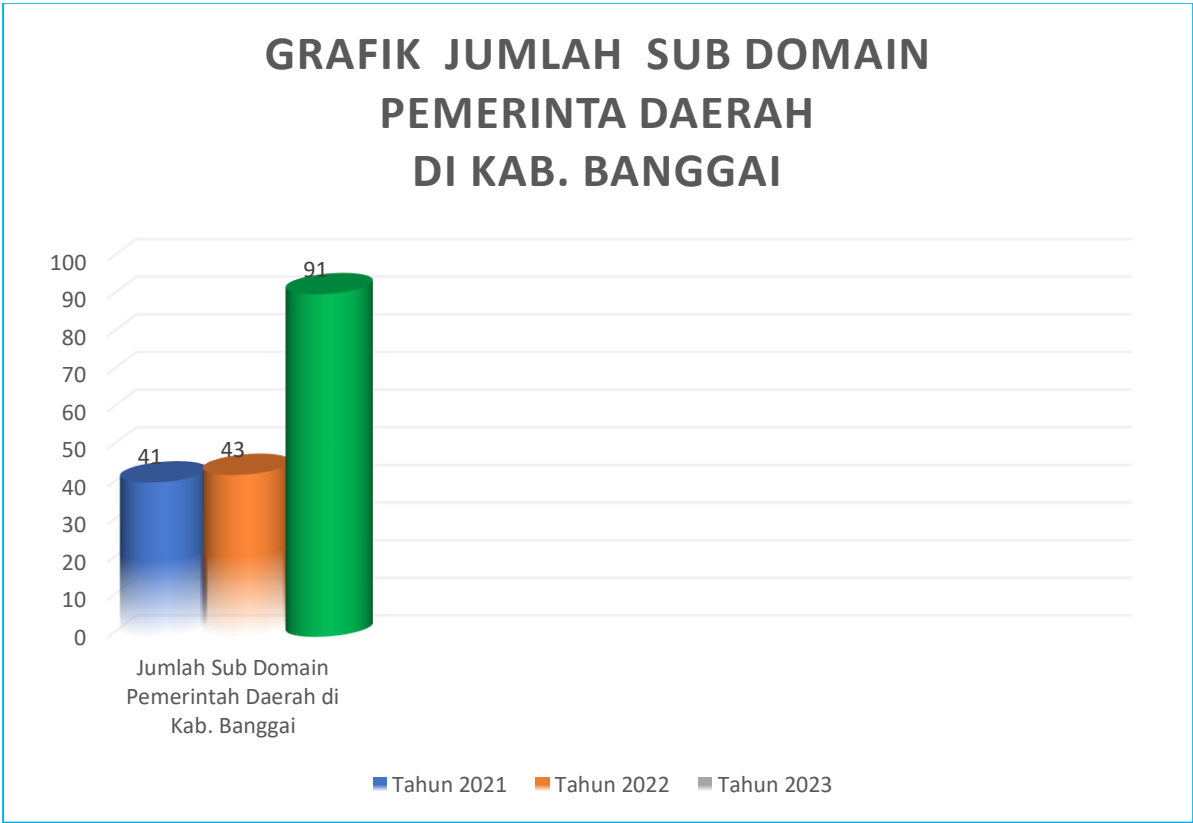
- Pengamanan Informasi Elektronik: Dinas Kominfo memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah aman dari ancaman peretasan atau kebocoran data.
- Penyandian dan Dekripsi: Melakukan penyandian informasi yang bersifat rahasia dan penting agar tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Begitu juga dengan kegiatan dekripsi informasi yang telah disandikan.
- Pelatihan Keamanan Informasi: Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah mengenai cara mengamankan data dan informasi, serta cara-cara menghadapi ancaman dunia maya (cybersecurity).
- Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi: Mengembangkan dan menyusun kebijakan serta prosedur mengenai persandian dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banggai

Tabel 2.6.1 Jumlah Sub Domain Pemerinta Daerah Bidang E-Gov di Kab. Banggai

No	Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	41	43	91

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.2 Jumlah Sub Domain Pemerinta Daerah Bidang E-Gov di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.3 Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai

No	Tabel Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai	Tahun 2023
1.	Jumlah Konten Digital Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	3000
2.	Jumlah Konten Teks (Penulis Berita) Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	100
3.	Jumlah Konten Grafis (Karya Visual) Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	100
4.	Jumlah Konten Audio Video Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	300
5.	Jumlah Konten Audio Pemerintah Daerah di Kab. Banggai	100

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.4 Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.5 Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang Persandian DKISP di Kab. Banggai

No	Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai	Tahun 2023
1.	Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai	22
	Jumlah	

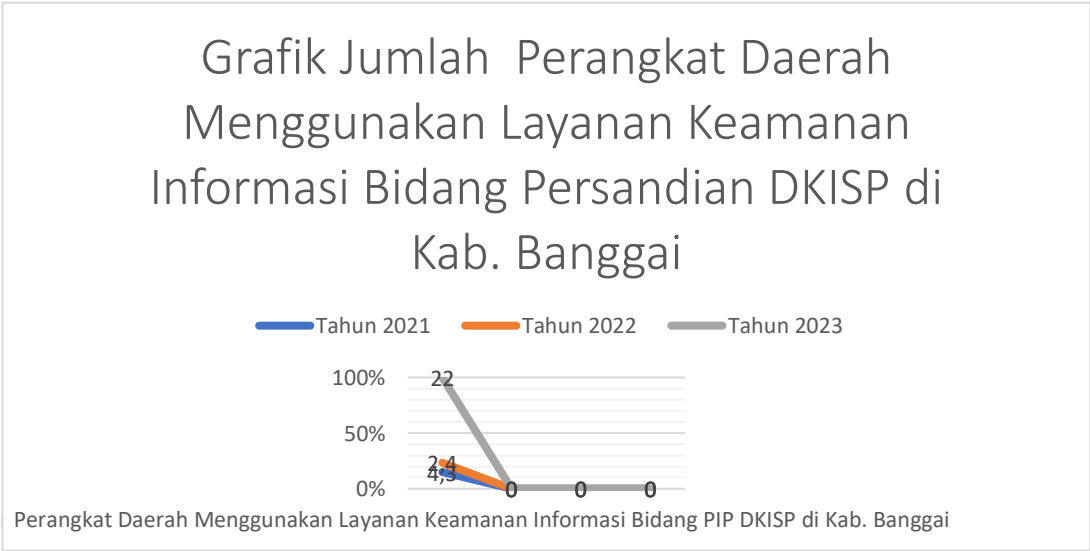
Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.6 Jumlah Tower (Bidang TIK) di Kab. Banggai

No	Jumlah Tower Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Tower Kab. Banggai	101	122	198
	Jumlah			

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.7 Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang Persandian DKISP di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.8 Jumlah Tower (Bidang TIK) di Kab. Banggai



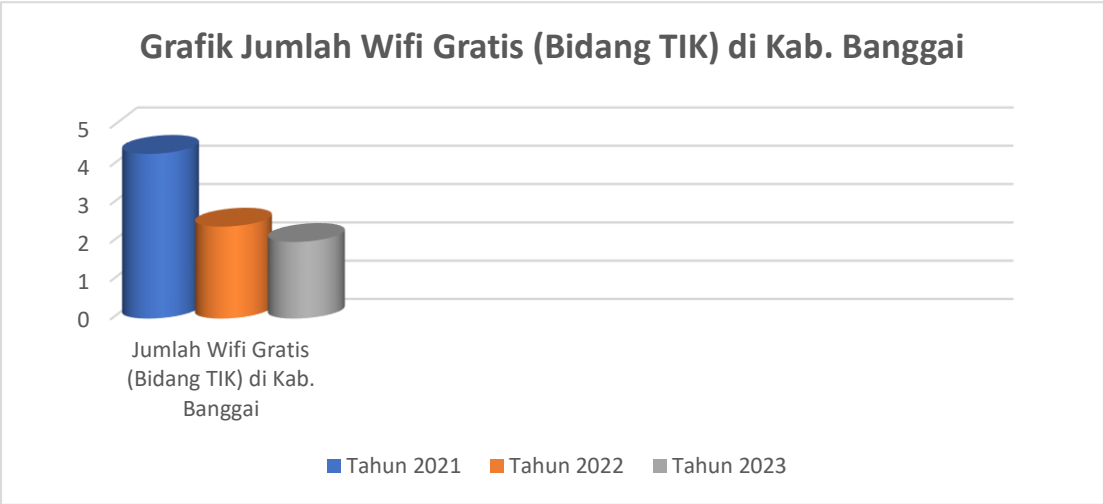
Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.9 Jumlah Wifi Gratis (Bidang TIK) di Kab. Banggai

No	Jumlah Wifi Gratis Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Wifi Gratis Kab. Banggai		10	19
	Jumlah			

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.10 Jumlah Wifi Gratis (Bidang TIK) di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.9 Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai

No	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai	Tahun 2023
1.	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai	2
	Jumlah	2

Sumber : DKISP, 2023

2.7 Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Banggai adalah lembaga pengawasan internal pemerintah di tingkat Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di daerah tersebut, guna memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat juga memiliki fungsi untuk melaksanakan audit, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap keuangan serta kinerja aparat pemerintah daerah, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Beberapa tugas dan fungsi utama Inspektorat Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.
2. Audit terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.
3. Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan daerah.
4. Pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Banggai agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyuluhan kepada perangkat daerah mengenai tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Banggai juga berfungsi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

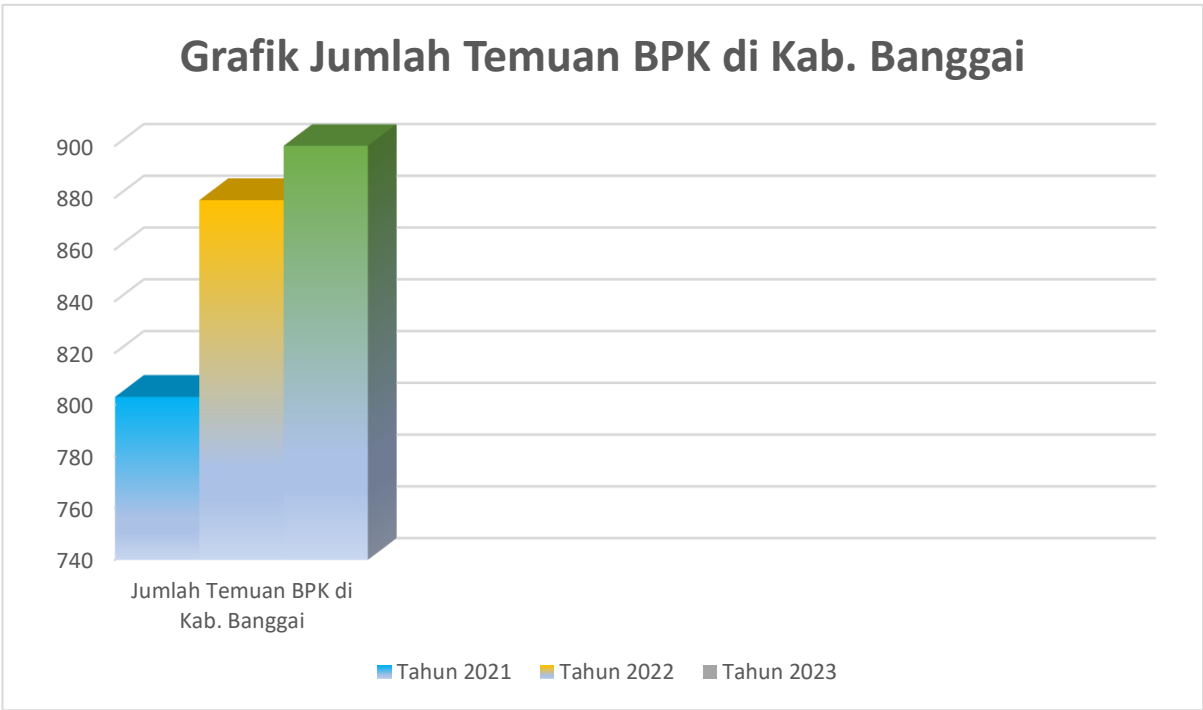
Untuk informasi lebih lanjut tentang Inspektorat Kabupaten Banggai, Anda bisa mengunjungi situs web resmi pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi langsung kantor Inspektorat setempat.

Tabel 2.7.1 Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai

No	Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai	803	879	900
	Jumlah	803	879	900

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.7.2 Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.7.1 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai

No	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai	6.89 %	3.44 %	1.75 %
	Jumlah	6.89 %	3.44 %	1.75 %

Sumber : DKISP, 2023

2.8 Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dua aspek penting dalam pengelolaan dan pembangunan suatu wilayah. Kedua aspek ini saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah merujuk pada proses yang sistematis dalam merancang dan mengembangkan wilayah suatu daerah. Proses ini mencakup identifikasi masalah, penentuan prioritas, penentuan sasaran, dan perumusan strategi serta kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Beberapa komponen utama dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - Visi dan Misi Daerah: Menentukan arah pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.
 - Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, atau infrastruktur yang kurang memadai.
 - Perencanaan Sumber Daya: Mengelola dan mengalokasikan sumber daya (manusia, keuangan, alam) secara efisien untuk mendukung pembangunan daerah.

- **Perencanaan Infrastruktur:** Menyusun rencana pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
- **Partisipasi Masyarakat:** Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.
- **Kebijakan dan Regulasi:** Menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- **Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):** RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat sasaran, prioritas pembangunan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Contoh implementasi perencanaan pembangunan daerah:

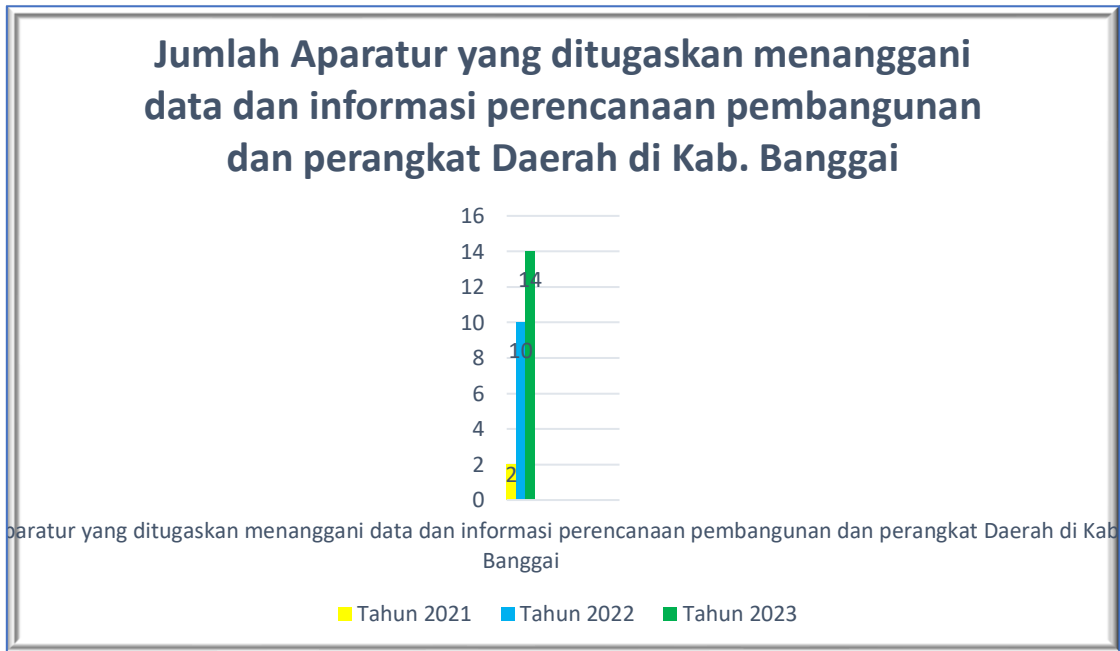
- Pembangunan sektor pariwisata di daerah yang memiliki potensi alam.
- Perbaikan sistem transportasi umum di kota besar untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas.
- Pembangunan daerah pinggiran untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tabel 2.8.1 Jumlah Aparatur yang ditugaskan menangani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai

No	Jumlah Aparatur yang ditugaskan menangani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Aparatur yang ditugaskan menangani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai	2	10	14
	Jumlah	2	10	14

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.2 Jumlah Aparatur yang ditugaskan menangani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai



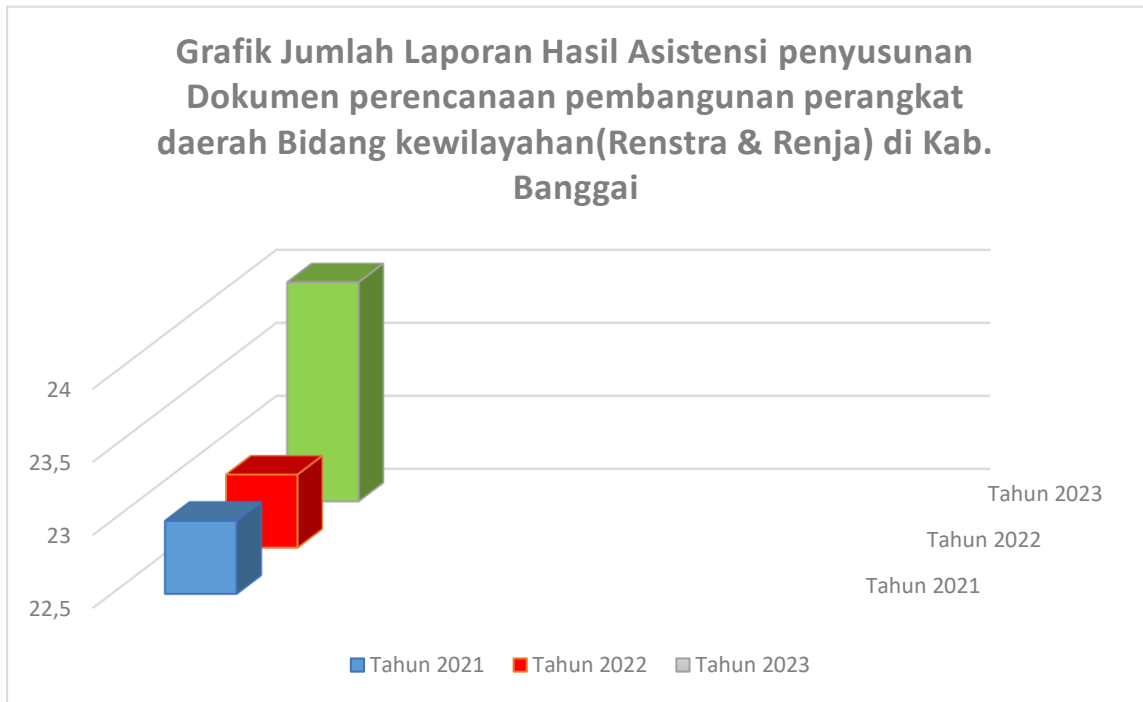
Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.3 Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai

No	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan (Renstra & Renja) di Kab. Banggai	23	23	24
	Jumlah	23	23	24

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai



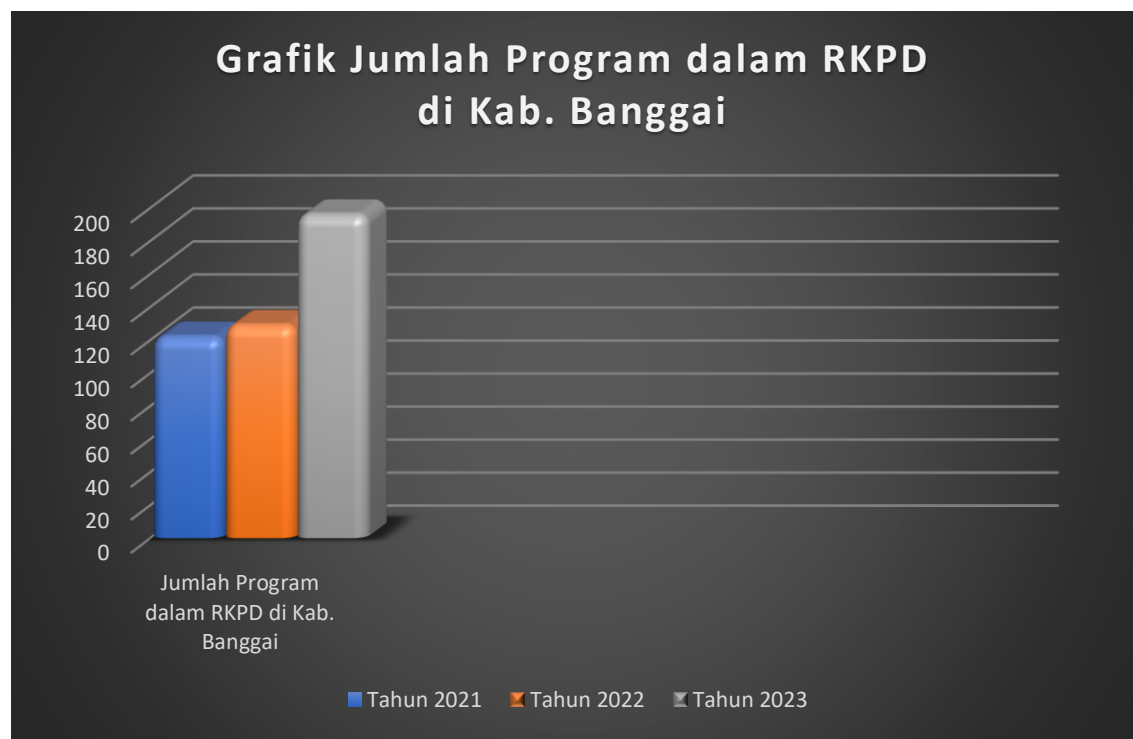
Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.5 Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai

No	Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai	122	129	196
	Jumlah	122	129	196

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.6 Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai



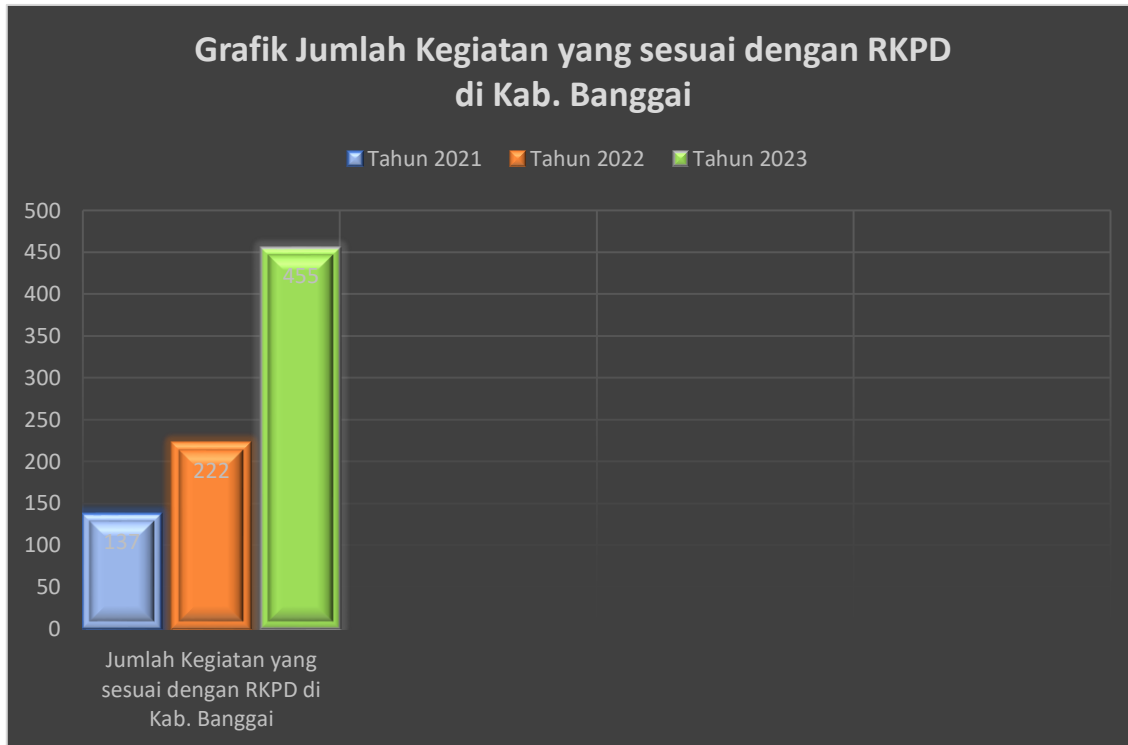
Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.7 Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai

No	Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai	137	222	455
	Jumlah	137	222	455

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.8 Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai



Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

2.9 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan dan aset milik pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang ada di pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah mencakup semua kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pengelolaan aset daerah yang baik sangat penting untuk menjaga agar aset tersebut dapat digunakan secara maksimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.

3. Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan asetnya harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, antara lain:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yang juga berlaku untuk daerah.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur tentang pembagian dana antara pusat dan daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan pedoman teknis bagi pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah, yang mengatur pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

4. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Pengelolaan keuangan dan aset daerah membutuhkan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang akuntansi dan manajemen aset.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Aset: Kasus penyalahgunaan keuangan dan aset sering terjadi, yang merugikan daerah dan masyarakat.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Meski banyak daerah telah menerapkan sistem transparansi, namun masih ada beberapa daerah yang menghadapi masalah dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik.
- Keterbatasan Dana: Daerah-daerah tertentu, terutama daerah dengan anggaran terbatas, sering kali kesulitan dalam mengelola keuangan dan aset secara optimal

5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

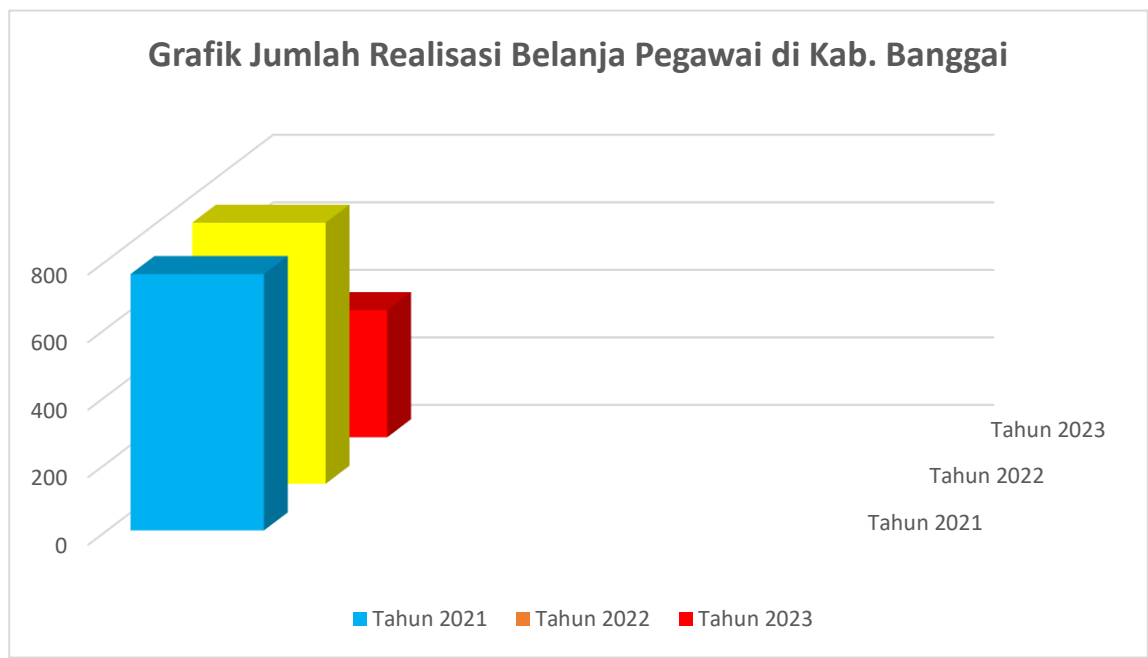
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah agar memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola keuangan dan aset daerah.
- Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKAD): Menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan dan aset.
- Peningkatan Pengawasan: Memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan aset.
- Meningkatkan Transparansi: Menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat secara terbuka.

Tabel 2.9.1 Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai

No	Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai	758,9456	773,1879	376,3902
	Jumlah	758,9456	773,1879	376,3902

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.2 Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai



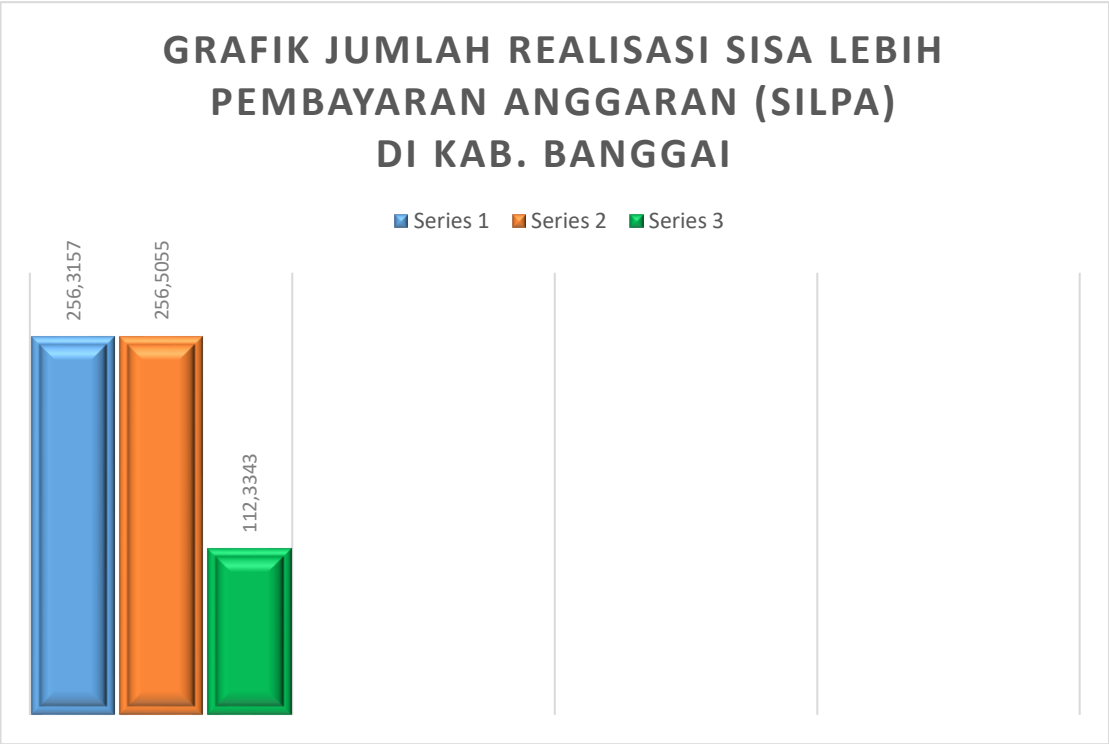
Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.3 Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai

No	Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai	256,3157	256,5055	112,3343
	Jumlah	256,3157	256,5055	112,3343

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.4 Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai



Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.5 Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai

No	Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai	627,1869	745,5942	228,4262
	Jumlah	627,1869	745,5942	228,4262

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.6 Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai



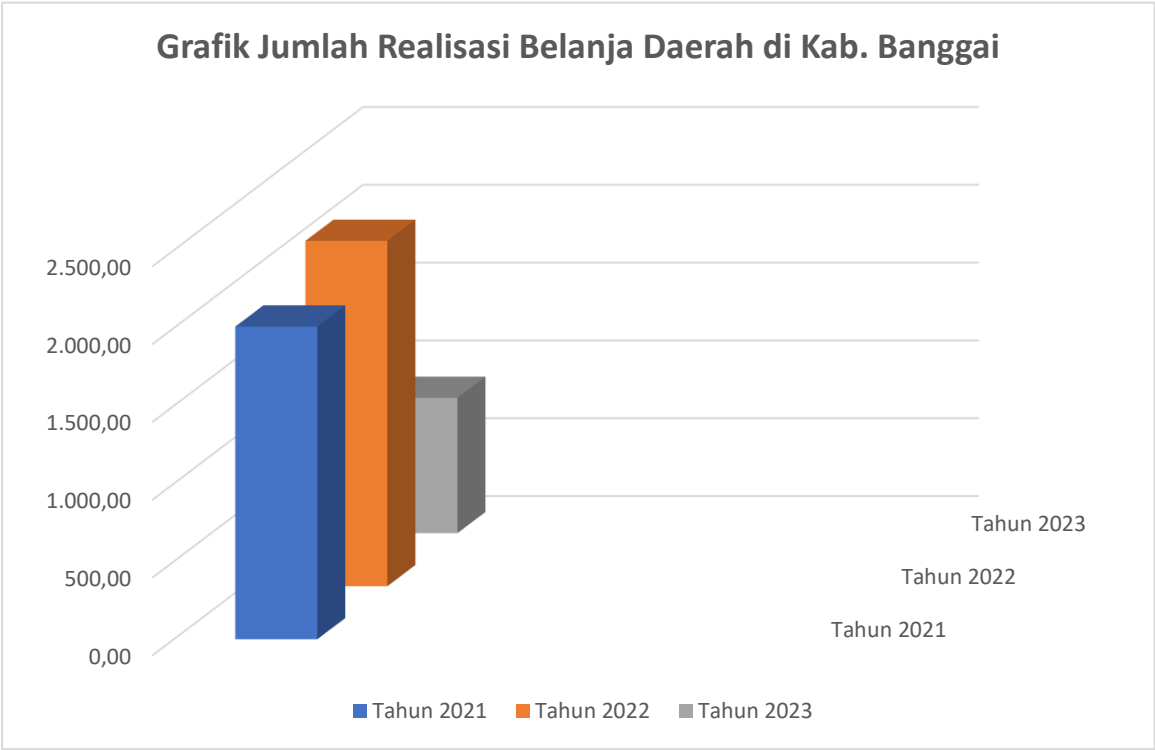
Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.7 Jumlah Realisasi Belanja Daerah di Kab. Banggai

No	Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai	2.009,0707	2.218,8672	869,5131
	Jumlah	2.009,0707	2.218,8672	869,5131

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.8 Jumlah Realisasi Belanja Daerah di Kab. Banggai



Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

2.10 Riset dan Inovasi Daerah

Riset dan Inovasi Daerah memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan daerah, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, sektor ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Melalui riset dan inovasi, daerah dapat menemukan solusi baru untuk masalah yang ada dan menciptakan peluang baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

1. Riset Daerah (Research and Development/R&D)

Riset daerah mencakup berbagai aktivitas penelitian yang bertujuan untuk memahami potensi, permasalahan, dan peluang yang ada di suatu daerah serta untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat diterapkan di daerah tersebut. Riset ini dapat bersifat fundamental, terapan, atau pengembangan teknologi, dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, serta sektor swasta.

Tujuan Riset Daerah:

- **Memahami Potensi Daerah:** Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya.
- **Menyelesaikan Masalah Lokal:** Riset daerah sering difokuskan pada pemecahan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat

setempat, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan permasalahan lingkungan.

- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Riset juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.
- Mendorong Kebijakan yang Berbasis Bukti: Menghasilkan data dan informasi yang dapat mendasari pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah berhubungan dengan penciptaan dan penerapan ide, produk, proses, atau teknologi baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Inovasi ini dapat mencakup banyak aspek, mulai dari inovasi di bidang teknologi, produk, jasa, hingga inovasi sosial yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan Inovasi Daerah:

- Meningkatkan Daya Saing Daerah: Inovasi yang berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah, baik dalam konteks ekonomi lokal maupun daya tariknya sebagai destinasi investasi.
- Mempercepat Pembangunan Daerah: Inovasi dapat membantu mempercepat proses pembangunan daerah dengan cara menciptakan solusi yang lebih efisien, murah, dan mudah diterapkan.

- Mengurangi Kesenjangan Pembangunan: Inovasi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, baik dalam skala regional maupun antara kota dan desa.
- Memberdayakan Masyarakat: Melalui inovasi sosial, masyarakat dapat diberdayakan untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi kebutuhan lokal, seperti menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi permasalahan sosial, atau memperbaiki kualitas hidup.

BAB III

PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, moralitas yang luhur, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

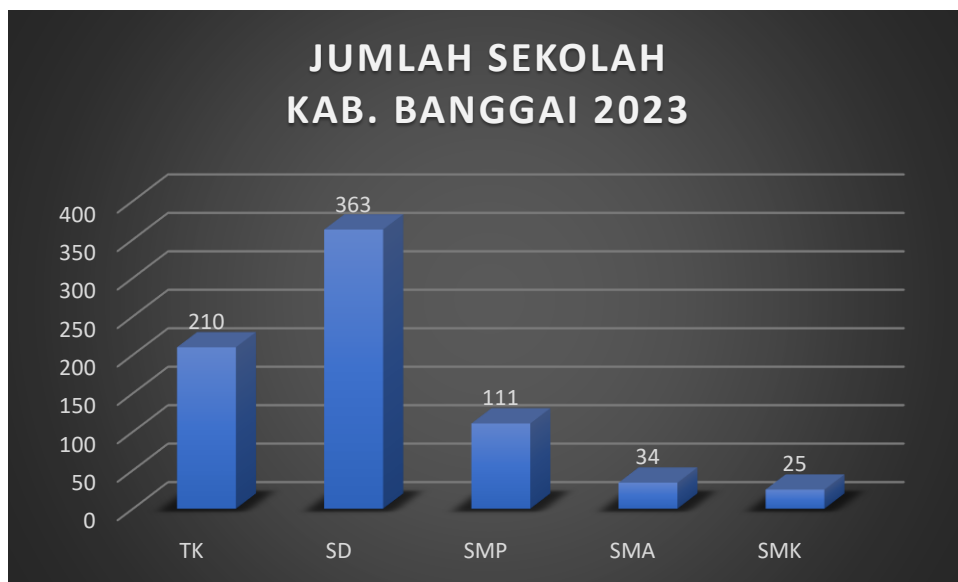
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terhubung dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa Indonesia, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utamanya adalah agar potensi peserta didik berkembang, sehingga mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan prioritas nasional, terlebih lagi dengan adanya peraturan alokasi minimal 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, inovasi-inovasi bidang pendidikan sangat diperlukan agar alokasi APBD sebesar 20% dapat menghasilkan SDM yang cerdas dan berdaya saing. Kewajiban alokasi dianggap salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan pendidikan, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta partisipasi sekolah.

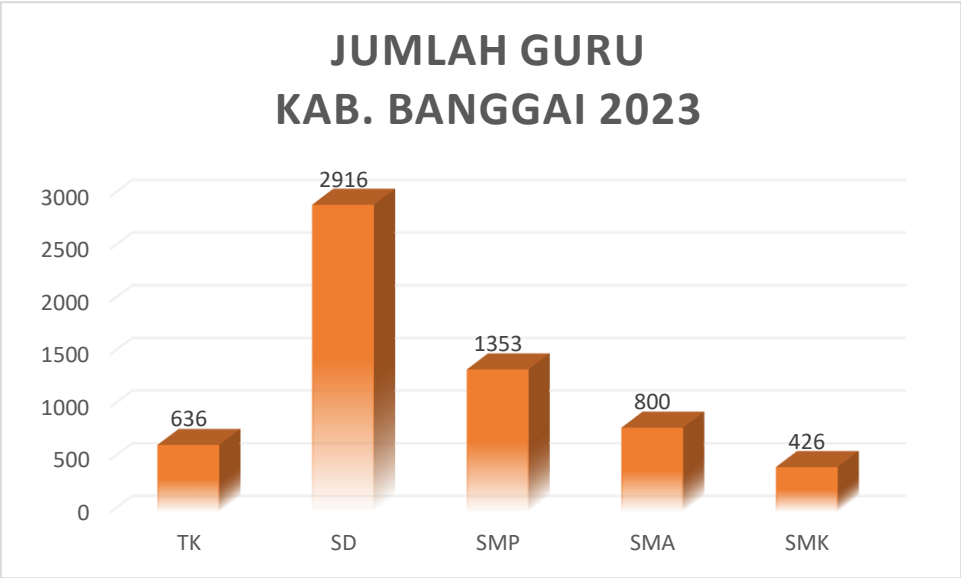
Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidik (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai, Berikut merupakan data jumlah sekolah, guru dan siswa di Kab.Banggai.

Gambar 3.1.1 Jumlah Sekolah Kab.Banggai 2023



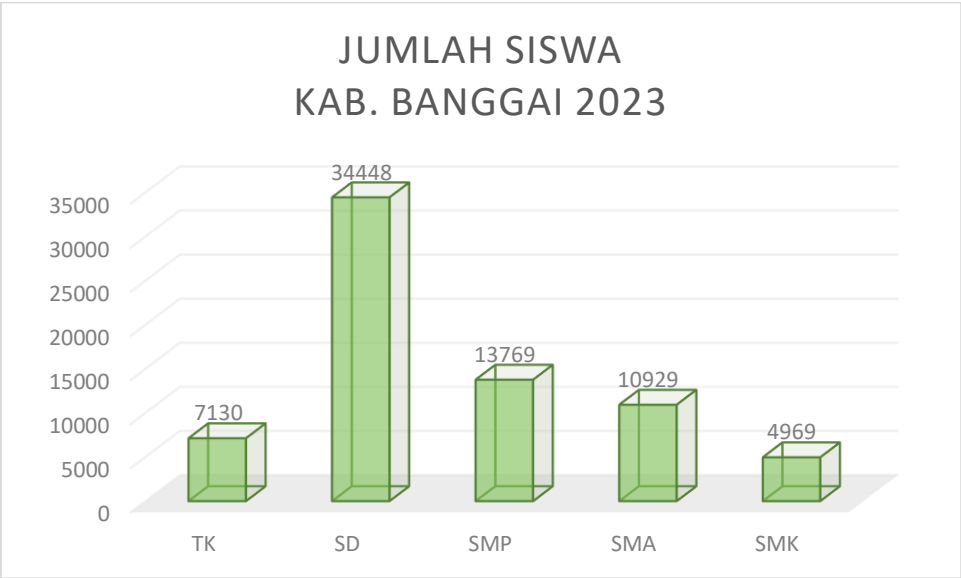
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.2 Jumlah Guru Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.3 Jumlah Siswa Kab.Banggai 2023



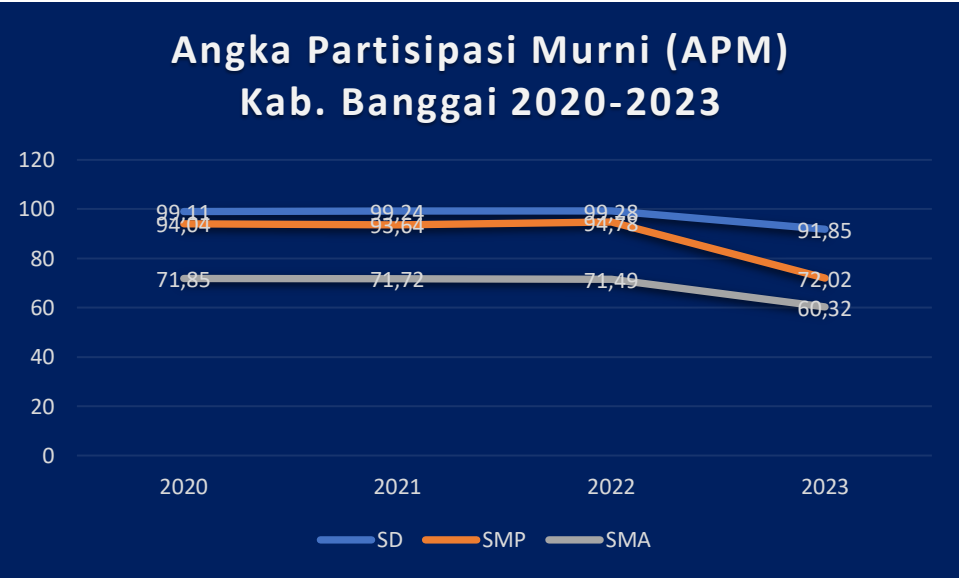
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Banggai 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Gambar 3.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab.Banggai 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Tabel 3.1.1 Jumlah Sekolah TK di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Taman Kanak-Kanak (TK)		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kec. Luwuk	2	21	23
2	Kec. Toili	0	26	26
3	Kec. Pagimana	1	9	10
4	Kec. Bualemo	0	9	9
5	Kec. Toili Barat	0	16	16
6	Kec. Bunta	0	16	16
7	Kec. Kintom	0	11	11
8	Kec. Luwuk Timur	0	7	7
9	Kec. Nuhon	0	8	8
10	Kec. Balantak	0	7	7
11	Kec. Batui Selatan	0	10	10
12	Kec. Simpang Raya	0	12	12
13	Kec. Batui	0	8	8
14	Kec. Moilong	0	5	5
15	Kec. Masama	0	11	11
16	Kec. Lamala	0	10	10
17	Kec. Luwuk Utara	0	4	4
18	Kec. Nambo	0	5	5
19	Kec. Balantak Selatan	0	3	3
20	Kec. Mantoh	0	2	2
21	Kec. Luwuk Selatan	1	4	5
22	Kec. Lobu	0	2	2
23	Kec. Balantak Utara	0	0	0
Total		4	206	210

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.2 Jumlah Sekolah SD di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Sekolah Dasar (SD)		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kec. Luwuk	14	9	23
2	Kec. Toili	25	2	27
3	Kec. Pagimana	34	0	34
4	Kec. Bualemo	29	0	29
5	Kec. Toili Barat	20	1	21
6	Kec. Bunta	21	1	22
7	Kec. Kintom	12	1	13
8	Kec. Luwuk Timur	15	1	16
9	Kec. Nuhon	20	1	21
10	Kec. Balantak	10	2	12
11	Kec. Batui Selatan	16	2	18
12	Kec. Simpang Raya	15	0	15
13	Kec. Batui	13	1	14
14	Kec. Moilong	15	0	15
15	Kec. Masama	14	0	14
16	Kec. Lamala	10	0	10
17	Kec. Luwuk Utara	11	1	12
18	Kec. Nambo	9	0	9
19	Kec. Balantak Selatan	8	1	9
20	Kec. Mantoh	8	1	9
21	Kec. Luwuk Selatan	6	1	7
22	Kec. Lobu	8	0	8
23	Kec. Balantak Utara	5	0	5
Total		338	25	363

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.3 Jumlah Sekolah SMP di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kec. Luwuk	3	6	9
2	Kec. Toili	8	5	13
3	Kec. Pagimana	8	1	9
4	Kec. Bualemo	7	0	7
5	Kec. Toili Barat	6	3	9
6	Kec. Bunta	5	1	6
7	Kec. Kintom	2	1	3
8	Kec. Luwuk Timur	6	0	6
9	Kec. Nuhon	5	0	5
10	Kec. Balantak	3	1	4
11	Kec. Batui Selatan	3	1	4
12	Kec. Simpang Raya	3	0	3
13	Kec. Batui	4	0	4
14	Kec. Moilong	3	1	4
15	Kec. Masama	4	0	4
16	Kec. Lamala	4	0	4
17	Kec. Luwuk Utara	3	0	3
18	Kec. Nambo	2	0	2
19	Kec. Balantak Selatan	2	1	3
20	Kec. Mantoh	2	3	5
21	Kec. Luwuk Selatan	0	1	1
22	Kec. Lobu	2	0	2
23	Kec. Balantak Utara	1	0	1
Total		86	25	111

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.4 Jumlah Sekolah SMA di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Sekolah Menengah Atas (SMA)		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kec. Luwuk	3	3	6
2	Kec. Toili	3	1	4
3	Kec. Pagimana	3	0	3
4	Kec. Bualemo	1	0	1
5	Kec. Toili Barat	2	1	3
6	Kec. Bunta	2	0	2
7	Kec. Kintom	1	0	1
8	Kec. Luwuk Timur	1	0	1
9	Kec. Nuhon	2	0	2
10	Kec. Balantak	1	0	1
11	Kec. Batui Selatan	1	0	1
12	Kec. Simpang Raya	1	0	1
13	Kec. Batui	1	1	2
14	Kec. Moilong	1	0	1
15	Kec. Masama	1	0	1
16	Kec. Lamala	1	0	1
17	Kec. Luwuk Utara	0	0	0
18	Kec. Nambo	0	0	0
19	Kec. Balantak Selatan	1	0	1
20	Kec. Mantoh	2	0	2
21	Kec. Luwuk Selatan	0	0	0
22	Kec. Lobu	0	0	0
23	Kec. Balantak Utara	0	0	0
Total		28	6	34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.4 Jumlah Sekolah SMK di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kec. Luwuk	2	4	6
2	Kec. Toili	1	1	2
3	Kec. Pagimana	0	0	0
4	Kec. Bualemo	1	1	2
5	Kec. Toili Barat	2	0	2
6	Kec. Bunta	1	0	1
7	Kec. Kintom	0	1	1
8	Kec. Luwuk Timur	1	0	1
9	Kec. Nuhon	0	2	2
10	Kec. Balantak	0	0	0
11	Kec. Batui Selatan	1	0	1
12	Kec. Simpang Raya	0	0	0
13	Kec. Batui	0	0	0
14	Kec. Moilong	1	1	2
15	Kec. Masama	0	0	0
16	Kec. Lamala	0	0	0
17	Kec. Luwuk Utara	0	2	2
18	Kec. Nambo	1	0	1
19	Kec. Balantak Selatan	0	0	0
20	Kec. Mantoh	0	0	0
21	Kec. Luwuk Selatan	0	1	1
22	Kec. Lobu	0	0	0
23	Kec. Balantak Utara	1	0	1
Total		12	13	25

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.5 Jumlah Guru di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	TK	SD	SMP	SMA	SMA
1	Kec. Luwuk	118	302	151	202	142
2	Kec. Toili	97	235	154	86	47
3	Kec. Pagimana	24	245	91	76	0
4	Kec. Bualemo	44	166	89	51	32
5	Kec. Toili Barat	28	151	81	62	25
6	Kec. Bunta	20	173	71	20	15
7	Kec. Kintom	16	146	74	36	17
8	Kec. Luwuk Timur	31	119	66	42	0
9	Kec. Nuhon	19	125	68	15	26
10	Kec. Balantak	12	123	47	18	31
11	Kec. Batui Selatan	36	124	33	26	10
12	Kec. Simpang Raya	24	126	44	31	0
13	Kec. Batui	21	109	52	19	17
14	Kec. Moilong	33	113	50	23	0
15	Kec. Masama	14	104	51	0	13
16	Kec. Lamala	17	87	41	0	27
17	Kec. Luwuk Utara	18	78	36	19	0
18	Kec. Nambo	19	74	53	19	0
19	Kec. Balantak Selatan	28	97	5	0	11
20	Kec. Mantoh	11	63	31	20	0
21	Kec. Luwuk Selatan	3	68	33	35	0
22	Kec. Lobu	3	50	25	0	0
23	Kec. Balantak Utara	0	38	7	0	13
Total		636	2916	1353	800	426

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.5 Jumlah Siswa di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	TK	SD	SMP	SMA	SMA
1	Kec. Luwuk	1,239	4,552	2,151	2,938	1,907
2	Kec. Toili	1,081	3,241	1,535	1,108	447
3	Kec. Pagimana	637	2,083	1,062	663	412
4	Kec. Bualemo	263	2,339	989	1,099	0
5	Kec. Toili Barat	390	1,778	803	790	235
6	Kec. Bunta	244	1,912	764	436	200
7	Kec. Kintom	327	1,896	717	724	0
8	Kec. Luwuk Timur	349	1,68	680	422	236
9	Kec. Nuhon	185	1,8	666	254	433
10	Kec. Balantak	304	1,433	525	324	231
11	Kec. Batui Selatan	152	1,338	538	154	251
12	Kec. Simpang Raya	159	1,531	473	0	116
13	Kec. Batui	364	1,131	272	217	32
14	Kec. Moilong	271	925	365	449	0
15	Kec. Masama	284	1,697	32	0	111
16	Kec. Lamala	202	658	299	334	0
17	Kec. Luwuk Utara	242	966	357	277	0
18	Kec. Nambo	130	809	378	0	261
19	Kec. Balantak Selatan	121	725	284	248	0
20	Kec. Mantoh	70	595	316	280	0
21	Kec. Luwuk Selatan	59	525	233	212	0
22	Kec. Lobu	57	363	258	0	0
23	Kec. Balantak Utara	0	471	72	0	97
Total		7130	34448	13769	10929	4969

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

3.2 Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan memfasilitasi berbagai kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda, serta mendukung pengembangan olahraga untuk menciptakan prestasi dan kesehatan masyarakat.

Secara umum, tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi:

1. Pengembangan Kepemudaan: Dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan, kewirausahaan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya.
2. Penyelenggaraan Olahraga: Melaksanakan program olahraga di tingkat kabupaten, baik yang bersifat pembinaan maupun kompetisi, guna meningkatkan prestasi olahraga di daerah tersebut.
3. Fasilitasi Infrastruktur dan Sarana Olahraga: Membangun dan memelihara fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat, terutama pemuda, untuk mendukung kegiatan olahraga yang terorganisir.
4. Pemberdayaan Pemuda: Menyediakan pelatihan, pembinaan, dan peluang bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan di berbagai bidang yang dapat mendukung perkembangan karir dan kehidupan mereka.
5. Program Sosial dan Kegiatan Pemberdayaan: Mengadakan program-program yang mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, seperti program kepemudaan, sukarelawan, dan lainnya.

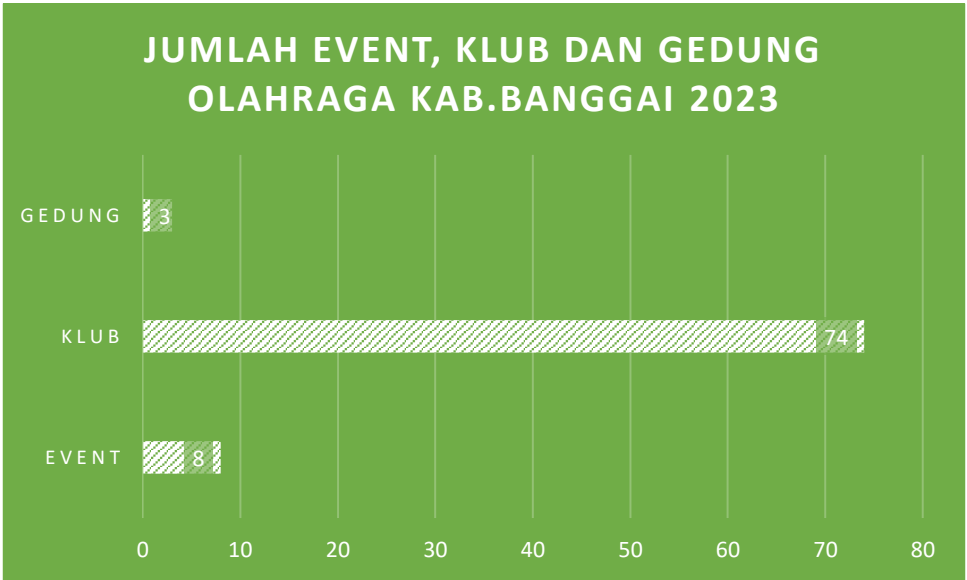
Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banggai berupaya menciptakan generasi muda yang sehat, aktif, dan berprestasi, serta meningkatkan kualitas olahraga di daerah tersebut.

Tabel 3.2.1 Jumlah Event, Klub dan Gedung Olahraga Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Event	8	Event
2	Jumlah Klub Olahraga	74	Klub
3	Jumlah Gedung Olahraga	3	Unit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.1 Jumlah Event, Klub dan Gedung Olahraga Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.2.2 Jumlah Atlet dan Insan Olahraga Berprestasi Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Atlet Berprestasi	36	Orang
2	Jumlah Insan Olahraga Berprestasi	9	Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.2 Jumlah Atlet dan Insan Olahraga Berprestasi Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.2.2 Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Persentase Pemuda Terlatih	50	%
2	Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri	27	%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.2 Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

3.3 Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintah daerah berfungsi untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian wabah, serta upaya-upaya promotif dan preventif lainnya.

Beberapa tugas utamanya antara lain:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Banggai.
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat.
3. Pengawasan Kesehatan: Melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk sanitasi, lingkungan, dan penyakit menular.
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Melaksanakan program pencegahan penyakit seperti imunisasi, pengendalian penyakit menular, serta penanganan wabah jika terjadi.
5. Pelatihan dan Pengembangan SDM Kesehatan: Melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan kesehatan di tingkat lokal, serta mendukung pengembangan profesi kesehatan.

Gambar 3.3.1 Jumlah Dokter di Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Gambar 3.3.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.1 SDM Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kab.Banggai
Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal	Dokter	Perawat	Bidan	SKM	Kesling	Gizi	Apoteker	Farmasi	Manajemen
1	Ibu Hamil	46	531	657			58	28	37	105
2	Ibu Bersalin	46	531	657			58	28	37	105
3	Bayi Baru Lahir	46	531	657			58	28	37	105
4	Balita	46	531	657			58	28	37	105
5	Usia Pendidikan Dasar	46	531		159	42	58	28	37	105
6	Usia Produktif	46	531		159		58	28	37	105
7	Usia Lanjut	46	531		159		58	28	37	105
8	Penderita Hipertensi	46	531		159		58	28	37	105
9	Penderita Diabetes Melitus	46	531		159		58	28	37	105
10	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	46	531		159		58	28	37	105
11	Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar	46	531		159		58	28	37	105
12	Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	46	531		159		58	28	37	105

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.2 Jumlah Prasarana Kesehatan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Rumah Sakit	2	Unit
2	Poliklinik	6	Unit
3	Puskesmas	30	Unit
4	Puskesmas Pembantu	96	Unit
5	Apotek	23	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.3 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Kab.Banggai Tahun 2023

No	Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah	Satuan
1	Bayi Baru Lahir	6717	Unit
2	Balita	30657	Unit
3	Anak Usia Pendidikan Dasar	38232	Unit
4	Orang Usia 15-59 Tahun	187,778	Unit
5	Orang Usia 60 Tahun Keatas	42091	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

3.4 Sosial

Dinas Sosial adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan sosial di Kabupaten Banggai. Dinas ini memiliki tugas utama dalam memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Beberapa layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial antara lain:

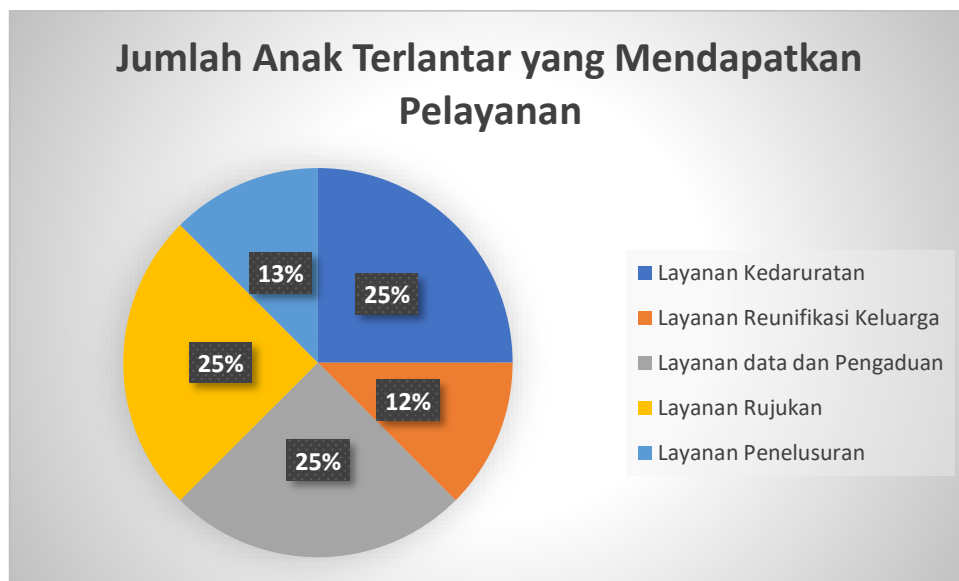
1. Bantuan Sosial: Penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan, termasuk bantuan untuk keluarga miskin, anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pemberian modal usaha.
3. Rehabilitasi Sosial: Menangani masalah sosial seperti penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, serta orang dengan gangguan jiwa.
4. Pelayanan Kepada Anak dan Lansia: Perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
5. Penanggulangan Kemiskinan: Program-program untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, seperti pemberian bantuan langsung tunai atau program pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.4.1 Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Layanan	Jumlah	Satuan
1	Layanan Kedaruratan	4	Orang
2	Layanan Reunifikasi Keluarga	2	Orang
3	Layanan data dan Pengaduan	4	Orang
4	Layanan Rujukan	4	Orang
5	Layanan Penelusuran	2	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.1 Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan
Kab.Banggai Tahun 2023

No	Layanan	Jumlah	Satuan
1	Layanan Kedaruratan	2	Orang
2	Layanan Reunifikasi Keluarga	2	Orang
3	Layanan data dan Pengaduan	2	Orang
4	Layanan Rujukan	2	Orang
5	Layanan Penelusuran	2	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan
Kab.Banggai Tahun 2023



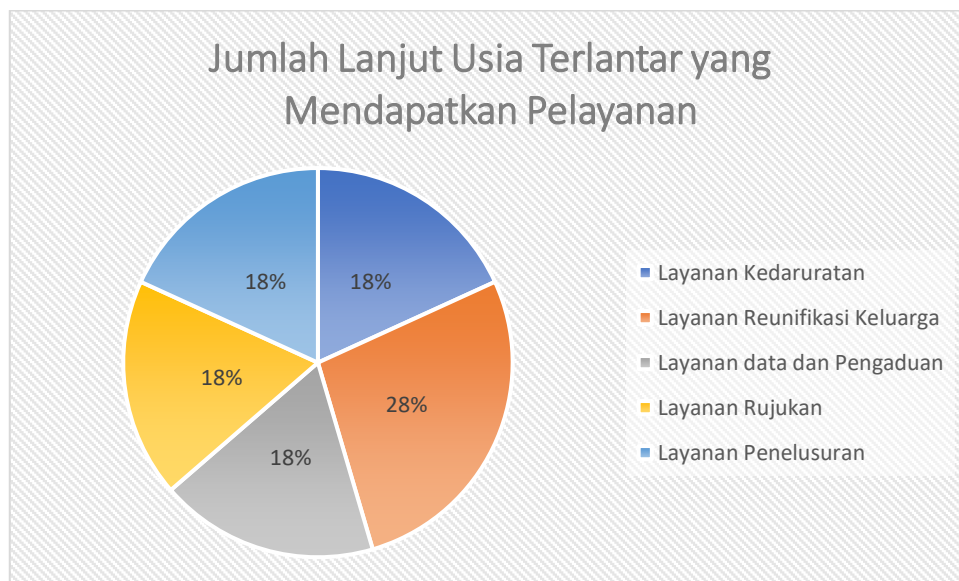
Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.3 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Layanan	Jumlah	Satuan
1	Layanan Kedaruratan	2	Orang
2	Layanan Reunifikasi Keluarga	3	Orang
3	Layanan data dan Pengaduan	2	Orang
4	Layanan Rujukan	2	Orang
5	Layanan Penelusuran	2	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.3 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023



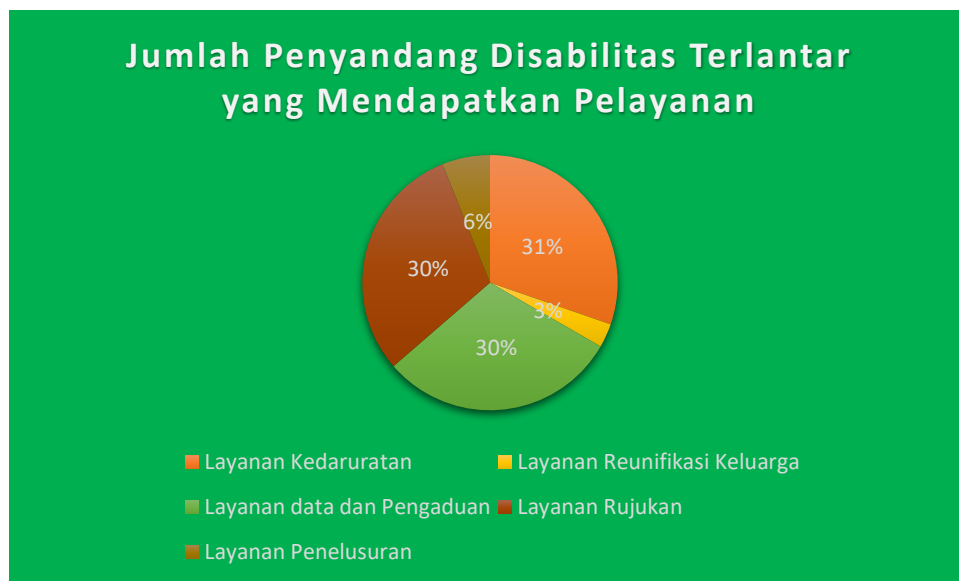
Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Layanan	Jumlah	Satuan
1	Layanan Kedaruratan	10	Orang
2	Layanan Reunifikasi Keluarga	1	Orang
3	Layanan data dan Pengaduan	10	Orang
4	Layanan Rujukan	10	Orang
5	Layanan Penelusuran	2	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Layanan	Jumlah	Satuan
1	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	35	Orang
2	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	35	Orang
3	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	47	Orang
4	Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima kebutuhan sandang	47	Orang
5	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	2	Orang
6	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	19	Orang
7	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	419	Orang
8	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	12	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa serta mendukung pembangunan desa. DPMD bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan fokus pada pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.

Beberapa tugas dan fungsi utama DPMD meliputi:

1. **Pemberdayaan Masyarakat Desa:** Melakukan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera.
2. **Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa:** Membantu pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan pemerintahan desa yang baik dan transparan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan desa.
3. **Pendampingan Desa:** Memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada aparat desa, serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa.
4. **Pembangunan Infrastruktur Desa:** Mengkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur di desa yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
5. **Pengelolaan Dana Desa:** Membantu dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPMD juga berperan dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program yang mendukung kemandirian desa.

Tabel 3.5.1 Jumlah Desa Sesuai Kriteria di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Desa Tertinggal	3	Desa
2	Jumlah Desa Berkembang	163	Desa
3	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun	1	Desa
4	Jumlah Desa Berkembang yang memenuhi Kriteria Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	56	Desa

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.5.1 Jumlah Desa Sesuai Kriteria di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Kab.Banggai

No	Tahun	Jumlah BUMD	Satuan
1	2020	11	BUMD
2	2021	12	BUMD
3	2022	21	BUMD
4	2023	140	BUMD

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.3 Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab.Banggai

No	Tahun	Jumlah PKK	Satuan
1	2020	361	PKK
2	2021	361	PKK
3	2022	361	PKK
4	2023	362	PKK

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.4 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kab.Banggai

No	Tahun	Jumlah LPM	Satuan
1	2020	337	LPM
2	2021	337	LPM
3	2022	337	LPM
4	2023	337	LPM

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.5 Jumlah Kantor Pemerintah Desa atau Sarana Prasarana Kab.Banggai

No	Tahun	Jumlah Kantor Pemerintah Desa atau Sarana Prasarana	Satuan
1	2020	291	Unit
2	2021	291	Unit
3	2022	291	Unit
4	2023	291	Unit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

3.6 Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan dan Kearsipan adalah institusi yang memiliki peran penting dalam mengelola informasi, dokumentasi, serta arsip daerah. Fokus utamanya mencakup pengelolaan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan arsip sebagai bagian dari manajemen informasi dan pelestarian sejarah daerah.

A. Tugas utama

❖ **Perpustakaan:**

- Menyediakan koleksi bahan pustaka (buku, majalah, jurnal, dll.) untuk masyarakat.
- Meningkatkan budaya literasi melalui program edukasi, pelatihan, dan layanan baca.
- Menyediakan akses teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran berbasis digital.

❖ **Kearsipan:**

- Mengelola arsip daerah sebagai sumber informasi strategis.
- Menyusun kebijakan terkait pengelolaan dokumen resmi pemerintahan.

- Melakukan preservasi arsip bersejarah untuk pelestarian warisan budaya lokal.

B. Fungsi Utama

- Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
- Menyediakan dukungan untuk pendidikan formal dan nonformal.
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengelolaan arsip yang baik.
- Melestarikan dokumen-dokumen penting yang bernilai sejarah.

C. Program dan Inisiatif

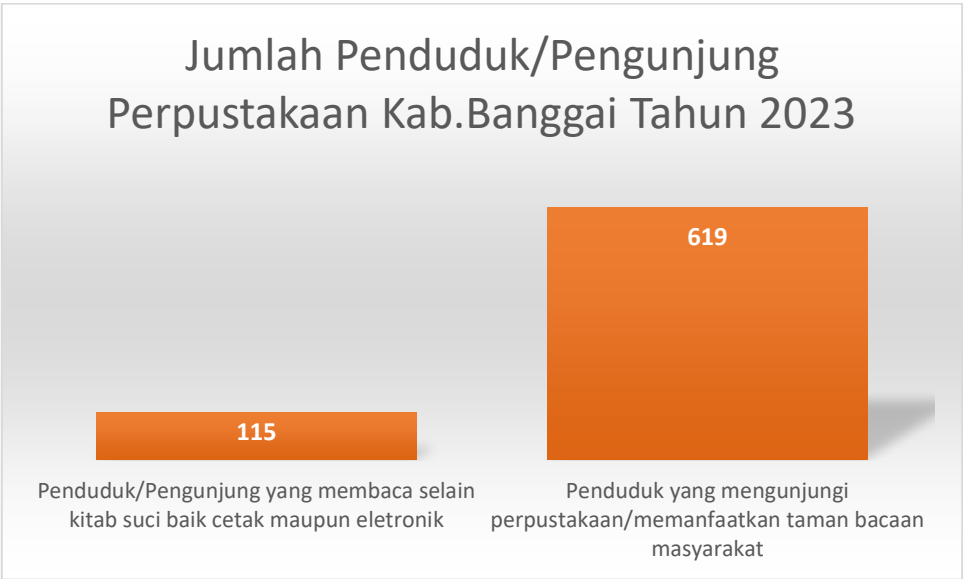
1. Digitalisasi Arsip: Transformasi arsip fisik menjadi arsip digital untuk memudahkan akses dan melindungi dari risiko kerusakan.
2. Pojok Literasi: Ruang baca khusus di berbagai kecamatan untuk mendekatkan akses literasi ke masyarakat.
3. Pelatihan Literasi Digital: Membantu masyarakat memahami teknologi dan cara mengakses informasi digital.
4. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif: Menjaga kelangsungan data pemerintahan dan layanan publik yang efektif.

Tabel 3.6.1 Jumlah Penduduk/Pengunjung Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Penduduk/Pengunjung yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun eletronik	115	Orang
2	Penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	619	Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.1 Jumlah Penduduk/Pengunjung Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.2 Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan	Satuan
1	2020	220	Buku
2	2021	172	Buku
3	2022	214	Buku
4	2023	132	Buku

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.2 Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Satuan
1	2020	41860	Exemplar
2	2021	43634	Exemplar
3	2022	43634	Exemplar
4	2023	43863	Exemplar

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kab.Banggai
Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.4 Jumlah Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan dan Perpustakaan Khusus yang Terkelola Baik Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan dan Perpustakaan Khusus yang Terkelola Baik	Satuan
1	2020	19	Exemplar
2	2021	19	Exemplar
3	2022	19	Exemplar
4	2023	19	Exemplar

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.5 Persentase Arsip Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Arsip Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik	Satuan
1	2020	75	Persentase
2	2021	75	Persentase
3	2022	85	Persentase
4	2023	90	Persentase

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.6 Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola	Satuan
1	2020	2	Persentase
2	2021	2	Persentase
3	2022	3	Persentase
4	2023	5	Persentase

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.7 Persentase Sarpas Kearsipan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Sarpas Kearsipan dalam Kondisi Baik	Satuan
1	2020	100	Persentase
2	2021	100	Persentase
3	2022	100	Persentase
4	2023	100	Persentase

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

3.7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan serta transmigrasi.

A. Tugas utama:

❖ Ketenagakerjaan:

- Pengembangan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
- Penempatan kerja, baik di tingkat lokal maupun di luar daerah.
- Perlindungan dan pengawasan hubungan industrial serta kesejahteraan tenaga kerja.

❖ Transmigrasi:

- Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi untuk meningkatkan pemerataan penduduk.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui penyediaan sarana dan prasarana.

B. Visi dan Misi

Dinas ini umumnya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah, seperti:

- Visi: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.
- Misi: Menyediakan layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis teknologi, efektif, dan efisien.

C. Program Kerja

Beberapa program kerja yang biasanya dijalankan:

- Pelatihan Tenaga Kerja: Untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.

- Fasilitasi Penempatan Kerja: Termasuk job fair atau kerjasama dengan perusahaan.
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah baru.

Tabel 3.7.1 Jumlah Besarannya Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Besarannya Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Satuan
1	2020	7896	Orang
2	2021	8279	Orang
3	2022	22042	Orang
4	2023	22044	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.2 Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK	Satuan
1	2020	64	Orang
2	2021	14	Orang
3	2022	19	Orang
4	2023	21	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.3 Jumlah Pengangguran yang Dilatih Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Pengangguran yang Dilatih	Satuan
1	2020	96	Orang
2	2021	160	Orang
3	2022	240	Orang
4	2023	174	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.4 Jumlah Perselisihan Kepentingan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Satuan
1	2020	64	Kasus
2	2021	131	Kasus
3	2022	151	Kasus
4	2023	22	Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.5 Jumlah Perselisihan PHK Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perselisihan PHK	Satuan
1	2020	64	Kasus
2	2021	14	Kasus
3	2022	19	Kasus
4	2023	21	Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.6 Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite	Satuan
1	2020	64	Kasus
2	2021	8	Kasus
3	2022	0	Kasus
4	2023	0	Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.7 Jumlah Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang Diberdayakan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Satuan
1	2020	1	Lembaga
2	2021	1	Lembaga
3	2022	1	Lembaga
4	2023	0	Lembaga

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.8 Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020-2023

No	Tahun	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Satuan
1	2020	16	Orang
2	2021	40	Orang
3	2022	112	Orang
4	2023	54	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.9 Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Lulusan Bersertifikat Pelatihan	Satuan
1	2020	100	Persentase
2	2021	100	Persentase
3	2022	100	Persentase
4	2023	100	Persentase

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.10 Persentase LPK yang Terakreditasi Tahun 2020-2023

No	Tahun	LPK yang Terakreditasi	Satuan
1	2020	84,62	Persentase
2	2021	84,62	Persentase
3	2022	84,62	Persentase
4	2023	84,62	Persentase

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

3.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi perangkat daerah yang berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugas strategis terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Pengendalian Penduduk

Fokus pada upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) serta perencanaan berbasis data kependudukan.

2. Keluarga Berencana (KB)

Melaksanakan program untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia, termasuk pemberian pelayanan KB dan edukasi masyarakat.

3. Pemberdayaan Perempuan

Bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, serta mendorong kesetaraan gender.

4. Perlindungan Anak

Memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyediakan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

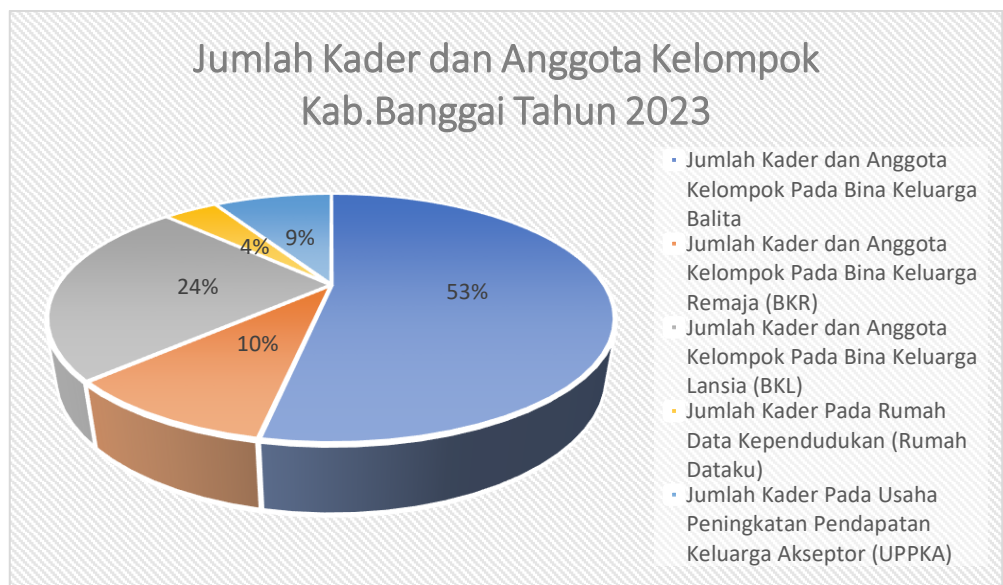
Dinas ini bekerja sama dengan instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, organisasi masyarakat, dan mitra lainnya untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif di tingkat daerah. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dinas ini biasanya mencerminkan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai.

Tabel 3.8.1 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Balita	641	Kelompok/Orang
2	Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Remaja (BKR)	119	Kelompok/Orang
3	Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Lansia (BKL)	293	Kelompok/Orang
4	Jumlah Kader Pada Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku)	48	Kelompok/Orang
5	Jumlah Kader Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	105	Kelompok/Orang

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Gambar 3.8.1 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.2 Jumlah Anggota Kelompok Pada Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor Tahun 2021-2023

No	Tahun	Anggota Kelompok Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Satuan
1	2021	70	Kelompok
2	2022	119	Kelompok
3	2023	149	Kelompok

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.3 Jumlah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2021-2023

No	Tahun	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB)	Satuan
1	2021	16	Unit
2	2022	19	Unit
3	2023	23	Unit

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.4 Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Berdasarkan Identitas dan Informasi
Kelompok Tahun 2021-2023

No	Tahun	Bina Keluarga Balita (BKB) Berdasarkan Identitas dan Informasi Kelompok	Satuan
1	2021	45	Kelompok
2	2022	59	Kelompok
3	2023	88	Kelompok

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) Menurut Sasaran Dalam Pelayanan Tahun 2021-2023

No	Tahun	Fasilitas Kesehatan (Faskes) Menurut Sasaran Dalam Pelayanan	Satuan
1	2021	15	Unit
2	2022	31	Unit
3	2023	31	Unit

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.6 Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Informasi yang Dimiliki (Desa/Kelurahan) Tahun 2021-2023

No	Tahun	Kampung Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Informasi yang Dimiliki (Desa/Kelurahan)	Satuan
1	2021	337	Unit
2	2022	337	Unit
3	2023	337	Unit

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.7 Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Sarana yang Dimiliki dan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Tahun 2021-2023

No	Tahun	Kampung Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Sarana yang Dimiliki dan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Satuan
1	2021	-	Unit
2	2022	25	Unit
3	2023	31	Unit

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.8 Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Pos KB) Tahun 2021-2023

No	Tahun	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Pos KB)	Satuan
1	2021	337	Institusi
2	2022	337	Institusi
3	2023	337	Institusi

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.9 Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Tahun 2021-2023

No	Tahun	Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Satuan
1	2021	12	Kelompok
2	2022	20	Kelompok
3	2023	21	Kelompok

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.10 Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tahun 2021-2023

No	Tahun	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Satuan
1	2021	15	Kelompok
2	2022	29	Kelompok
3	2023	29	Kelompok

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

BAB IV

INFRASTRUKTUR

4.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai adalah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pekerjaan Umum dan di Bidang Penataan Ruang;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas dan

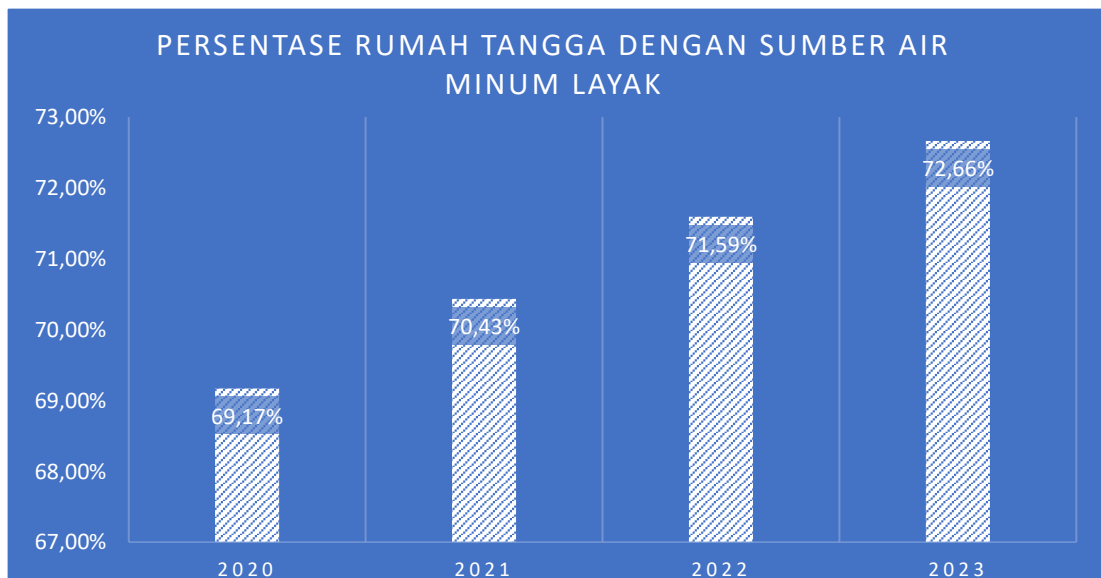
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, termasuk:

- Pengelolaan sumber daya air dan irigasi
- Pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan dan jembatan.
- Pembangunan dan penataan gedung serta lingkungannya.
- Peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi.
- Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah.

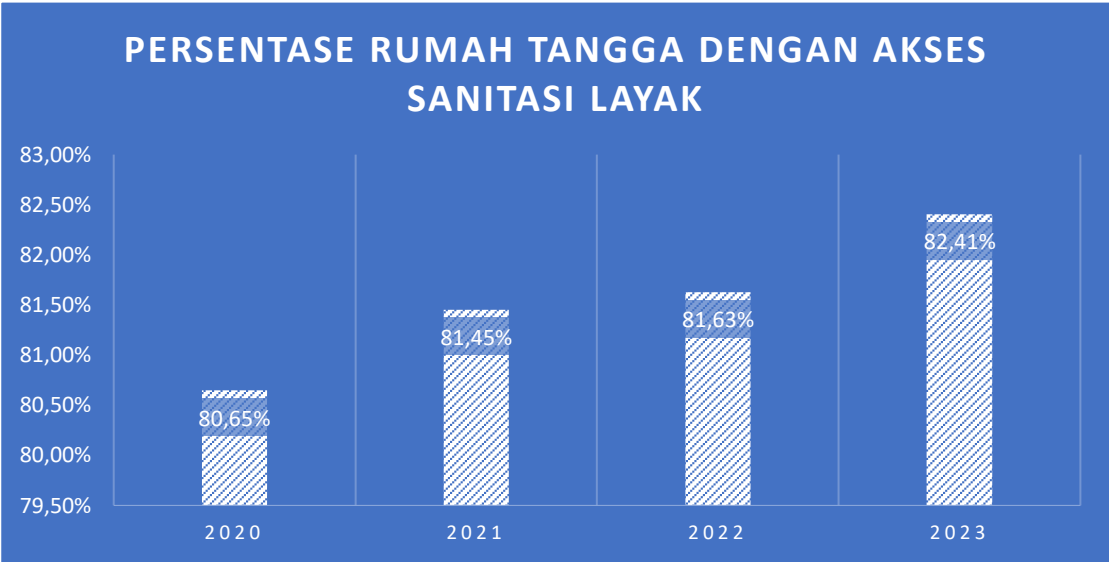
Adapun Data-data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1.1 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2020-2023



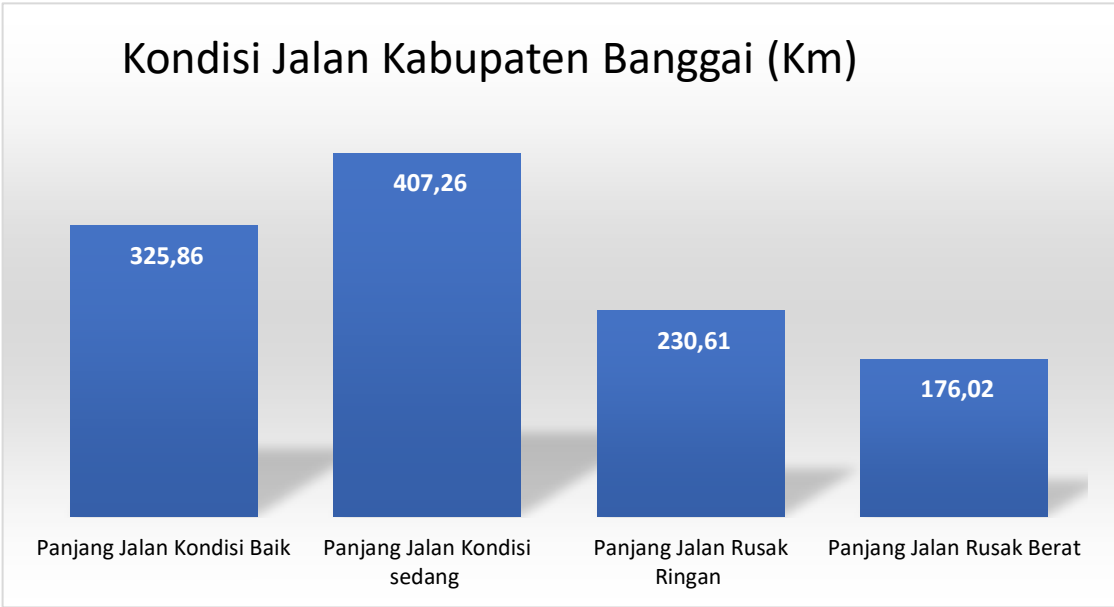
Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Gambar 4.1.2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Gambar 4.1.3 Jumlah Kondisi Jalan Kabupaten Banggai (Km) Tahun 2023



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Tabel 4.1.1 Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2023

No	Infrastruktur Dasar dan Wilayah	Realisasi
1	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63, 68 %
2	Rumah Tangga dengan akses air minum layak	78, 11 %
3	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	82,74%
4	Bangunan Negara berfungsi baik	47%
5	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	69,90%
6	Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	0%
7	Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	80,00%
	Rata-rata Pencapaian	60,20%

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Tabel 4.1.2 Infrastruktur dasar dan wilayah di Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Infrastruktur Dasar dan wilayah	Jumlah Total	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Prasarana Jalan	1.178,46	443,1	307,15	426,099
2	Drainase Kabupaten	17,01096	20,5	16,990.46	0
3	Irigasi Kabupaten	143.670	81,758	14,092	47,82
4	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten	241	165	38	10
5	Jumlah Jembatan di Kabupaten	3.169,84	2805,14	240,9	123,8

Sumber : PUPR Tahun 2023

4.2 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) adalah instansi yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Perkimtan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program
3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
6. pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan
10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun Data-data pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.2.1 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



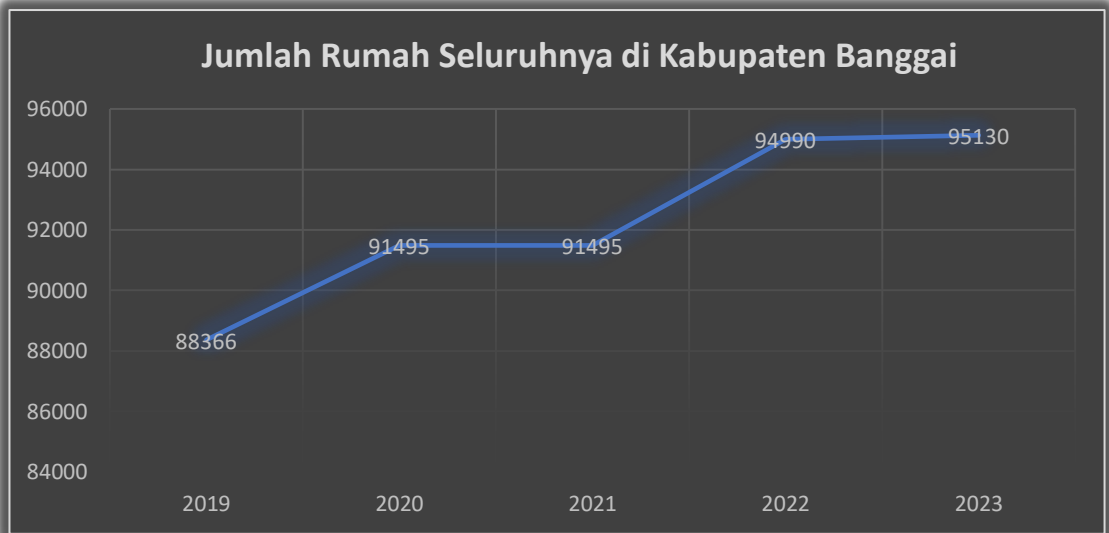
Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.2 Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Kabupaten Banggai Tahun 2018-2023



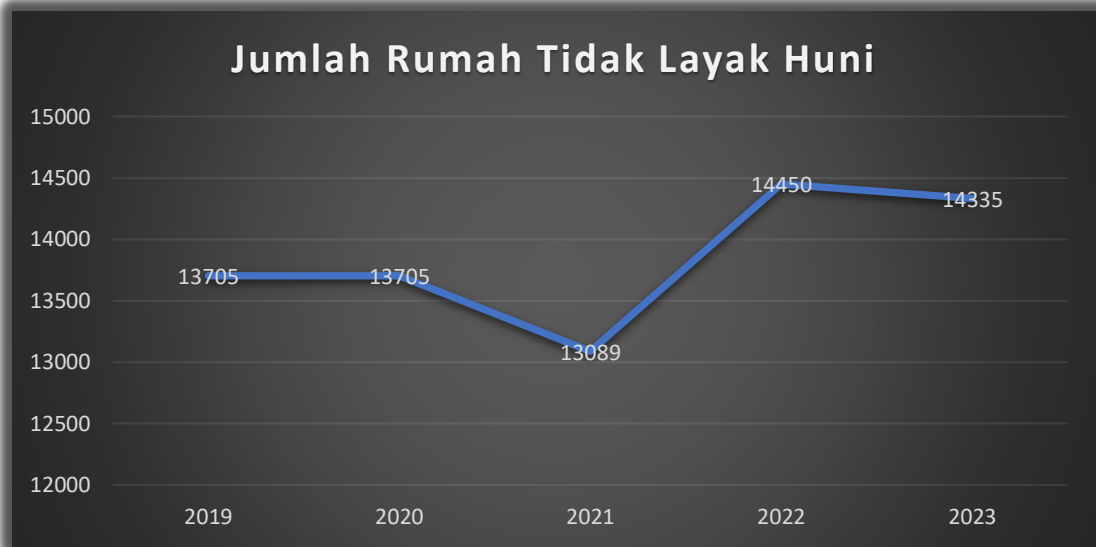
Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.3 Jumlah Rumah Seluruhnya di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2020



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun Anggaran terkait Program Kegiatan yang mendukung Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yaitu : Program Pengembangan Perumahan dan Kegiatannya yaitu, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana. Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan juga telah menyiapkan data hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan pengumpulan data korban bencana pada tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Daftar Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Desa	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Nambo	Banjir	Nambo Lempek	6	6	17
		Banjir	Koyoan Permai	3	3	8
		Banjir	Padungyo	31	34	103
		Banjir	Sayambongin	21	27	96
2	Kintom	Banjir	Salon Baru	31	43	154
		Banjir	Salon	40	51	185
3	Pagimana	Banjir	Toipan	5	5	17
		Banjir	Lambangan	21	23	84
		Angin Putting Beliung	Gomuo	2	2	5
		Angin Putting Beliung	Tempe	2	2	6
4	Bunta	Banjir	Huhak	1	1	4
Total				163	197	679

Sumber : Dinas Permukiman Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Tabel 4.2.2 Data rumah yang terkena bencana di tahun sebelumnya dan tahun 2023

No	Tahun Terjadinya Bencana	Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	2022	Balantak Selatan	Dondo	53	17	13	20
Total				53	17	13	20

Sumber : Dinas Permukiman Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

4.3 Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai antara lain:

1. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banggai, termasuk perlindungan terhadap kawasan konservasi dan hutan.
2. **Pengawasan Lingkungan:** Melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri, pertambangan, dan aktivitas lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup di daerah tersebut.
3. **Penyuluhan dan Edukasi Lingkungan:** Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4. **Penyusunan Kebijakan dan Peraturan:** Menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
5. **Pengelolaan Sampah dan Limbah:** Mengelola sampah dan limbah rumah tangga, industri, dan sektor lain dengan cara yang ramah lingkungan.
6. **Pemantauan Kualitas Lingkungan:** Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara, air, tanah, serta faktor lingkungan lainnya untuk memastikan standar lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program, kegiatan, atau kontak langsung, biasanya bisa mengakses situs resmi pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Tabel 4.3.1 Analis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023

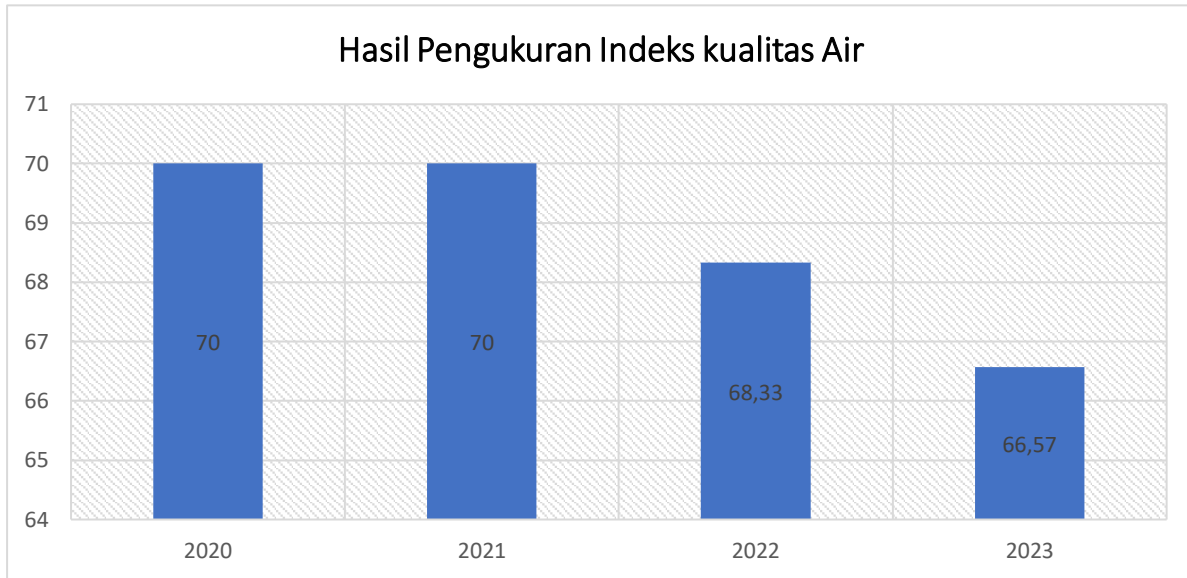
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,418	79,2	98,48
Rata-rata Capaian Kinerja					98,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada Kabupaten Banggai yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahunnya. Kualitas air diukur pada sungai, kualitas udara diukur pada kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

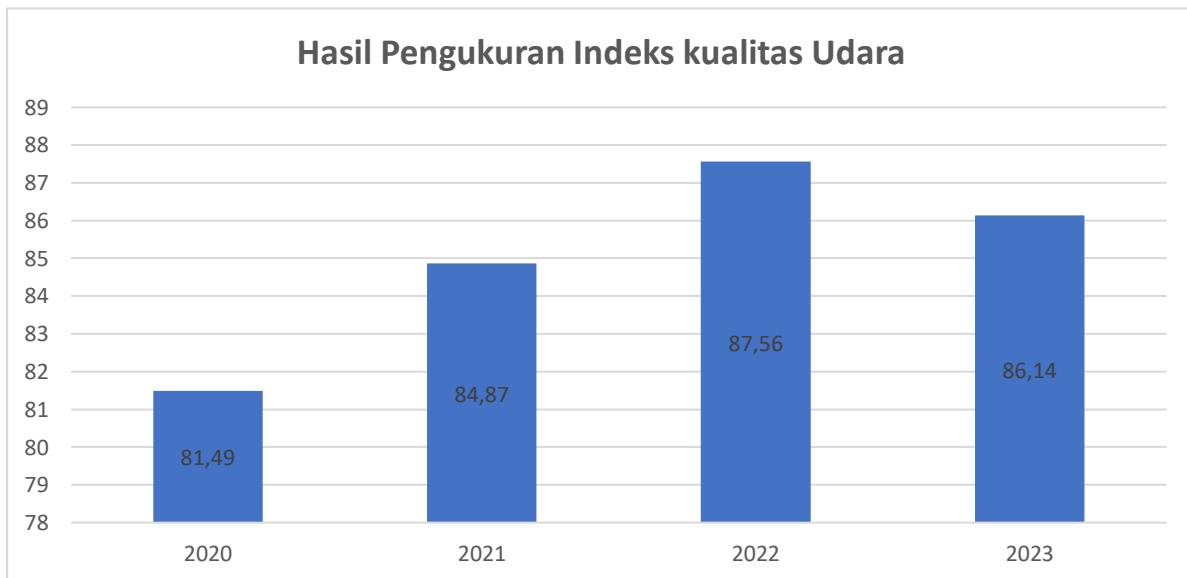
Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Gambar 4.3.1 Indeks kualitas Air Tahun 2020-2023



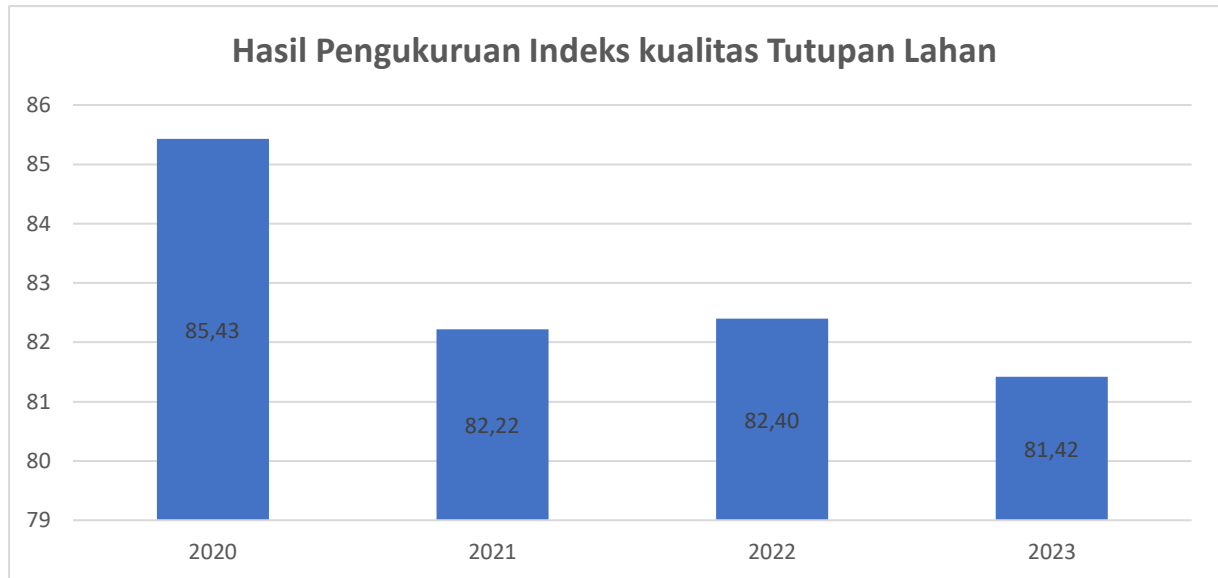
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.2 Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2023



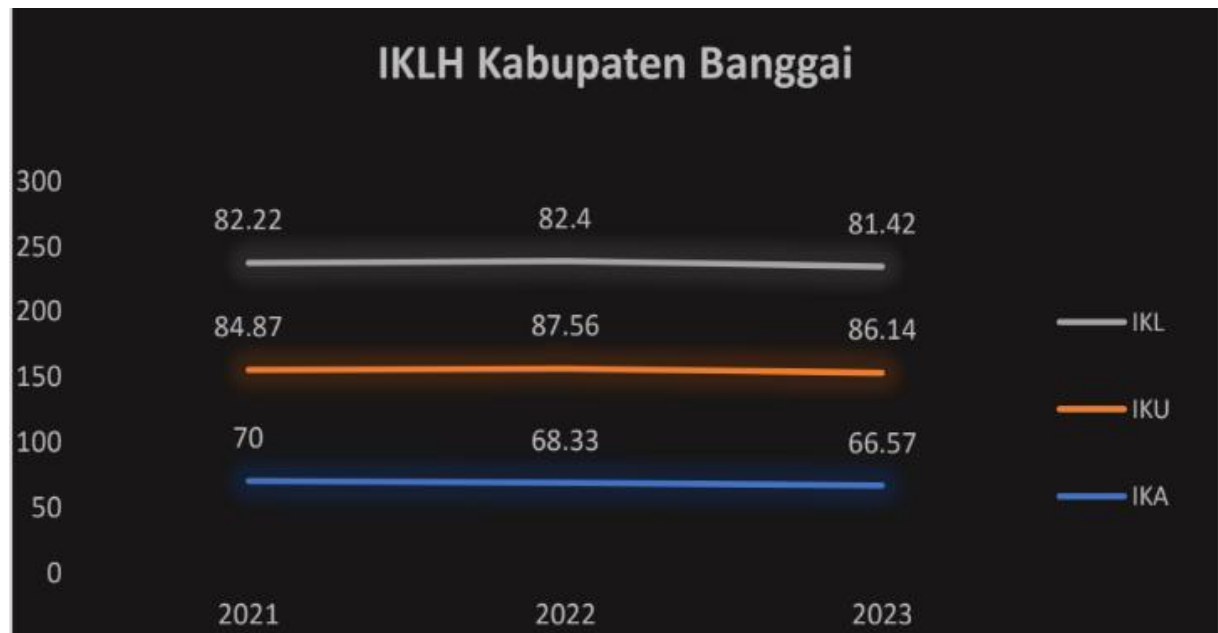
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.4 Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

4.4 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur sektor perhubungan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas utama Dinas Perhubungan adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang di wilayah Kabupaten Banggai.

Beberapa tugas dan fungsi utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai antara lain:

1. **Pengelolaan Infrastruktur Transportasi:** Dinas Perhubungan bertugas untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi di Kabupaten Banggai, seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya.
2. **Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas:** Mengatur dan mengawasi arus lalu lintas kendaraan bermotor, baik di jalan raya maupun di kawasan pelabuhan atau terminal, untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas.
3. **Pelayanan Transportasi Umum:** Menyediakan layanan transportasi umum yang terjangkau, aman, dan efisien bagi masyarakat, serta mendorong penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
4. **Keselamatan dan Keamanan Transportasi:** Menjamin keselamatan transportasi dengan mengawasi dan memastikan kendaraan bermotor, angkutan umum, serta fasilitas transportasi lainnya memenuhi standar keselamatan.

5. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi: Menyusun kebijakan, peraturan, dan standar yang mengatur operasional sektor perhubungan di daerah, baik itu mengenai angkutan barang maupun orang.
6. Penyuluhan dan Edukasi Lalu Lintas: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan penggunaan moda transportasi yang tepat.
7. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Memantau kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi di sektor perhubungan.
8. Pengelolaan Pelabuhan dan Transportasi Laut: Mengelola pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Banggai dan memastikan kelancaran transportasi laut, yang merupakan moda transportasi penting bagi wilayah kepulauan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program, kegiatan, atau layanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Anda bisa mengunjungi situs web resmi Pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi langsung Dinas Perhubungan setempat.

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, adapun kendala yang dihadapi yakni :

- Dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor di mana pengujian kendaraan bermotor pada setiap kabupaten harus terakreditasi pada Kementerian Perhubungan

- Kendala yang dihadapi pada Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan dan Penghapusan Rambu Lalu Lintas (APILL), pada tahun 2023 juga terkendala pada masalah anggaran dan
- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir yakni karena belum disediakan lahan atau lokasi parkir oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	0,65	Dokumen
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	0,59	Dokumen
3	jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	Unit	5	Dokumen
4	jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	Unit	4	Dokumen
5	jumlah kendaraan yang diuji per tahun	Unit	1338	Dokumen
6	jumlah kendaraan wajib uji	Unit	9843	Dokumen
7	jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan	Rupiah	0	Surat Pernyataan
8	jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota	Unit	1	Surat Pernyataan
9	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota	Unit	297	Dokumen
10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Persen	82,50	Dokumen
11	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Persen	125,00%	Dokumen

Sumber : Dinas Perhubungan 2023

BAB V

EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Pangan

Dinas Ketahanan Pangan adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola urusan terkait ketahanan pangan. Fokus utama dinas ini meliputi:

A. Perencanaan dan Implementasi Ketahanan Pangan

- Memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan di wilayah Kabupaten Banggai.
- Meningkatkan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi.

B. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah

- Menyediakan stok pangan strategis untuk situasi darurat atau bencana.
- Mengelola distribusi pangan untuk kelompok rentan.

C. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Lokal

- Mendorong produksi pangan lokal melalui dukungan kepada petani, nelayan, dan peternak.
- Memberikan pelatihan dan akses teknologi pertanian serta pengelolaan sumber daya alam.

D. Pengawasan Keamanan Pangan

- Menjamin kualitas pangan yang beredar aman dan sehat bagi masyarakat.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi dan sertifikasi produk pangan.

E. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

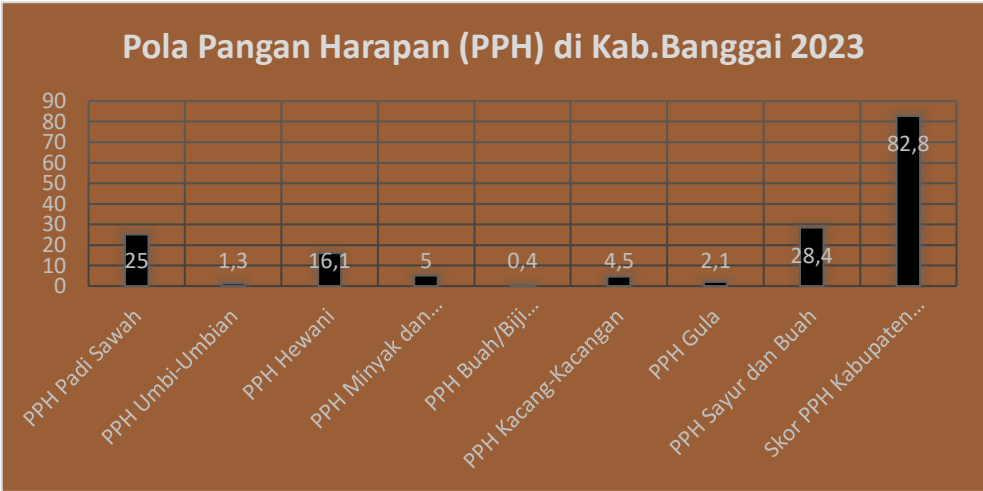
- Mengkampanyekan ketahanan pangan berbasis rumah tangga, seperti urban farming dan diversifikasi pangan lokal.

Tabel 5.1.1 Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Padi Sawah	25,0	PPH
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Umbi-Umbian	1,3	PPH
3	Pola Pangan Harapan (PPH) Hewani	16,1	PPH
4	Pola Pangan Harapan (PPH) Minyak dan Lemak	5,0	PPH
5	Pola Pangan Harapan (PPH) Buah/Biji Berminyak	0,4	PPH
6	Pola Pangan Harapan (PPH) Kacang-Kacangan	4,5	PPH
7	Pola Pangan Harapan (PPH) Gula	2,1	PPH
8	Pola Pangan Harapan (PPH) Sayur dan Buah	28,4	PPH
9	Skor PPH Kabupaten Banggai	82,8	PPH

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Gambar 5.1.1 Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.2 Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan	300	Kartu Keluarga
2	Jumlah Kecamatan Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan	6	Kecamatan
3	Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Tanaman Cabai)	7500	Polibag
4	Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Terong)	7500	Polibag
5	Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Insektisida)	300	Botol
6	Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Pupuk dan Pupuk Cair Biasa)	600	Kg/Botol

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.3 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Satuan di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan	63,33	PPH
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Energi/Kalori Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan	7404	Kalori
3	Pola Pangan Harapan (PPH) AKE Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan	309	Persentase

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.4 Angka Kecukupan Energi (AKE) Kab.Banggai Tahun 2021-2023

No	Tahun	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Satuan
1	2021	1915	Kkal/Kapita/Hari
2	2022	2058	Kkal/Kapita/Hari
3	2023	2093	Kkal/Kapita/Hari

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.5 Angka Kecukupan Protein (AKP) Kab.Banggai Tahun 2021-2023

No	Tahun	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Satuan
1	2021	57,1	Kkal/Kapita/Hari
2	2022	58,8	Kkal/Kapita/Hari
3	2023	60,6	Kkal/Kapita/Hari

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.6 Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab.Banggai Tahun
2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Satuan
1	2021	20000	Kg
2	2022	18700	Kg
3	2023	22065	Kg

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

5.2 Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Fokus dinas ini meliputi:

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tanaman Pangan:

- Pengembangan varietas unggul lokal dan modern.
- Penyuluhan teknik budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.
- Optimalisasi lahan dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi.

2. Hortikultura:

- Promosi tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias.
- Peningkatan kualitas produk hortikultura agar memenuhi standar pasar.
- Pelatihan dan pemberdayaan petani hortikultura.

3. Perkebunan:

- Pengelolaan dan pengembangan komoditas perkebunan unggulan, seperti kelapa, kakao, dan cengkeh.
- Peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui teknologi modern.
- Pengelolaan berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk komoditas perkebunan.

4. Program Dukungan:

- Penyediaan sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian.
- Fasilitasi akses pasar dan pengembangan rantai distribusi.
- Penguatan kelembagaan petani, kelompok tani, dan koperasi

B. Visi dan Misi

- Visi: Mendukung Kabupaten Banggai sebagai daerah agraris yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal.
- Misi:
 1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.
 2. Memperkuat daya saing produk hortikultura dan perkebunan.
 3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi dan teknologi.

C. Program Unggulan

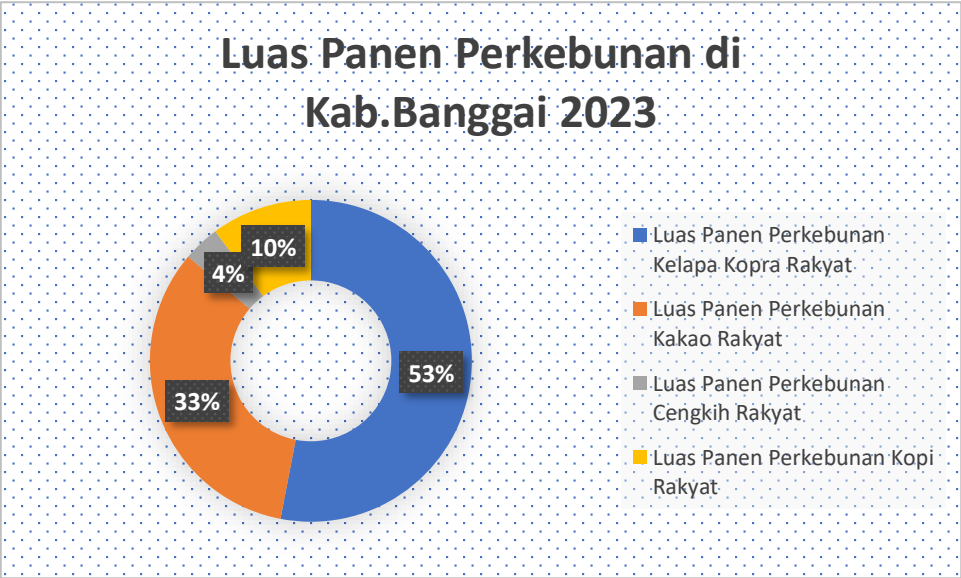
- Pengembangan *cluster* komoditas unggulan (seperti padi dan kelapa).
- Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan teknis.
- Pengelolaan lahan marginal menjadi produktif.
- Penerapan teknologi pertanian berbasis digital (pertanian cerdas).

Tabel 5.2.1 Jumlah Luas Panen Perkebunan di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Luas Panen Perkebunan Kelapa Kopra Rakyat	40876,81	Ha
2	Luas Panen Perkebunan Kakao Rakyat	25591	Ha
3	Luas Panen Perkebunan Cengkih Rakyat	2827	Ha
4	Luas Panen Perkebunan Kopi Rakyat	7800	Ha

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.1 Jumlah Luas Panen Perkebunan di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.2 Jumlah Produksi Perkebunan di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Kopra Rakyat	51283,56	Ton
2	Jumlah Produksi Perkebunan Kakao Rakyat	15975,93	Ton
3	Jumlah Produksi Perkebunan Cengkih Rakyat	1270,15	Ton
4	Jumlah Produksi Perkebunan Kopi Rakyat	361,43	Ton

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.2 Jumlah Produksi Perkebunan di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.3 Jumlah Produktivitas Perkebunan di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kelapa Kopra Rakyat	1,25	KwHa
2	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao Rakyat	0,62	KwHa
3	Jumlah Produktivitas Perkebunan Cengkih Rakyat	0,44	KwHa
4	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi Rakyat	0,50	KwHa

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.3 Jumlah Produktivitas Perkebunan di Kab.Banggai 2023



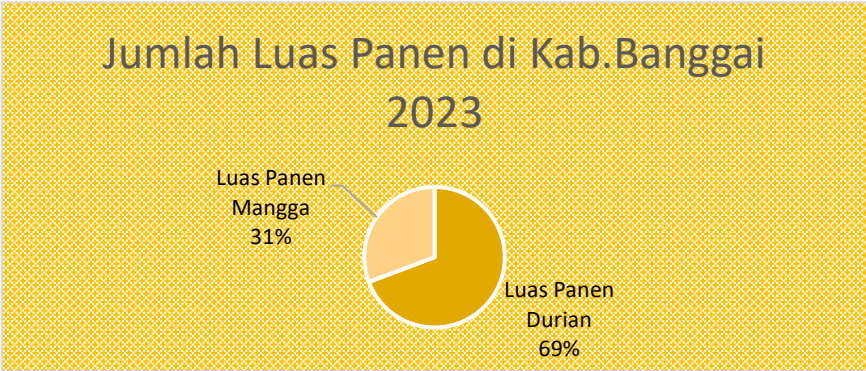
Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.4 Jumlah Luas Panen di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Luas Panen Durian	46982	Ha (Pohon)
2	Luas Panen Mangga	20843	Ha (Pohon)

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.4 Jumlah Luas Panen di Kab.Banggai 2023



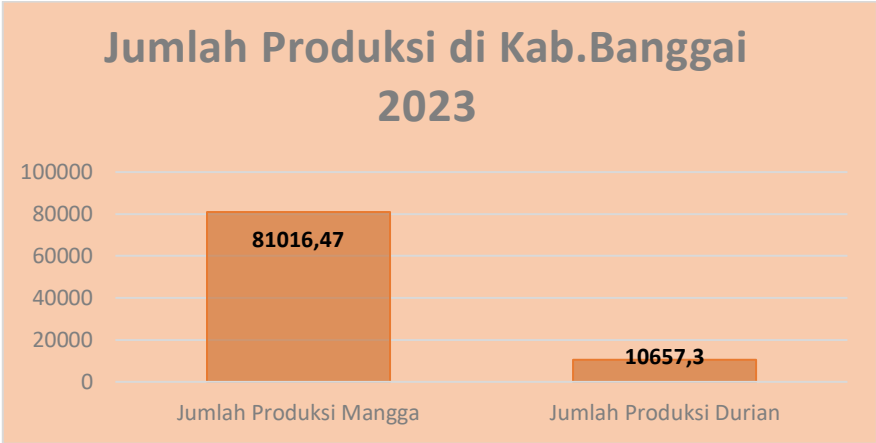
Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.5 Jumlah Produksi di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Produksi Mangga	81016,47	Ton
2	Jumlah Produksi Durian	10657,30	Ton

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.5 Jumlah Produksi di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

5.3 Pariwisata

Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan sektor pariwisata. Kabupaten Banggai dikenal dengan kekayaan alamnya yang meliputi pantai, pulau-pulau kecil, terumbu karang, dan keanekaragaman budaya lokal, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Pengembangan Destinasi Wisata:
 - Meningkatkan kualitas destinasi wisata alam, budaya, dan buatan.
 - Membangun dan memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata seperti akses jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum.
2. Peningkatan Promosi Pariwisata:
 - Memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Banggai melalui media digital, event pariwisata, dan kolaborasi dengan agen perjalanan.
 - Mengikuti pameran dan festival pariwisata nasional maupun internasional.
3. Pengelolaan Kebudayaan:
 - Melestarikan dan mempromosikan tradisi, seni, dan budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata.
 - Mendukung kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal dan regional.
4. Penguatan Ekonomi Kreatif:
 - Mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan produk lokal lainnya.
 - Membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata untuk meningkatkan daya saing.

5. Pemberdayaan Masyarakat:

- Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.
- Memberikan pelatihan kepada pelaku wisata seperti pemandu wisata dan pengelola homestay.

B. Potensi Wisata di Kabupaten Banggai

1. Wisata Alam:

- Pulau Dua: Dikenal dengan pemandangan indah dan terumbu karangnya yang memukau.
- Air Terjun Salodik: Air terjun bertingkat dengan suasana hutan tropis yang asri.
- Pantai Kilo Lima: Lokasi snorkeling yang menawarkan keindahan bawah laut.
- Gunung Batui: Tempat favorit bagi pendaki dan pecinta alam.

2. Wisata Bahari:

- Pulau Peling, dengan pantai berpasir putih dan ekosistem laut yang kaya.
- Ekowisata mangrove di beberapa kawasan pesisir.

3. Wisata Budaya:

- Festival budaya lokal, seperti pagelaran seni tradisional dan ritual adat masyarakat Banggai.
- Desa wisata berbasis budaya dan tradisi lokal.

C. Visi dan Misi

- Visi: Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai destinasi wisata unggulan berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal yang berkelanjutan.
- Misi:
 1. Mengembangkan destinasi wisata berstandar internasional.

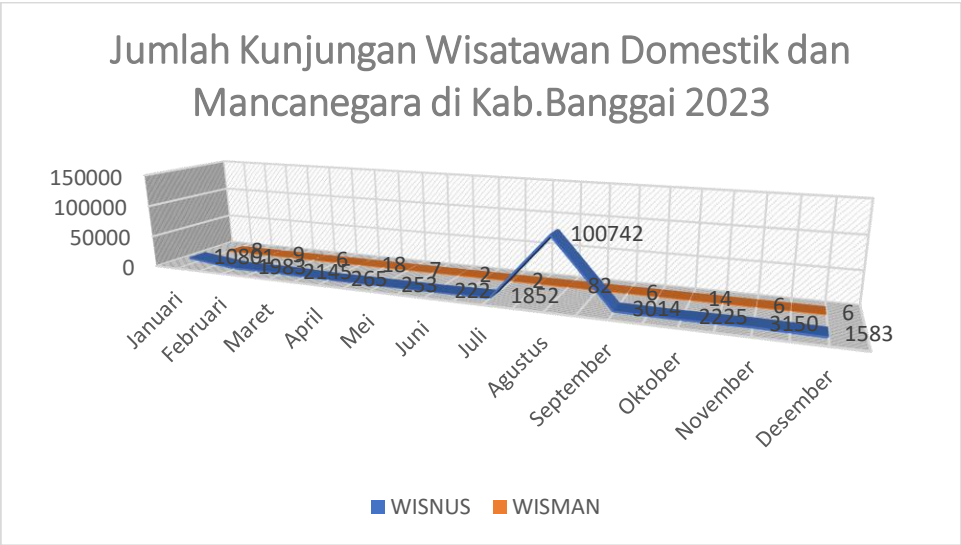
2. Melestarikan warisan budaya dan lingkungan sebagai aset pariwisata.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Tabel 5.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kab.Banggai
2023

BULAN	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
Januari	10801	8	10809
Februari	1983	9	1992
Maret	2145	6	2151
April	265	18	283
Mei	253	7	260
Juni	222	2	224
Juli	1852	2	1854
Agustus	100742	82	100824
September	3014	6	3020
Oktober	2225	14	2239
November	3150	6	3156
Desember	1583	6	1589
Jumlah	128235	166	128,401

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Gambar 5.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.2 Jumlah Obyek Wisata di Kab.Banggai 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Obyek Wisata Alam	82	Unit
2	Jumlah Obyek Wisata Buatan	12	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.3 Jumlah Penginapan/Losmes Kab.Banggai Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penginapan/Losmes	Satuan
1	2021	13	Unit
2	2022	13	Unit
3	2023	13	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.4 Total Spending of Money Kab.Banggai Tahun 2022-2023

No	Tahun	Total Spending of Money	Satuan
1	2022	6.238.675.000 M	Rupiah
2	2023	6.295.000.000 M	Rupiah

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.5 Jumlah Hotel Kab.Banggai Tahun 2023

No	Indikator	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Hotel Berbintang	3	Unit
2	Jumlah Hotel Non Berbintang	57	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.6 Jumlah Restoran/Rumah Makan Kab.Banggai Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Restoran/Rumah Makan	Satuan
1	2021	254	Unit
2	2022	447	Unit
3	2023	456	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.7 Jumlah Kelompok Kesenian Kab.Banggai Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kelompok Kesenian	Satuan
1	2021	18	Kelompok
2	2022	18	Kelompok
3	2023	17	Kelompok

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

5.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah serta penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Pengembangan Koperasi:

- Membantu pembentukan dan pengelolaan koperasi yang sehat dan profesional.
- Memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi tentang manajemen dan administrasi.
- Meningkatkan akses koperasi terhadap sumber pendanaan dan pasar.

2. Pemberdayaan UKM:

- Fasilitasi permodalan untuk pelaku usaha kecil dan menengah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.
- Pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk.
- Promosi dan pengembangan produk UKM melalui pameran, bazar, dan media digital.

3. Peningkatan Akses Pasar:

- Membantu pelaku UKM memperluas jaringan pemasaran, baik lokal, nasional, maupun internasional.
- Mendorong digitalisasi UKM untuk memanfaatkan platform e-commerce.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal:

- Mendorong pembentukan desa atau kecamatan mandiri berbasis koperasi dan UKM.
- Mendukung penciptaan produk unggulan daerah.

5. Pengawasan dan Pembinaan:

- Melakukan pengawasan terhadap koperasi agar beroperasi sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku.
- Membantu UKM memenuhi standar produk untuk memasuki pasar yang lebih luas.

B. Visi dan Misi

- Visi: Mewujudkan koperasi dan UKM Kabupaten Banggai yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
- Misi:
 1. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi.
 2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UKM.
 3. Mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengembangan koperasi dan UKM.
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha mikro dan koperasi berbasis ekonomi kreatif.

C. Program Unggulan

1. Pembiayaan dan Pendanaan:

- Program akses permodalan melalui kemitraan dengan perbankan atau dana bergulir.
- Subsidi bunga untuk usaha mikro kecil.

2. Pelatihan dan Pemberdayaan:

- Pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro.
- Pengembangan kapasitas manajemen koperasi dan UKM.

3. Pengembangan Produk Lokal:

- Promosi produk UKM unggulan Banggai seperti kerajinan, olahan makanan khas, dan produk kreatif lainnya.
- Sertifikasi halal, SNI, dan izin edar bagi produk UKM.

4. Transformasi Digital:

- Pelatihan e-commerce dan pemasaran digital.
- Bantuan platform teknologi untuk koperasi dan UKM.

Tabel 5.4.1 Data Pelaku Usaha Mikro Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Wilayah	Sektor Usaha		
		Perdagangan	Home Industri	Jasa
1	Kec. Luwuk	978	98	194
2	Kec. Luwuk Selatan	658	39	86
3	Kec. Luwuk Utara	503	86	66
4	Kec. Luwuk Timur	176	63	20
5	Nambo	138	97	33
6	Kintom	289	86	46
7	Batui	361	68	86
8	Batui Selatan	319	113	53
9	Moilong	478	161	107
10	Toili	825	275	241
11	Toili Barat	534	79	111
12	Pagimana	440	380	58
13	Lobu	35	18	7
14	Bunta	97	87	42
15	Nuhon	56	43	27
16	Simpang Raya	127	60	28
17	Masama	103	26	23
18	Lamala	142	71	36
19	Mantoh	129	13	18
20	Balantak Selatan	66	24	16
21	Balantak	151	74	35
22	Balantak Utara	66	14	18
23	Bualemo	281	48	40
Total		6952	2023	1391

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.2 Jumlah Koperasi Aktif Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Satuan
1	2020	133	Unit
2	2021	149	Unit
3	2022	150	Unit
4	2023	155	Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.3 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	Satuan
1	2020	44154	Anggota
2	2021	56618	Anggota
3	2022	59443	Anggota
4	2023	26264	Anggota

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.4 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Satuan
1	2020	0,79	Persentase
2	2021	0,79	Persentase
3	2022	0,79	Persentase
4	2023	0,79	Persentase

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.5 Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi	Satuan
1	2020	3,1	Persentase
2	2021	3,06	Persentase
3	2022	3,01	Persentase
4	2023	3,57	Persentase

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.6 Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasusaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasusaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	Satuan
1	2020	10	Persentase
2	2021	10	Persentase
3	2022	15	Persentase
4	2023	18,18	Persentase

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.7 Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah
Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah	Satuan
1	2020	46,24	Persentase
2	2021	46,03	Persentase
3	2022	50,79	Persentase
4	2023	50	Persentase

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.8 Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah	Satuan
1	2020	28,9	Persentase
2	2021	15,87	Persentase
3	2022	58,2	Persentase
4	2023	32,47	Persentase

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

5.5 PERIKANAN

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor perikanan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di wilayah tersebut, termasuk perikanan laut, perikanan darat, serta pengembangan usaha perikanan.

Beberapa tugas utama Dinas Perikanan Kabupaten Banggai meliputi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya.
2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan: Program-program untuk membantu nelayan dan pelaku usaha perikanan agar lebih sejahtera, misalnya melalui pelatihan, bantuan alat tangkap, dan akses pemasaran hasil perikanan.
3. Pemantauan dan Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan di laut maupun di darat, serta melindungi lingkungan perairan dari kerusakan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Dinas ini juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pelatihan di bidang perikanan.
5. Promosi Produk Perikanan Lokal: Memperkenalkan produk-produk perikanan dari Kabupaten Banggai ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Dinas Perikanan juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Banggai.

Berikut Data-data Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu Sebagai berikut :

Tabel 5.5.1 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Produksi Ikan Budidaya Kolam Mas	27560	95840	18700	Kg
2	Produksi Ikan Budidaya Kolam Nila	31200	92327	107750	Kg
3	Produksi Ikan Budidaya Kolam Lele	36934	53200	66510	Kg
4	Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname	542672	2423000	25750000	Kg
5	Produksi Ikan Budidaya Laut Rumput laut	511500	46800	25750000	Kg
6	Produksi Ikan Budidaya Kolam Patin	5,556	5556	6556	Kg
7	Produksi Ikan Budidaya Kolam Lele	116.465.500	53200	52750	Kg

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.2 Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Nilai Produksi Ikan Budidaya Kolam Mas	689000000	665000000	335000000	Rupiah
2	Nilai Produksi Ikan Budidaya Kolam Nila	780000000	2333179000	4833750000	Rupiah
3	Nilai Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname	32560320000	1,45361E+11	149422000	Rupiah
4	Nilai Produksi Ikan Budidaya Laut Rumput laut	3580500000	235800000	238750000	Rupiah

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.3 Luas Area Budidaya Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Luas Areal Budidaya Ikan Kolam	149939	149939	149939	Ha
2	Luas Areal Budidaya Ikan Mina Padi	5000	5000	5000	Ha
3	Luas Areal Budidaya Ikan Sistem Keramba	2568	2568	2568	Ha
4	Luas Areal Budidaya Ikan Air Payau Sistem Tambak	583200	583200	583205	Ha
5	Luas Areal Budidaya Ikan Budidaya KeLaut	2640	2640	2640	Ha

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.4 Jumlah Rumah Tangga Pemilik Budidaya Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Kolam	175	175	175	RTP
2	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Mina Padi	21	21	21	RTP
3	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Air Payau Sistem Tambak	350	352	348	RTP
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Budidaya Ikan Laut	1125	1144	1174	RTP

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

5.6 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sektor peternakan serta kesehatan hewan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, kesehatan hewan, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Beberapa tugas utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai antara lain:

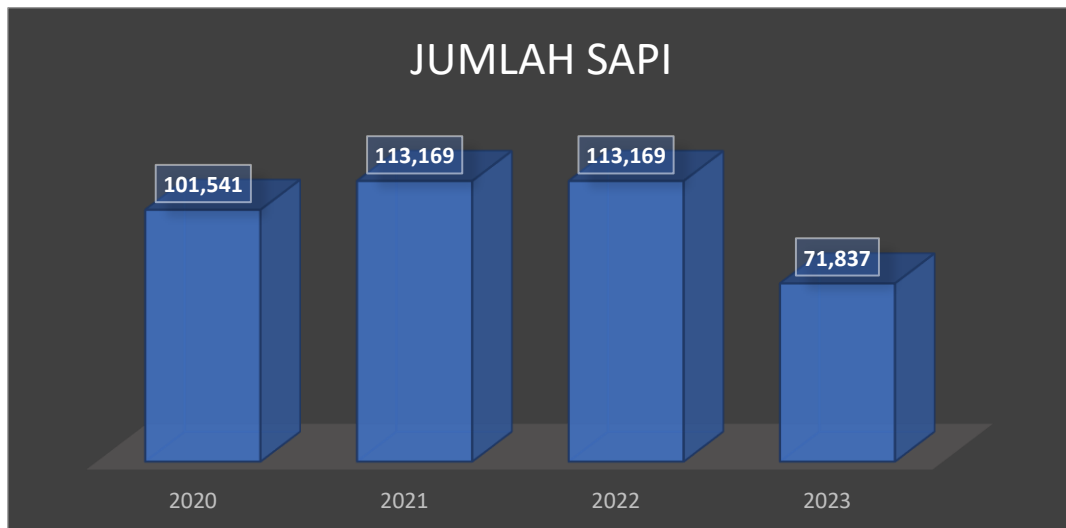
1. Pengembangan Sektor Peternakan: Menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program untuk meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan, baik untuk ternak besar (seperti sapi, kerbau) maupun ternak kecil (seperti kambing, domba, ayam).
2. Kesehatan Hewan: Dinas ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan penyakit hewan, melakukan vaksinasi, serta melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan dan kesehatan manusia (zoonosis).
3. Pemberdayaan Peternak: Dinas ini memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis kepada peternak untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen peternakan yang baik dan ramah lingkungan.
4. Pengawasan dan Regulasi: Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi produk peternakan, seperti daging, susu, dan telur, untuk memastikan produk tersebut aman dan memenuhi standar kualitas.
5. Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait cara merawat hewan ternak, pencegahan penyakit, serta pentingnya sanitasi dan kebersihan dalam usaha peternakan.

6. Peningkatan Infrastruktur Peternakan: Dinas ini juga berperan dalam peningkatan fasilitas pendukung sektor peternakan, seperti tempat pengolahan pakan ternak, fasilitas kesehatan hewan, dan infrastruktur pasar ternak.
7. Keamanan Pangan: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga berperan dalam memastikan bahwa produk peternakan yang beredar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

Melalui program-program tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai berupaya untuk mendukung keberlanjutan sektor peternakan, meningkatkan kualitas hidup peternak, serta menjaga keberlanjutan pasokan pangan asal hewan di daerah ini.

Berikut data-data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Gambar 5.6.1 Jumlah sapi kabupaten banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 202

Gambar 5.6.2 Jumlah Kambing Kabupaten Banggai 2020-2023



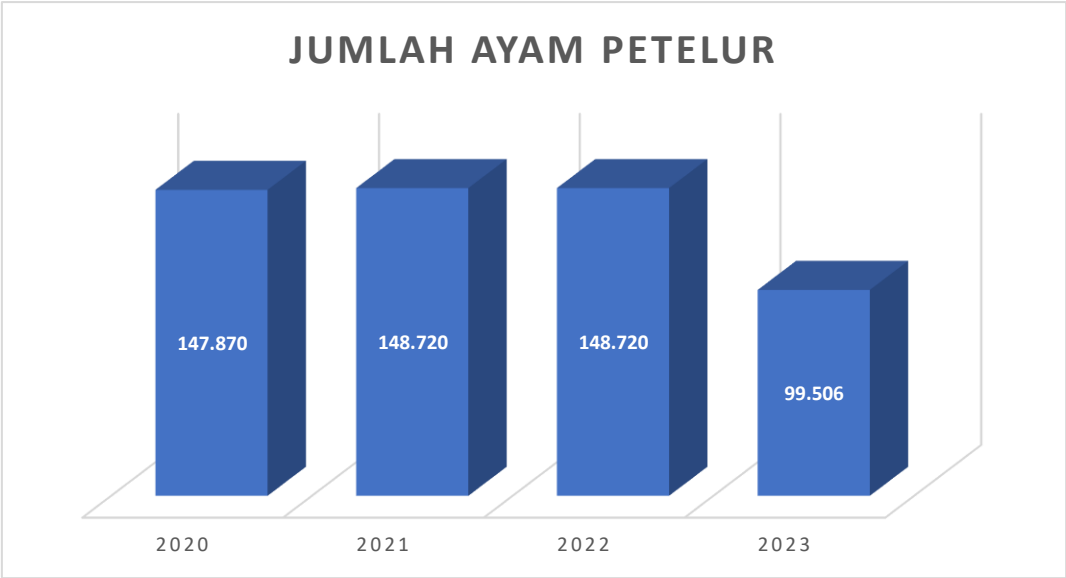
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.3 Jumlah Babi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



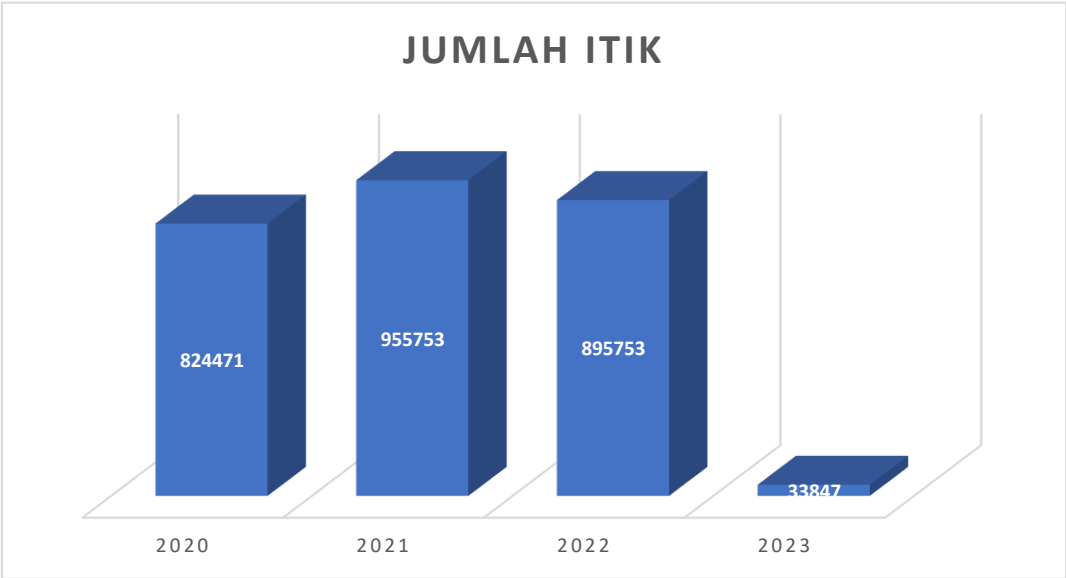
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.4 Jumlah Ayam Petelur Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.5 Jumlah Itik Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

5.7 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas utama dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Badan ini berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.

Beberapa tugas utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai antara lain:

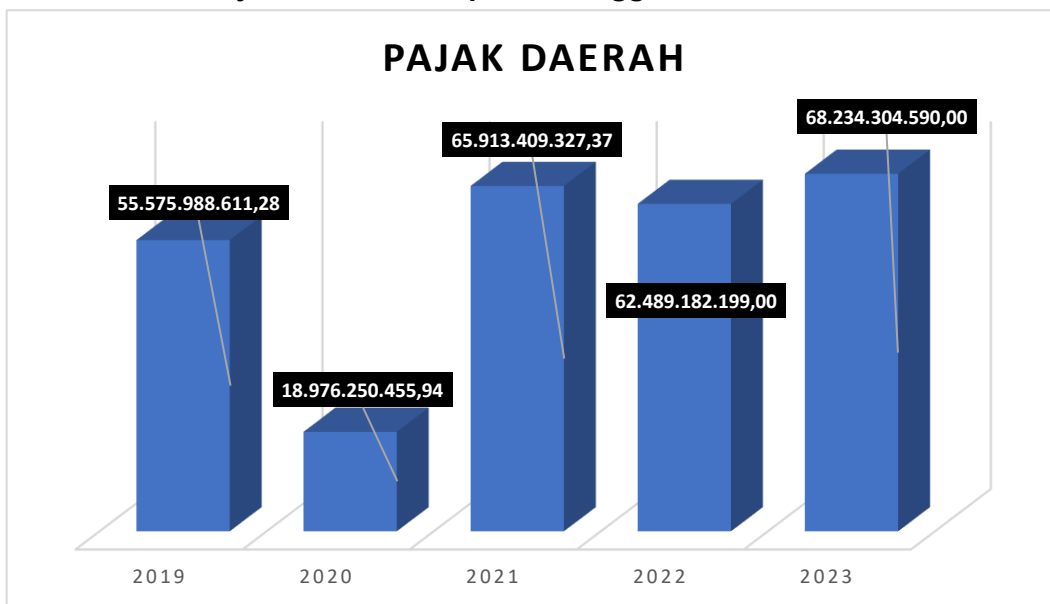
1. **Pengelolaan Pajak Daerah:** BPD bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak lainnya. Pengumpulan pajak ini menjadi sumber utama pendapatan daerah.
2. **Pengelolaan Retribusi Daerah:** BPD juga mengelola retribusi daerah yang dikenakan untuk berbagai layanan atau kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi lainnya.
3. **Perencanaan dan Penetapan Anggaran:** Badan ini turut berperan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran daerah berdasarkan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh dari pajak dan retribusi.
4. **Pemungutan dan Pengawasan:** BPD bertugas untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan agar proses pemungutan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
5. **Sosialisasi dan Edukasi:** BPD melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak dan retribusi, serta pentingnya pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
6. **Pengelolaan Sumber Pendapatan Lainnya:** Selain pajak dan retribusi, BPD juga mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, seperti hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil usaha daerah, dan pendapatan lainnya.

7. Peningkatan Efisiensi dan Transaksi Elektronik: Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai seringkali mengembangkan sistem pembayaran elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi mereka.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berperan vital dalam mendukung keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

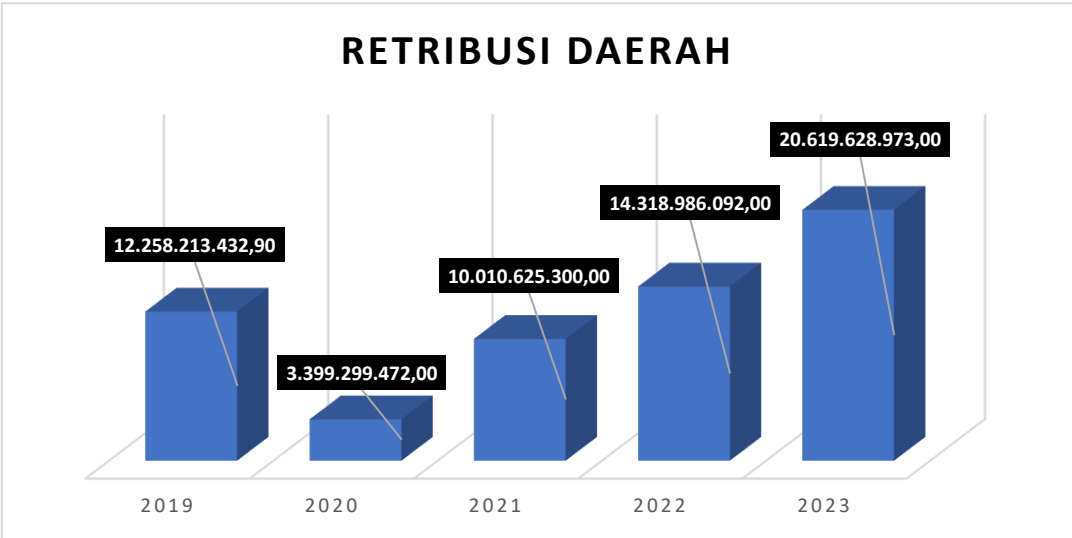
Berikut Data-data pada Badan Pendapatan Daerah :

Gambar 5.7.1 Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Gambar 5.7.2 Jumlah Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Gambar 5.7.3 Jumlah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Tabel 5.7.1 Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

No	Indikator	2022	2023	Satuan Data
1	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	62.489.182.199	68.234.304.590	Milyar
2	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	14.318.986.092	20.599.154.673	Milyar
3	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.962.201.303	5.714.244.284	Milyar
4	Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah	130.853.622.702	140.326.206.468	Milyar
5	Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.586.662.000	6.886.662.000	Milyar
6	Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000	2.000.000.000	Milyar
7	Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000	50.000.000	Milyar
8	Anggaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.790.000	45.790.000	Milyar
9	Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000.000	2.650.000.000	Milyar
10	Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.583.581.909	3.833.581.000	Milyar
11	Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000	225.000.000	Milyar
12	Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	150.000.000	Milyar
13	Anggaran Retribusi Terminal	337.133.680	487.133.000	Milyar
14	Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir	500.000.000	750.000.000	Milyar

15	Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	810.192.637	1.810.192.000	Milyar
16	Anggaran Retribusi Izin Trayek	52.662.500	77.662.000	Milyar
17	Anggaran Retr. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	200.000.000	300.000.000	Milyar
18	Anggaran Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan	300.000.000	300.000.000	Milyar
19	Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan	350.628.700	400.628.000	Milyar
20	Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan	376.691.148	401.691.000	Milyar
21	Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar	2.108.300.635	2.108.300.000	Milyar
22	Anggaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol	154.900.000	154.900.000	Milyar
23	Anggaran Retribusi Tera/Tera Ulang	552.530.000	1.592.535.486	Milyar
24	Anggaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000	75.000.000	Milyar
25	Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik)	227.329.490	302.329.000	Milyar
26	Anggaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	875.557.787	1.075.557.000	Milyar
27	Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.974.651.473	11.316.728.808	Milyar
28	Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	846.305.000	994.765.000	Milyar
29	Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.900.000	7.500.000	Milyar

30	Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	17.800.000	19.000.000	Milyar
31	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	698.267.000	1.532.960.750	Milyar
32	Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.098.213.953	906.496.085	Milyar
33	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.206.000	3.750.000	Milyar
34	Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	151.906.000	Milyar
35	Realisasi Retribusi Terminal	168.150.000	167.113.000	Milyar
36	Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir	261.639.000	232.410.000	Milyar
37	Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	984.092.375	1.056.038.385	Milyar
38	Realisasi Retribusi Izin Trayek	3.825.000	1.275.000	Milyar
39	Realisasi Retr. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	65.600.000	98.470.000	Milyar
40	Realisasi Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan	107.000.000	171.104.505	Milyar
41	Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan	219.360.800	163.939.000	Milyar
42	Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan	161.362.665	127.158.440	Milyar
43	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	1.386.898.000	1.732.235.000	Milyar
44	Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol	39.500.000	49.500.000	Milyar
45	Realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang	23.846.500	24.644.000	Milyar

46	Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25.260.000	18.140.000	Milyar
47	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik)	186.752.500	240.460.000	Milyar
48	Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	774.309.926	933.366.300	Milyar
49	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hotel	50,02%	78,79%	Persen
50	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Restoran	64,58%	59,48%	Persen
51	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hiburan	41,02%	44,64%	Persen
52	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Reklame	56,38%	44,13%	Persen
53	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Penerangan Jalan	72,53%	76,12%	Persen
54	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Parkir	65,87%	83,17%	Persen
55	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Air Tanah	59,61%	15,19%	Persen
56	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	55,85%	70,23%	Persen
57	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak BPHTB	77,30%	97,89%	Persen
58	Perbandingan Anggaran dan Realisasi PBB-P2	74,61%	70,86%	Persen

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

5.8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan memfasilitasi penanaman modal (investasi) serta memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berikut beberapa tugas utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai:

1. Fasilitasi Penanaman Modal

DPMPTSP bertanggung jawab untuk menarik investasi ke daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini termasuk memberikan informasi tentang peluang investasi, prosedur investasi, dan manfaat yang bisa didapatkan oleh para investor. Dinas ini juga berperan dalam mengkoordinasikan antara investor dengan instansi terkait lainnya.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu

Salah satu fungsi utama DPMPTSP adalah memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini mempermudah pengusaha atau investor dalam mengurus berbagai izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan izin lainnya. Proses perizinan ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan transparan.

3. Penyederhanaan Prosedur Perizinan

DPMPTSP berusaha untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik yang berinvestasi maupun yang membutuhkan layanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan birokrasi yang rumit dan waktu yang lama dalam mengurus izin.

4. Pemberian Informasi dan Konsultasi

Dinas ini menyediakan berbagai informasi terkait investasi dan perizinan. DPMPTSP juga memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat dan calon investor mengenai proses perizinan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta potensi sektor usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Banggai.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Selain memberikan izin, DPMPTSP juga berfungsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan investasi di daerah.

6. Promosi dan Pengembangan Investasi

DPMPTSP memiliki peran dalam mempromosikan potensi investasi yang ada di Kabupaten Banggai, baik melalui kegiatan pameran, seminar, maupun kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat. Dinas ini juga terlibat dalam pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menarik minat investor.

7. Pelayanan Administrasi dan Layanan Non-Perizinan

Selain perizinan, DPMPTSP juga memberikan layanan administrasi terkait dengan sektor-sektor usaha yang tidak memerlukan izin formal, namun tetap membutuhkan pengaturan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dinas ini juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal yang ingin mengembangkan usaha mereka, baik di bidang perdagangan, industri, pertanian, maupun pariwisata.

9. Digitalisasi Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai berupaya untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan secara online, seperti pengajuan

izin atau konsultasi mengenai investasi. Ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

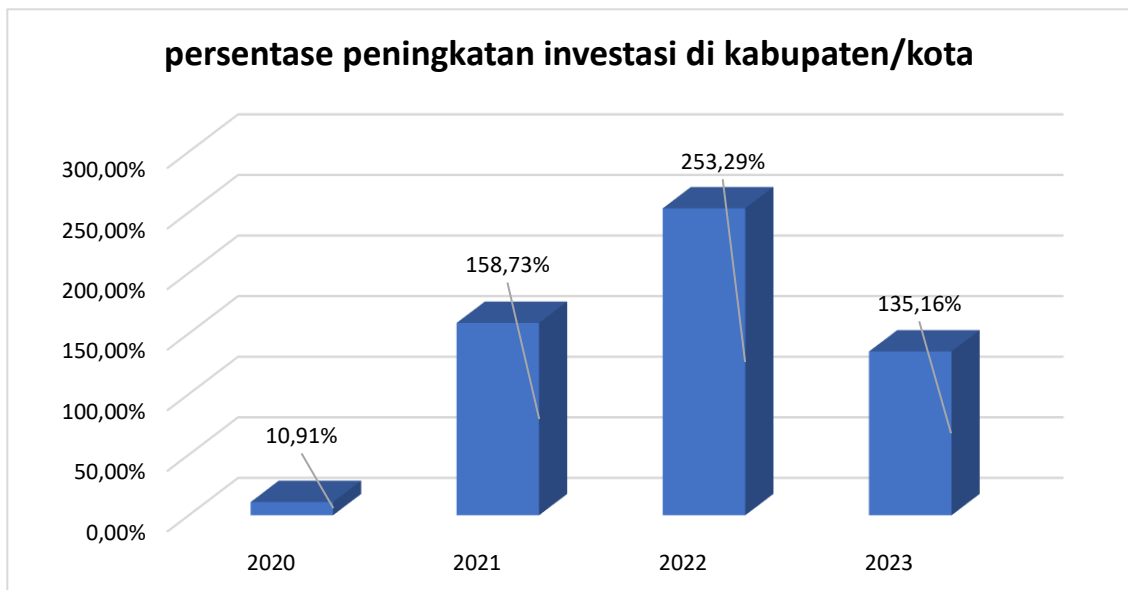
10. Koordinasi Antar Instansi

DPMPTSP juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan instansi terkait lainnya, baik di tingkat provinsi, pusat, maupun lembaga swasta, untuk memastikan investasi dan perizinan berjalan lancar.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berikut Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai yaitu Sebagai Berikut :

Gambar 5.8.1 Persentase persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 5.8.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 5.8.1 Data Statistik sektoral Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	216	393	477
2	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	730	2.940	633
3	jumlah seluruh PMA/PMDN	216	540	700
4	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	13	7	6
5	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.546	4.004	6.330
6	Laporan realisasi penanaman modal	216	540	700

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

5.9 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan perdagangan, industri, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Berikut adalah beberapa tugas utama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai:

1. Pengembangan Sektor Perdagangan

Dinas ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan sektor perdagangan di Kabupaten Banggai. Ini mencakup pengelolaan pasar tradisional dan modern, pengaturan distribusi barang, serta mengatur sistem perdagangan yang efisien dan transparan. Disperdagin juga bekerja untuk memastikan ketersediaan barang dan kebutuhan pokok di pasar dengan harga yang wajar.

2. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal

Salah satu tugas Disperdagin adalah meningkatkan daya saing produk lokal dari Kabupaten Banggai, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Ini dilakukan melalui promosi produk unggulan, pelatihan bagi pelaku usaha, serta pengembangan kemasan dan standar kualitas produk yang lebih baik.

3. Pembinaan dan Pengawasan Industri

Dinas ini juga berfungsi untuk membina pelaku industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Disperdagin membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha mereka, memberikan informasi mengenai regulasi industri, serta melakukan pengawasan terhadap operasional industri untuk memastikan mereka berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Fasilitasi Pemasaran Produk

Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut berperan dalam memfasilitasi pemasaran produk lokal dengan mengadakan berbagai pameran, bazar, atau event promosi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk-produk daerah Banggai ke pasar yang lebih luas, baik dalam maupun luar negeri.

5. Pengaturan dan Pengawasan Harga Barang

Disperdagin juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi harga barang di pasaran, khususnya barang-barang kebutuhan pokok agar tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal ini termasuk pemantauan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat seperti penimbunan barang atau penipuan harga.

6. Pemberdayaan Pedagang dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dinas ini memiliki fokus untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pedagang serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu caranya adalah melalui pelatihan, pemberian fasilitas, atau bantuan untuk meningkatkan kualitas produk dan keterampilan manajerial bagi pelaku usaha.

7. Regulasi dan Kebijakan Perdagangan

Disperdagin merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta regulasi yang terkait dengan perdagangan dan industri di tingkat daerah. Ini termasuk mengatur izin usaha, aturan tentang perdagangan antar daerah, dan kebijakan lain yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.

8. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan dan Industri

Dinas ini berperan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan dan industri, seperti pasar tradisional, gedung pertemuan, serta fasilitas pendukung bagi usaha industri, baik besar maupun kecil.

9. Pemantauan dan Evaluasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Banggai.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

10. Penyuluhan dan Edukasi

Disperdagin juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, mengenai pentingnya mengikuti peraturan, standar kualitas, serta cara-cara baru dalam berbisnis agar usaha mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

11. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Disperdagin turut terlibat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banggai, dengan menyediakan akses bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan produk-produk kreatif seperti kerajinan tangan, seni lokal, dan produk khas daerah.

Melalui berbagai tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong daya saing produk lokal agar lebih dikenal dan diminati.

Tabel 5.9.1 Jumlah Pasar dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Jumlah pasar tradisional	15	15	15	Unit
2	Jumlah Pedagang Kaki Lima	563	563	562	Orang

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

Tabel 5.9.2 Volume ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Volume Eksport Komoditi Hasil Perkebunan	3.604.484,98	2.844.414,41	2029269,7	KGM
2	Volume Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan	20.500	21,111	394021,21	KGM
3	Volume Eksport Komoditi Hasil Minyak dan Gas	57.596.144.99	80.536.821,28	735412,1	TON

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

Tabel 5.9.2 Jumlah Nilai Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Nilai Ekspor Total	6.479.683.472.272.40	12,007,232,559,600	10,920,051,514,828.80
2	Nilai Ekspor Komoditi Hasil Perkebunan	133,024,335,237.40	99,798,562,650	53,012,558,745.60
3	Nilai Ekspor Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan	1,000,526,780	270,962,500	37,126,042,060.80
4	Nilai Ekspor Komoditi Hasil Minyak dan Gas	6.345.658.610.255	11,904,863,034,540	7,913,328,333,312.00
5	Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan	133,024,335,237.40	99,798,562,650	53,012,558,745.60
6	Nilai FOB Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan	1,000,526,780	270,962,500	37,126,042,060.80
7	Nilai FOB Komoditi Hasil Minyak dan Gas	6.345.658.610.255	11,904,863,034,540	7,913,328,333,312.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

6.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengurangi risiko bencana, menangani penanggulangan bencana, serta membantu pemulihan pasca-bencana di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. BPBD berperan dalam memastikan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana alam, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, atau bencana lainnya.

Berikut adalah beberapa tugas dan peran utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai:

1. Perencanaan dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

BPBD bertanggung jawab untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Rencana ini mencakup berbagai aspek, seperti mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

BPBD melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut, serta bagaimana cara mengurangi risiko dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.

3. Pelaksanaan Mitigasi Bencana

BPBD Kabupaten Banggai berperan aktif dalam kegiatan mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghindari risiko bencana melalui berbagai kegiatan.

4. Kesiapsiagaan dan Latihan

BPBD rutin mengadakan latihan kesiapsiagaan bencana, baik untuk aparat pemerintah, masyarakat, maupun relawan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk evakuasi cepat, penyelamatan korban, serta penanganan bencana di lapangan.

5. Respon Darurat dan Penanganan Bencana

Salah satu tugas utama BPBD adalah melakukan koordinasi dan respon cepat ketika terjadi bencana. BPBD bertanggung jawab untuk mengerahkan tim reaksi cepat, memberikan bantuan darurat seperti makanan, obat-obatan, tempat pengungsian, serta memastikan proses evakuasi berjalan dengan lancar dan aman.

6. Pengelolaan Dana dan Logistik Bencana

BPBD mengelola dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan memastikan bantuan logistik tersedia saat dibutuhkan. Ini mencakup pengadaan perlengkapan evakuasi, obat-obatan, tenda pengungsian, serta kebutuhan mendesak lainnya yang diperlukan selama penanggulangan bencana.

7. Pemulihan Pasca-Bencana

Setelah bencana berlalu, BPBD bertugas untuk memimpin upaya pemulihan dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, seperti rekonstruksi rumah yang rusak, penyediaan fasilitas kesehatan, serta bantuan sosial untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.

8. Koordinasi Antar Instansi

BPBD berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, baik itu lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swasta, maupun relawan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

9. Penyusunan dan Pemantauan Peta Risiko Bencana

BPBD turut menyusun peta risiko bencana untuk memetakan daerah-daerah yang rawan bencana di Kabupaten Banggai. Peta ini berguna untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan pemerintah terkait area yang lebih rentan terhadap bencana, seperti wilayah rawan banjir, tanah longsor, atau gempa bumi.

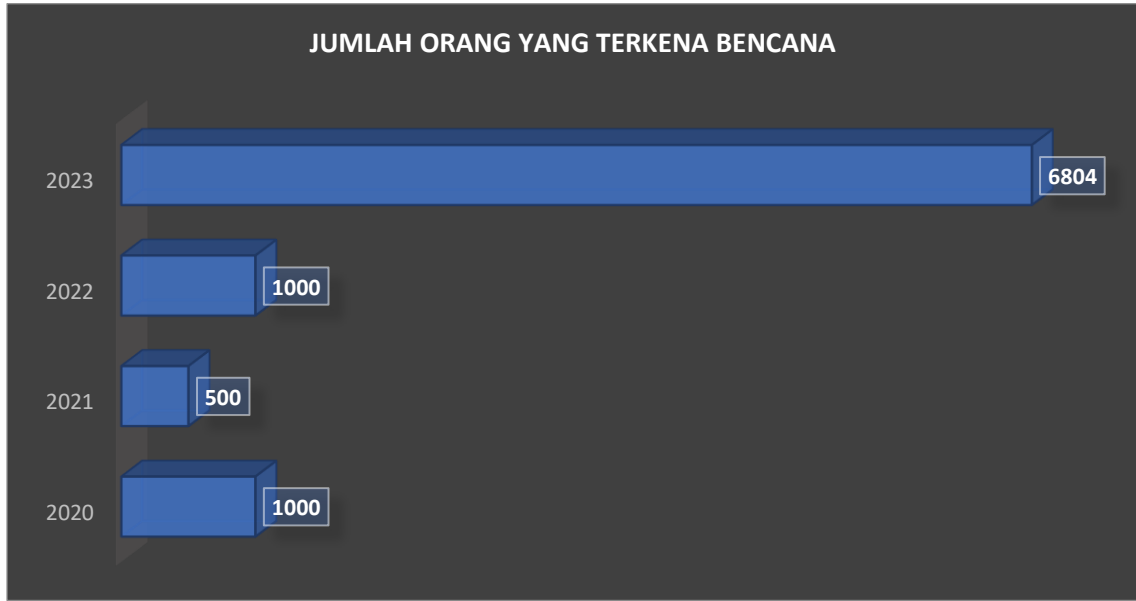
10. Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

BPBD juga berperan dalam advokasi kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini termasuk mendorong pembuatan regulasi dan kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana serta mempersiapkan daerah lebih baik dalam menghadapi bencana di masa depan.

Melalui tugas-tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai berperan penting dalam memastikan masyarakat siap menghadapi potensi bencana, serta dapat mengurangi dampak bencana yang terjadi, dan memulihkan keadaan pasca-bencana secara efektif.

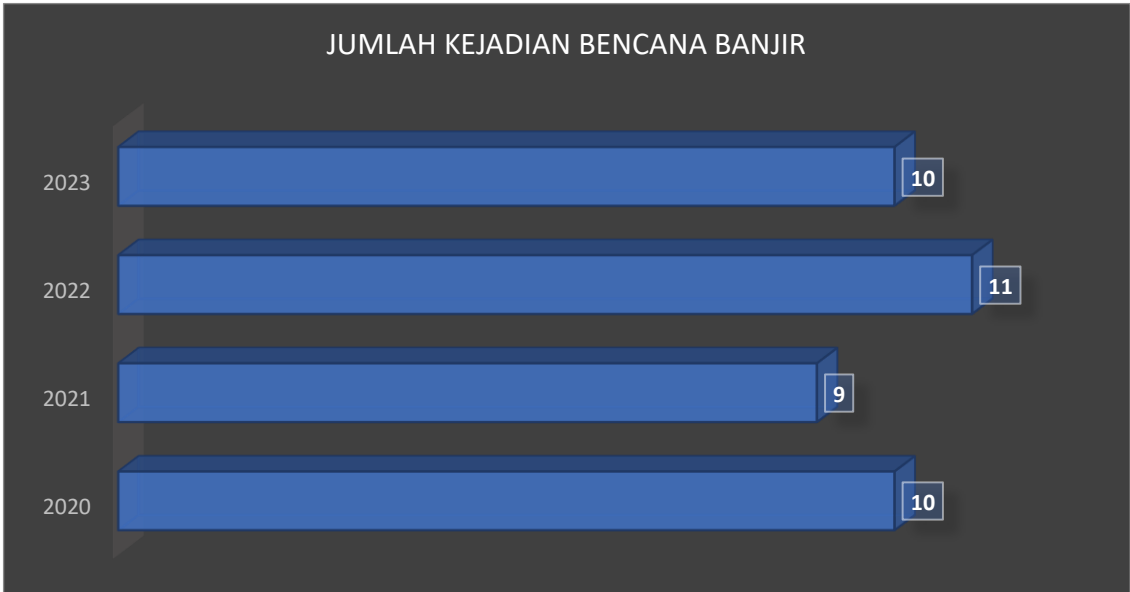
Berikut Data-data Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai Sebagai Berikut :

Gambar 6.1.1 Jumlah Orang yang Terkena Bencana Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

Gambar 6.1.2 Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

Tabel 5.8.1 Jumlah Fasilitas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023	Satuan Data
1	Jumlah Mobil Penanggulangan Bencana	3	3	4	Unit
2	Jumlah Motor Dinas Penanggulangan Bencana	5	14	15	Unit
3	Jumlah Perahu Karet Dinas Penaggulangan Bencana	5	13	13	Unit
4	Jumlah Tenda Dinas Penanggulangan Bencana	6	6	6	Unit
5	Jumlah Valbet Dinas Penanggulangan Bencana	4	4	4	Unit

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

6.2 Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran merupakan salah satu layanan penting yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Di Kabupaten Banggai, layanan pemadam kebakaran dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Banggai. Pemadam kebakaran ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat serta melindungi properti dari kerusakan akibat kebakaran.

Peran dan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai berperan penting dalam upaya penanggulangan kebakaran yang dapat terjadi di berbagai sektor, baik itu di kawasan pemukiman, industri, ataupun hutan dan lahan. Beberapa tugas utama Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pencegahan Kebakaran (Fire Prevention)
2. Tanggap Darurat Kebakaran
3. Penyelamatan dan Penanganan Bencana Lain
Selain kebakaran, Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai juga berperan dalam penanggulangan bencana lainnya, seperti penyelamatan korban kecelakaan atau bencana alam (misalnya tanah longsor atau banjir), serta melakukan pertolongan pertama kepada korban bencana.
4. Penyuluhan dan Pelatihan
5. Pengawasan dan Pelaporan

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

- Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar): Mobil damkar yang dilengkapi dengan alat pemadam api dan selang panjang digunakan untuk menyuplai air ke sumber api.

- **Alat Pemadam Api Ringan (APAR):** Pemadam kebakaran juga memiliki alat pemadam api ringan yang bisa digunakan untuk kebakaran kecil yang masih bisa dikendalikan.
- **Peralatan Penyelamatan:** Pemadam kebakaran dilengkapi dengan alat-alat penyelamatan, seperti tangga, alat pemotong, dan alat bantu lainnya untuk membantu evakuasi korban yang terjebak.
- **Water Tank dan Sumber Air:** Kabupaten Banggai, khususnya daerah yang rawan kebakaran, memiliki fasilitas penyediaan air yang memadai, termasuk penampungan air (reservoir) dan saluran untuk distribusi air.

Kolaborasi dengan Instansi Lain

Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai bekerja sama dengan berbagai instansi lain dalam menangani kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti:

- **Polres Banggai:** Untuk pengamanan dan investigasi pasca-kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran.
- **BPBD Kabupaten Banggai:** BPBD mendukung dalam hal koordinasi dan distribusi bantuan ketika kebakaran menjadi bagian dari bencana yang lebih besar.
- **TNI:** Terlibat dalam pengamanan dan penanganan kebakaran di area yang lebih luas atau ketika bencana kebakaran melibatkan kerusakan besar.
- **Satpol PP:** Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi kejadian kebakaran dan saat evakuasi.

6.3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu lembaga yang berperan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di daerah, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana. Di Kabupaten Banggai, peran Satpol PP dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Dukungan dalam Penegakan Peraturan: Satpol PP berperan dalam memastikan bahwa peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana, seperti pembatasan pergerakan warga saat bencana atau pelaksanaan aturan evakuasi, dapat diterapkan dengan efektif.
2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Satpol PP bekerja sama dengan BPBD dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap bencana dan cara bertindak di saat darurat.
3. Evakuasi dan Pengamanan: Dalam situasi bencana, Satpol PP turut berperan dalam proses evakuasi korban dan mengamankan lokasi-lokasi yang terdampak bencana, seperti mengatur arus lalu lintas dan memastikan tidak ada orang yang berada di lokasi berbahaya.
4. Pemberian Bantuan dan Logistik: Satpol PP membantu dalam distribusi bantuan logistik dan memastikan bantuan sampai ke tempat yang tepat. Mereka juga dapat berperan dalam pengelolaan tempat-tempat pengungsian.
5. Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum: Satpol PP membantu menjaga ketertiban umum di tengah situasi darurat bencana, termasuk menangani penyalahgunaan atau kericuhan yang bisa timbul di tengah krisis.

6. Penegakan Keamanan dan Ketertiban di Lokasi Pengungsian: Satpol PP menjaga keamanan di tempat-tempat pengungsian dan memastikan tidak ada penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan di lokasi tersebut.

Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Satpol PP Kabupaten Banggai bekerja sama dengan berbagai instansi dalam rangka penanggulangan bencana. Beberapa instansi yang terlibat adalah:

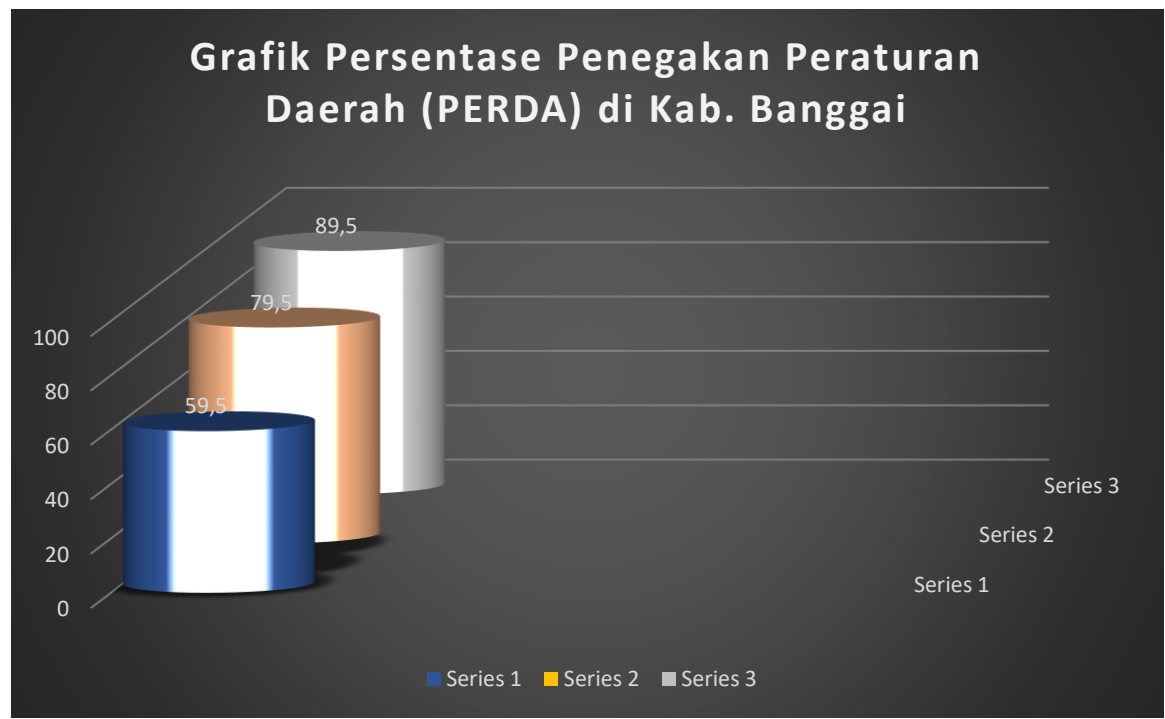
- BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah): Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Banggai.
- TNI dan Polri: Untuk mengamankan wilayah bencana dan membantu proses evakuasi.
- Dinas Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada korban bencana.
- Relawan dan LSM: Berkolaborasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Tabel 6.3.1 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai

No	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai	59,5	79,5	89,5
	Jumlah	59,5	79,5	89,5

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Grafik 6.3.2 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai



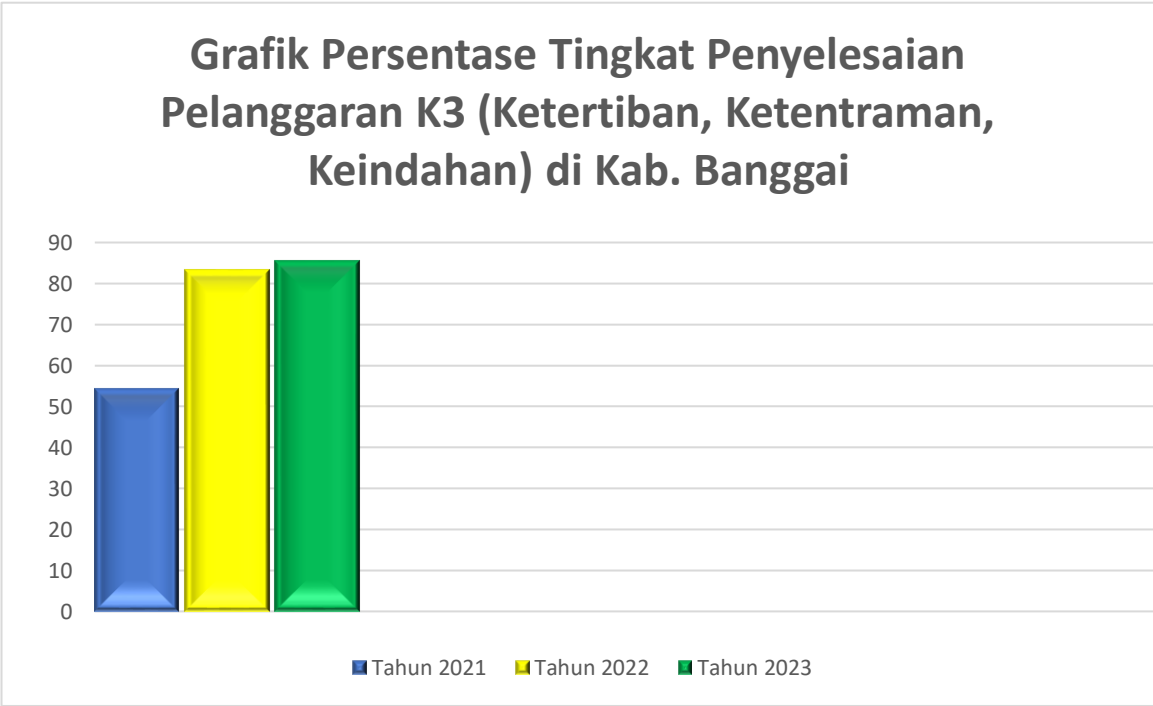
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Tabel 6.3.3 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai

No	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai	54,34	83,33	85,5
	Jumlah	54,34	83,33	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Grafik 6.3.4 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

KESIMPULAN

Laporan Statistik Sektoral yang disusun oleh setiap dinas memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja, tantangan, serta potensi pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Banggai. Berikut adalah kesimpulan umum yang dapat diambil dari laporan tersebut:

1. Kinerja dan Capaian Program

- Peningkatan Indikator Pembangunan

Sebagian besar dinas menunjukkan tren positif dalam pencapaian indikator pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

- Realisasi Program Prioritas

Program-program unggulan di berbagai sektor berhasil direalisasikan meskipun terdapat beberapa hambatan seperti alokasi anggaran yang terbatas.

2. Pengelolaan Sumber Daya

- Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

Beberapa dinas berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

- Pengembangan SDM

Dinas-dinas terkait menunjukkan komitmen terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik.

3. Tantangan dan Hambatan

- Keterbatasan Infrastruktur

Beberapa sektor menghadapi tantangan terkait kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah terpencil.

- Pengaruh Eksternal

Faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global dan dampak perubahan iklim memengaruhi pelaksanaan program di sektor tertentu.

- Integrasi Data Antar Dinas

Masih terdapat kendala dalam penyatuan data lintas sektor, yang menghambat perencanaan terpadu berbasis bukti.

4. Digitalisasi dan Inovasi

- Implementasi Sistem Digital

Sebagian besar dinas telah mulai mengadopsi sistem digital untuk pengelolaan data dan pelayanan publik, meskipun tingkat implementasi masih beragam.

- Inovasi Pelayanan

Beberapa dinas menciptakan inovasi layanan berbasis teknologi yang berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan masyarakat.

5. Rekomendasi untuk Perbaikan

- Penguatan Kolaborasi Antar Dinas

Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan.

- Pemanfaatan Data yang Terintegrasi

Membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

- Investasi pada Infrastruktur

Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal untuk memastikan pemerataan pembangunan.

- Transformasi Digital yang Konsisten

Mempercepat transformasi digital di semua dinas agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh dinas untuk meningkatkan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat transformasi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai.